



LAPORAN KINERJA
2022
DITJEN KSDAE



LAPORAN KINERJA
2022
DITJEN KSDAE



Laporan Kinerja

2022

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2023

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437
Email: evaluatorksdade@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id



Sunrise di Pantai Karang Sewu, Taman Nasional Bali Barat
Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat





Pemberian penghargaan kepada Raja Buleleng oleh Menteri LHK, pada acara peringatan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2022 di Karang Sewu, Taman Nasional Bali Barat

Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) tengah melakukan transformasi tata kelola kawasan konservasi berbasis lanskap, ekosistem, dan masyarakat. Konteks tata kelola lanskap merujuk pada pengelolaan kawasan konservasi dengan dukungan dan partisipasi aktif para pihak, khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan. Pada akhirnya terwujud kelestarian fungsi kawasan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Upaya tata kelola kawasan konservasi tersebut dilakukan sejalan dengan mandat rencana strategis Ditjen KSDAE tahun 2020-2024 (revisi). Revisi rencana strategis Ditjen KSDAE tahun 2020-2024 dilakukan sebagai upaya tindak lanjut revisi rencana strategis KLHK 2020-2024 yang dilaksanakan karena adanya perubahan organisasi berdasarkan Permen LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.



Perubahan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi. Tugas dan fungsi Ditjen KSDAE dilaksanakan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program tersebut memiliki tujuh sasaran yang diukur menggunakan satu indikator kinerja program untuk setiap sasaran.

Sasaran program pertama yaitu meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik di dalam dan di luar kawasan konservasi, dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 10.410.368 hektar. Sasaran program kedua, terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati spesies di luar kawasan konservasi seluas 10 juta hektar.

Sasaran program ketiga adalah meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dengan indikator kinerja berupa jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 2,1 Triliun Rupiah. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam program keempat adalah meningkatnya pengelolaan jasa

lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari dengan indikator berupa jumlah nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 100 miliar rupiah. Sasaran program kelima adalah meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 500 desa. Sasaran program selanjutnya adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dengan indikator kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 57,5 poin. Terakhir, sasaran program ketujuh adalah meningkatnya tata kelola pemerintah bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima dengan indikator kinerja berupa nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79 poin.

Di samping indikator kinerja tersebut, Ditjen KSDAE juga turut mendukung program nasional untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 secara otomatis berimplikasi pada penyesuaian anggaran melalui kebijakan *Automatic Adjustment*, sehingga turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.

Pertanggungjawaban atas kinerja-kinerja tersebut, dituangkan dalam Laporan kinerja. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen KSDAE serta semua pihak atas kontribusi dan peran sertanya dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Jakarta, 30 Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal KSDAE,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.
NIP. 19640903 198903 1 001

Plt. Direktur Jenderal KSDAE memberikan arahan dalam
Rapat Kerja Teknis Ditjen KSDAE tahun 2022
Sumber: Data dan Informasi, Setditjen KSDAE



CAPAIAN IKP

Ditjen KSDAE Tahun 2022

REALISASI ANGGARAN

97,43%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

106,23%

RASIO EFISIENSI

0,92
(Efisien)

Meningkatnya Ruang
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Spesies dan Genetik di Dalam dan di Luar
Kawasan Konservasi

Luas Kawasan yang terverifikasi
sebagai Perlindungan Keanekaragaman
Hayati

Target 10.410.368 Ha

Capaian 12.203.261,61 Ha

capaian Kinerja

117,22%

Terselenggaranya Inventarisasi dan
verifikasi nilai keanekaragaman hayati
tinggi di luar Kawasan Konservasi

Luas kawasan yang diinventarisasi dan
diverifikasi dengan nilai keanekaragaman
hayati tinggi secara partisipatif di luar
Kawasan Konservasi

Target 10 juta Ha

Capaian 8,06 Ha

capaian Kinerja

80,60%

Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan
Tumbuhan dan Satwa Liar

Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL
dari hasil penangkaran

Target 2,10 T Rupiah

Capaian 1,74 T Rupiah

capaian Kinerja

83,00%

Meningkatnya Pengelolaan Jasa
Lingkungan Kawasan Konservasi dan
Pemanfaatan TSL secara lestari

Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL

Target 100 M Rupiah

Capaian 130,23 M Rupiah

capaian Kinerja

130,23%

Meningkatnya Ruang Usaha bagi
Masyarakat di sekitar Kawasan
Konservasi

Jumlah Desa yang mendapatkan akses
pengelolaan Kawasan Konservasi dan
Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

Target 500 Desa

Capaian 612 Desa

capaian Kinerja

122,40%

Meningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Hutan Konservasi

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan
Konservasi

Target 57,50 Poin

Capaian 63,24 Poin

capaian Kinerja

109,98%

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
bidang LHK yang akuntabel, responsif
dan berpelayanan prima

Nilai SAKIP pada Ditjen KSDAE

Target 79,00 Poin

Capaian 79,12 Poin

capaian Kinerja

100,15%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditjen KSDAE mendukung pelaksanaan 3 program yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hutan konservasi yaitu: 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor; 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; 4) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan 6) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi. Sedangkan sasaran yang dimandatkan pada Ditjen KSDAE yaitu: 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL; 3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari; 4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan 6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen KSDAE tersebut diukur melalui 7 indikator kinerja program yaitu: 1) luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 10.410.368 hektar; 2) luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati spesies di luar kawasan konservasi seluas 10 juta hektar; 3) jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 2,1 Triliun Rupiah; 4) jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 100 miliar rupiah; 5) jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 500 desa; 6) indikator kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 57,5 poin; dan 7) nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79 poin.

Penetapan target indikator kinerja program setiap tahunnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2022, dari keseluruhan 7 indikator kinerja program, 5 indikator kinerja dapat tercapai melebihi target, sedangkan 2 lainnya belum mencapai target.

Capaian indikator kinerja program tersebut yaitu: 1) luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati terealisasi seluas 12.203.261,61 hektar atau 117,22% dari target 10.410.368 hektar; 2) luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman

hayati spesies di luar kawasan konservasi seluas 8,06 juta hektar atau 80,6% dari target 10 juta hektar; 3) jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 1,74 Triliun Rupiah atau 83% dari target 2,10 Triliun Rupiah; 4) jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 130,23 Miliar Rupiah 130,23% dari target 100 Miliar Rupiah; 5) jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 612 desa atau 122,40% dari target 500 desa; 6) indikator kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 63,24 poin atau 109,98% dari target 57,5 poin; dan 7) nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79,12 poin atau 100,15% dari target 79 poin, sehingga rata-rata capaian indikator kinerja program yaitu sebesar **106,23%**.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, KSDAE mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.602.333.693.000 dengan realisasi Rp 1.561.217.903.467 atau **97,43%**. Nilai efisiensi penggunaan anggaran berupa perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja, diperoleh nilai **0,92**, yang berarti **Ditjen KSDAE efisien** dalam penggunaan anggarannya.

Pagu anggaran Ditjen KSDAE tahun 2022 mengalami perubahan sebanyak 13 kali, antara lain disebabkan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* tahap I sebesar Rp 72.558.179.000, *cut off* SBSN di BBKSDA Riau dan BKSDA Yogyakarta sebesar Rp 109.391.937.000, dan adanya kebijakan

Automatic Adjustment tahap II sebesar Rp.48.888.469.000.

Kebijakan *Automatic Adjustment* memberi dampak pada pelaksanaan kinerja dan anggaran. Indikator kinerja luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati spesies di luar kawasan konservasi merupakan salah satu kegiatan yang mengalami re-alokasi anggaran. Sedangkan tidak tercapainya indikator kinerja jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran, disebabkan kondisi pasar internasional belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19, sehingga permintaan pasar terhadap komoditi TSL berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan, beberapa negara tujuan ekspor masih menutup keran impor komoditi TSL.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak, khususnya pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi di luar kawasan konservasi. Dalam praktiknya, kegiatan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, maupun dunia usaha. Dalam hal peningkatan ekspor TSL, langkah solutif dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas keberhasilan unit penangkaran. upaya ini didorong dalam bentuk fasilitasi dan pemberian kesempatan penambahan/ perolehan induk untuk mendapatkan darah baru (*fresh blood*) yang berasal dari penangkaran lain serta peningkatan pelayanan perizinan pengedar luar negeri.



Keindahan Air Terjun Lapopu di Taman Nasional Manupeu
Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Sumber: Mandra Pahlawa

GLOSARIUM

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
APL	: Area Penggunaan Lain	KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
ASN	: Aparatur Sipil Negara	KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	KSA	: Kawasan Suaka Alam
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional	KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam	KSDAHE	: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
BPPE	: Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
BTN	: Balai Taman Nasional	LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
CA	: Cagar Alam	METT	: <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i>
CFR	: <i>Cost and Freight</i>	MOWA	: Masuk Objek Wisata Alam
CITES	: <i>Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna dan Flora</i>	NKA	: Nilai Kinerja Anggaran
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah	NSPK	: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Ditjen	: Direktorat Jenderal	OMSPAN	: <i>Online Monitoring Sistem</i> Perbendaharaan dan Anggaran Negara
EKA	: Evaluasi Kinerja Anggaran	OSS	: <i>One Single Submission</i>
EKF	: Evaluasi Kesesuaian Fungsi	PDB	: Produk Domestik Bruto
FOB	: Free on Board	PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
G20	: <i>Group of 20</i>	PHUPJWA	: Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
HKAN	: Hari Konservasi Alam Nasional	PHUPSWA	: Pungutan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
HL	: Hutan Lindung	PJLKK	: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
HOK	: Hari Orang Kerja	PK	: Perjanjian Kinerja
HP	: Hutan Produksi	PKS	: Perjanjian Kerjasama
IKP	: Indikator Kinerja Program	PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	PN	: Prioritas Nasional
IUPJWA	: Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam	PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
IUPSWA	: Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam	PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
JRSCA	: <i>Javan Rhino Study and Conservation Area</i>		
KHDTK	: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus		
K/L	: Kementerian/Lembaga		
KK	: Kawasan Konservasi		
KKHSG	: Konservasi		

PPNPN : Pegawai Pemerintah Non
Pegawai negeri
PUPA : Pungutan Usaha
Pemanfaatan Air
RBM : *Resort Based
Management*
Renstra : Rencana Strategis
RKK : Perencanaan Kawasan
Konservasi
RPJMN : Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
SAKIP : Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
SBSN : Surat Berharga Syariah
Negara
SDM : Sumber Daya Manusia
Setditjen : Sekretariat Ditjen

SK : Surat Keputusan
SM : Suaka Margasatwa
SPKP : Sentra Penyuluhan
Kehutanan Pedesaan
SIGAP : Sistem Informasi
Geospasial
Tahura : Taman Hutan Raya
TB : Taman Buru
TN : Taman Nasional
TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar
TWA : Taman Wisata Alam
TWAL : Taman Wisata Alam Laut
UPT : Unit Pelaksana Teknis
UPTD : Unit Pelaksana Teknis
Daerah
UU : Undang-Undang
UUCK : Undang-Undang Cipta
Kerja



Pelepas liaran satwa Kukang dan anaknya di
Rhinocamp, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Sumber: Muhammad Asad

DAFTAR ISI

KONTEN

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
GLOSARIUM.....	7
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	31
1. IKP LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG TERVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.....	33
2. IKP LUAS KAWASAN YANG TERVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DI LUAR KAWASAN KONSERVASI.....	38
3. IKP JUMLAH NILAI EKSPOR PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DARI HASIL PENANGKARAN	45
4. IKP JUMLAH NILAI PNPB DARI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN TSL	53
5. IKP JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN AKSES PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF	60
6. NILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PADA 27 JUTA HA KAWASAN KONSERVASI.....	69
7. NILAI SAKIP DITJEN KSDAE.....	78

B. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	83
C. CAPAIAN KEGIATAN BERSUMBER DANA SBSN	85
D. KEGIATAN TEMATIK DITJEN KSDAE TAHUN 2022	88
1. Kebijakan Kelautan Indonesia	88
2. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	90
3. Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	91
4. Program Padat Karya	92
5. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Program PPDT)	93
6. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.....	93
7. Kegiatan Ketahanan Pangan (Food Estate)	95
E. REALISASI ANGGARAN	97
1. Realisasi Anggaran Tahun 2022	97
2. Nilai Kinerja Anggaran	102
BAB IV - PENUTUP.....	104
LAMPIRAN.....	106

GAMBAR

Gambar 1. Logo G20 Indonesia 2022 ...16	Gambar 20. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024 45
Gambar 2. Anak badak dan induknya terekam kamera trap di Blok Cinagor Taman Nasional Ujung Kulon pada 18 September 202218	Gambar 21. Nilai ekspor Pemanfaatan TSL Hasil Penangkaran Tahun 2022 46
Gambar 3. Kawasan Konservasi di Indonesia19	Gambar 22. Nilai Ekspor TSL Pemanfaatan TSL Hasil Penangkaran 2018-2022 48
Gambar 4. Taman Nasional Moyo Satonda21	Gambar 23. Komoditi sarang burung walet dari hasil budidaya rumahan. 49
Gambar 5. Struktur Organisasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem22	Gambar 24. Gaharu jenis <i>Aquilaria filaria</i> dari hasil pengambilan alam. 50
Gambar 6. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 202223	Gambar 25. Spesimen sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) 50
Gambar 7. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Jenis Kelamin23	Gambar 26. Salah satu hasil kerajinan tangan dari bahan baku sonokeling. 51
Gambar 8. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Kelas Umur24	Gambar 27. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 202253
Gambar 9. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan24	Gambar 28. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024 53
Gambar 10. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 202233	Gambar 29. Geliat wisata alam di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 54
Gambar 11. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-202433	Gambar 30. PNBPN Ditjen KSDAE Tahun 2022 Per Bulan (Miliar Rp) 55
Gambar 12. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 202238	Gambar 31. Pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Ciremai 56
Gambar 13. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-202438	Gambar 32. Nilai PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berdasarkan jenis pendapatan 2018-2022 58
Gambar 14. Peta Indikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi39	Gambar 33. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 202260
Gambar 15. Laporan dan Register Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi Tahun 202240	Gambar 34. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024 60
Gambar 16. Target dan Realisasi IKP Inventarisasi dan Verifikasi Kehati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi41	Gambar 35. Penanaman mangrove oleh kelompok nelayan Karang Sewu di zona tradisional Teluk Gilimanuk. 66
Gambar 17. Survey Kehati Tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (BBKSDA Sulawesi Selatan)43	Gambar 36. Pembuatan emping melinjo oleh KTH Makmur Sejahtera menggunakan peralatan bantuan dari Balai KSDA Bengkulu. 66
Gambar 18. Inventarisasi Kehati Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur (BBKSDA Jawa Timur)43	Gambar 37. SPKP Wana Jaya Lestari Sarongan 67
Gambar 19. Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 202245	Gambar 38. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 202269

Gambar 39. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024	69
Gambar 40. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perfungsi kawasan	70
Gambar 41. Grafik Hasil pengelompokan tingkat efektivitas pengelolaan KK hasil penilaian tahun 2022.....	71
Gambar 42. Grafik Capaian kinerja IKP terkait nilai efektivitas pengelolaan KK Tahun 2020-2022.....	72
Gambar 43. Bimtek Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK Tahun 2022	74
Gambar 44. Contoh Perubahan Tutupan Kawasan Hutan Tahura Lati Petangis Dikaitkan dengan Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK.....	76
Gambar 45. Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahura Lati Petangis Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun 2022	76
Gambar 46. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan TN Gunung Merbabu dengan pelibatan para pihak.	76
Gambar 47. Capaian kinerja tahun 2022	78
Gambar 48. Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024	78
Gambar 49. Hasil Penilaian 4 Komponen Akuntabilitas.	79
Gambar 50. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE selama 5 tahun terakhir	81
Gambar 51. Dokumentasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TN Ujung Kulon	86
Gambar 52. Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku	87
Gambar 53. Gambar Kapal Pelang BTN Bunaken.....	89
Gambar 54. Gambar Pemberian bantuan peralatan produksi bubuk kopi kepada Kelompok Tani Giat Bersama di Desa Arang Sapat Kabupaten Seluma.....	90
Gambar 55. Penanaman pengkayaan jenis klimaks Kampili di Sampok Manis Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh, TN Bukit Baka Bukit Raya.	92

Gambar 56. Capaian kegiatan pada UPT Ditjen KSDAE Dalam Mendukung Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	94
Gambar 57. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE	98
Gambar 58. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Kegiatan ..	99
Gambar 59. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja.....	100
Gambar 60. Persentase Realisasi Anggaran per Sumber Dana.....	101
Gambar 61. Nilai Kerja Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2018-2022	102

TABEL

Tabel 1. TARGET KINERJA Ditjen KSDAE BERDASARKAN RENSTRA 2020-202	27
Tabel 2. TARGET KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA Ditjen KSDAE 2022	28
Tabel 3. PERJANJIAN KINERJA (PK) Ditjen KSDAE TAHUN 2022	29
Tabel 4. Capaian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2022.....	31
Tabel 5. Luas Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati 2020-2022	34
Tabel 6. Jumlah PNPB Jasa Lingkungan menurut Jenis Pungutan Tahun 2020-2022	56
Tabel 7. PNPB Pemanfaatan TSL Berdasarkan Asal Penerimaan Tahun 2021-2022	57
Tabel 8. Capaian desa yang mendapatkan akses penngelolaan KK dan peningkatan usaha ekonomi produktif Tahun 2022	60
Tabel 9. Jumlah desa yang mendapatkan akses penngelolaan KK dan peningkatan usaha ekonomi produktif 2020-2022 ...	63
Tabel 10. Kemitraan konservasi tahun 2022 berdasarkan jenis aksesnya	63
Tabel 11. Kemitraan konservasi tahun 2022 berdasarkan fungsi kawasan.....	64

Tabel 12. Unit Kawasan Konservasi yang tidak dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya	72
Tabel 13. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan 2021 perkomponen.....	80
Tabel 14. Pagu dan Realisasi Proyek SBSN Tahun 2022	86
Tabel 15. Kegiatan pada Ditjen KSDAE yang mendukung kebijakan pencapaian target Tahun 2022	88
Tabel 16. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	91
Tabel 17. Kegiatan Ketahanan Pangan di Tiga UPT Ditjen KSDAE.....	95
Tabel 18. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE per Kegiatan.....	99
Tabel 19. Realisasi Anggaran per Sumber Dana	101

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Revisi Tahun 2022	107
Lampiran 2. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan	

nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi Tahun 2022	110
Lampiran 3. Hasil Verifikasi Luasan Indikatif Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB Tahun 2022.....	111
Lampiran 4. Rekapitulasi Devisa Pemanfaatan TSL Tahun 2022	112
Lampiran 5. Rekapitulasi Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan TSL Tahun 2022.....	114
Lampiran 6. Rekapitulasi Desa yang melakukan Kesepakatan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat 2022	117
Lampiran 7. Rekapitulasi Luas pemberian akses kemitraan konservasi Tahun 2022	131
Lampiran 8. Capaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022	136
Lampiran 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Per-satker Tahun 2022 (Sumber:Omspan)	142



Julang Sumba di Taman Nasional Manupeu
Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Sumber: Heri Andri

BAB I PENDAHULUAN

Ditjen KSDAE saat ini tengah melakukan transformasi tata kelola kawasan konservasi berbasis lanskap, ekosistem dan masyarakat. Konteks tata kelola lanskap merujuk pada pengelolaan kawasan konservasi dengan dukungan dan partisipasi aktif para pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga didapatkan manfaat baik kelestarian alam maupun kesejahteraan masyarakat.

Penguatan pengelolaan kawasan konservasi juga dilakukan dengan pola *Resort Based Management* (RBM), yakni penguatan pengelolaan tingkat tapak. RBM merupakan struktur organisasi terkecil dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk mengawasi, memanfaatkan, mengelola dan melindungi hutan konservasi. Terobosan secara menyeluruh terkait dengan optimalisasi kinerja RBM untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi yang juga merupakan unsur penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Upaya transformasi tata kelola tersebut dilaksanakan melalui target-target kinerja yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024 revisi. Revisi pada Ditjen KSDAE dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyusunan revisi Renstra Kementerian LHK dikarenakan adanya perubahan organisasi yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Perubahan peraturan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi.

Permen LHK tersebut memberikan mandat bahwa Ditjen KSDAE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Ditjen KSDAE memiliki fungsi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial. Penyelenggaraan fungsi tersebut dilakukan dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi *Group of 20* (G20). G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu



Gambar 1. Logo G20 Indonesia 2022

Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Peran serta KLHK dalam Presidensi G20 ini dilaksanakan melalui pelaksanaan target-target kerja KLHK sebagai bagian dari Pemerintah, baik

melalui program-program teknis sesuai tugas dan fungsi KLHK maupun program-program peningkatan resiliensi ekonomi khususnya pada tingkat masyarakat, seperti perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi serta pemulihan ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Pelaksanaan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di tahun 2022 juga turut mendukung Presidensi G20. Peringatan HKAN tahun 2022 yang dilaksanakan di Taman Nasional Bali Barat pada 31 Agustus - 3 September 2022, mengusung tema "Amertha Taksu Abhinaya: Memulihkan Alam untuk Masyarakat Sejahtera". Tema tersebut sejalan dengan kondisi saat ini berkaitan dengan isu global dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19. Dan diharapkan dapat mewujudkan semangat Presidensi G20 Indonesia "Recover Together, Recover Stronger" yakni memulihkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari memulihkan kesehatan bangsa, memulihkan ekonomi negeri dan memulihkan alam.

Dalam upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022, pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan *Automatic Adjustment*. *Automatic Adjustment* merupakan penyesuaian belanja negara yang dilakukan melalui penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis, dimana masing-masing K/L dapat memilah sendiri belanja yang bukan prioritas untuk dicadangkan melalui mekanisme *self blocking*.

Penerapan kebijakan *Automatic Adjustment* pada Kementerian LHK, khususnya pada Ditjen KSDAE,

mempengaruhi alokasi anggaran pada 7 kegiatan. Besaran *Automatic Adjustment* yang ditetapkan pada Ditjen KSDAE yaitu sebesar Rp 121.446.648.000 yang terbagi dalam 2 tahap, tahap I sebesar Rp 72.558.179.000,- dan tahap II sebesar Rp 48.888.469.000,- atau sebesar 6,84% dari pagu awal Rp.1.775.967.907.000,-.

Pada tahun 2022, Ditjen KSDAE juga mengalami beberapa kali revisi anggaran. Selain terkait dengan kebijakan *Automatic Adjustment*, terdapat penghapusan blokir sumber dana SBSN pada BBKSDA Riau dan BKSDA Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp 109.391.937.000,-. Revisi anggaran juga dilakukan antara lain karena adanya penambahan/ top up pagu anggaran sumber dana HLN sebesar Rp. 7.775.325.000,- dengan rincian proyek BCCPGLE sebesar Rp. 5.300.000.000,-, proyek FIP-1 sebesar Rp. 700.000.000,-, dan proyek FP III sebesar Rp. 1.775.325.000,-, serta revisi atas penyesuaian belanja pegawai untuk Satker yang minus. Sehingga, sampai dengan akhir tahun, pagu anggaran Ditjen KSDAE menjadi Rp.1.602.333.693.000,- atau menurun 9,78% dari pagu awal.

Isu strategis yang dihadapi Ditjen KSDAE pada tahun 2022, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumberdaya alam hayati yaitu UU Nomor 5 tahun 1990 disusun pada dekade sembilan puluhan dirasakan cukup efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies Indonesia. Undang-undang yang menggantikan

beberapa produk peraturan kolonial pra-kemerdekaan ini telah berumur lebih dari 30 tahun. dalam rentang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional, seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi. selain itu, telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sektoral, perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi, sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, atau hasil-hasil kesepakatan baik bilateral, regional maupun multilateral.

Proses perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 saat ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan naskah rancangan undang-undang telah disampaikan kepada Pemerintah. Dokumen ini telah ditindaklanjuti dengan penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas rancangan undang-undang tersebut. Hal-hal yang disampaikan dalam DIM tersebut antara lain bahwa saat ini cukup dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan melakukan penguatan substansi-substansi yang telah mengalami dinamika. Substansi sebagaimana dimaksud khususnya dalam konteks pengawetan keanekaragaman genetik, pengaturan pendanaan KSDAHE yang berkelanjutan, ketentuan PPNS, administrasi penyidikan, barang bukti, serta penguatan norma dan pemberatan sanksi.

Isu strategis lain yang dihadapi Ditjen KSDAE adalah berkembangnya

paradigma baru terkait kemitraan konservasi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). salah satu klausul dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa salah satu bentuk penyelesaian keterlanjuran di dalam kawasan konservasi adalah melalui skema kerja sama kemitraan konservasi. Sebelum terbitnya UUCK, kerjasama kemitraan konservasi mencakup pemberian akses pemanfaatan potensi kawasan pada zona/blok tradisional dan dalam rangka pemulihan ekosistem. Paradigma baru berdasarkan UU Cipta Kerja di atas berdampak terhadap pola kemitraan konservasi yang akan dijalankan, bahwa penyelesaian kegiatan yang merupakan keterlanjuran di dalam kawasan konservasi dapat dilakukan melalui skema kemitraan konservasi.

Pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati selalu mempunyai tantangan yang memerlukan penanganan tepat. Konflik tenurial, interaksi manusia dengan satwa liar, pengelolaan yang belum dilaksanakan berbasis lanskap, serta dukungan sarana prasarana yang belum memadai di tingkat tapak menjadi

challenge yang masih terus diupayakan untuk diperbaiki.

Pada tahun 2022, tercatat terdapat 655 kegiatan penanganan konflik satwa liar, dengan jenis satwa terbanyak yang terlibat konflik adalah gajah sumatera sebanyak 213 kejadian (32,52%), buaya muara sebanyak 112 kejadian (17,1%), dan harimau sumatera sebanyak 96 kejadian (14,66%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlah kegiatan penanganan kejadian konflik, UPT dengan urutan 3 terbanyak yaitu BKSDA Aceh sebanyak 166 kegiatan, BTN Way Kambas sebanyak 76 kegiatan, dan BKSDA Kalimantan Timur sebanyak 62 kegiatan.

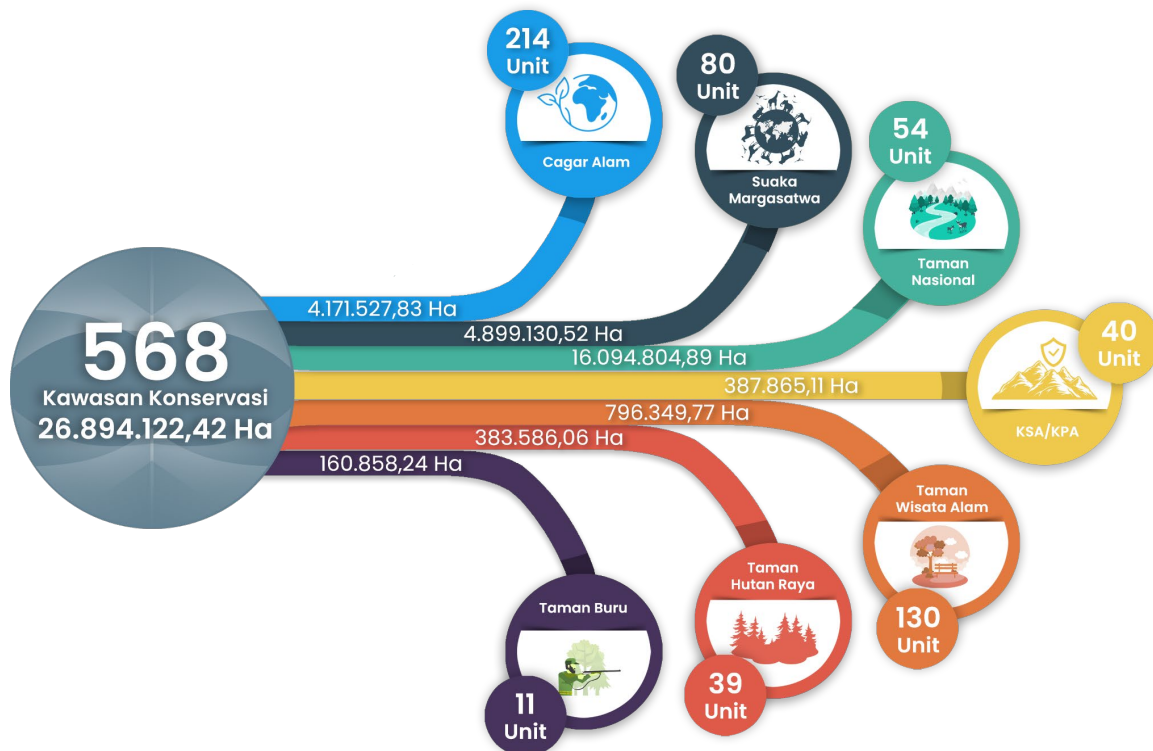
Selain upaya penanganan konflik satwa liar, pada tahun 2022 juga tercatat adanya 122.135 kelahiran satwa in situ, dengan jumlah terbanyak yaitu pada satwa penyu (penyu hijau, penyu sisik dan penyu lekang) sebanyak 119.144 ekor, maleo sebanyak 2.930 ekor, dan monyet ekor panjang sebanyak 28 ekor. Selain satwa-satwa tersebut, kelahiran 3 ekor anak badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon juga membawa kegembiraan tersendiri dan menunjukkan keberhasilan upaya konservasi satwa endemik tersebut di Indonesia.



Gambar 2. Anak badak dan induknya terekam kamera trap di Blok Cinagor Taman Nasional Ujung Kulon pada 18 September 2022
Sumber: Balai Taman Nasional Ujung Kulon

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Ditjen KSDAE memiliki mandat dalam penyelenggaraan 568 unit kawasan konservasi yang memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi seluas 26.894.122,42 hektar. Kawasan konservasi terdiri dari 6 fungsi kawasan yaitu Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN),

Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Buru (TB). Selain keenam fungsi tersebut terdapat pula kawasan-kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya atau lebih dikenal dengan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Rincian luas kawasan konservasi berdasarkan fungsi kawasan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Kawasan Konservasi di Indonesia
Sumber: Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, 2023

Data luas kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan konservasi bersifat dinamis, sehingga data setiap tahun sangat mungkin berubah. Data luasan kawasan konservasi tahun 2022 didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.99/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2022 tanggal 26 April 2022

tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Terdapat perbedaan data luasan kawasan konservasi berdasarkan hasil perhitungan Ditjen KSDAE dengan data luasan yang dirilis oleh Kementerian LHK dalam Data Statistik Kementerian LHK tahun 2022. Data luas kawasan

konservasi berdasarkan Data Statistik Kementerian LHK tahun 2022 adalah seluas 27.407.668,40 hektar. Perbedaan luasan antara tersebut disebabkan oleh:

- a. Perbedaan skala penggunaan data. Data yang dirilis Kementerian LHK merupakan data yang bersifat makro sedangkan data hasil perhitungan Ditjen KSDAE merupakan data mikro dan lebih terperinci.
- b. Sumber data yang digunakan. Data yang dirilis Kementerian LHK merupakan data yang bersumber dari dari kompilasi luas kawasan konservasi yang tercantum pada SK Provinsi. Sedangkan data hasil perhitungan Ditjen KSDAE merupakan data yang bersumber dari luas kawasan yang dicantumkan pada SK Penetapan dan penghitungan luas digital dari shapefile Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan yang dibagikan oleh Ditjen PKTL melalui Portal SIGAP.

Luas kawasan berdasarkan perhitungan Ditjen KSDAE:

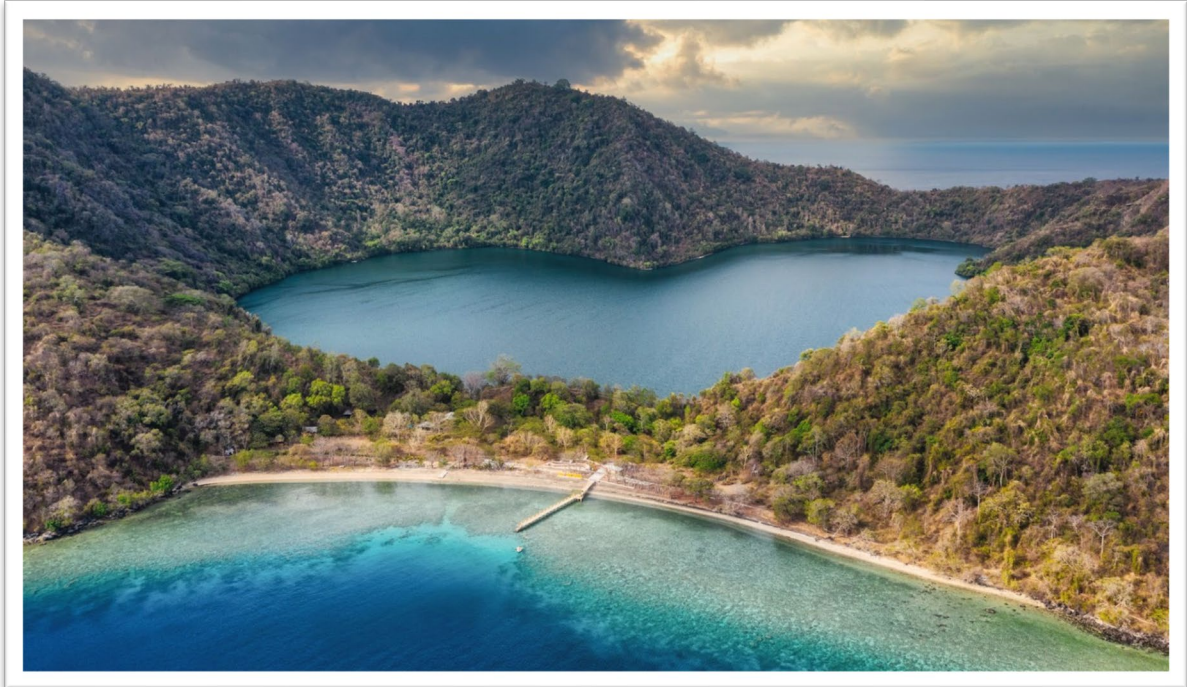
- a. Menggunakan luas kawasan dalam SK Penetapan kawasan bagi kawasan yang sudah ditetapkan;
- b. Menghitung menggunakan data digital (*shapefile*) dengan metode proyeksi *cylindrical* bagi kawasan-kawasan:
 - 1) yang belum ditetapkan;
 - 2) yang sudah ditetapkan tapi terdapat perubahan fungsi sebagian;
 - 3) yang sudah ditetapkan dalam kelompok hutan tapi belum dibagi secara parsial per fungsi kawasan

Pasca terbitnya SK.99/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2022, terdapat beberapa perubahan fungsi kawasan yang berimbas pada perubahan jumlah unit kawasan konservasi. Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. Kawasan TB Pulau Moyo (RTK 58), TWA Pulau Moyo dan TWA Pulau Satonda berubah fungsi menjadi Taman Nasional Moyo Satonda melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.901/MenLHK/Setjen/Pla.2/8/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Moyo, Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, dan Taman Wisata Alam Pulau Satonda Menjadi Taman Nasional Moyo Satonda di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas \pm 31.200,15 hektar.
2. Terdapat kawasan konservasi baru hasil perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas Gunung Baliyohuto di Gorontalo menjadi Taman Hutan Raya melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.810/MenLHK/Setjen/Pla.2/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Baliyohuto menjadi Taman Hutan Raya Seluas \pm 6.208 hektar di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3. Seluruh CA Pulau Pombo berubah fungsi menjadi TWA Pulau Pombo, melalui Keputusan Menteri LHK Nomor:

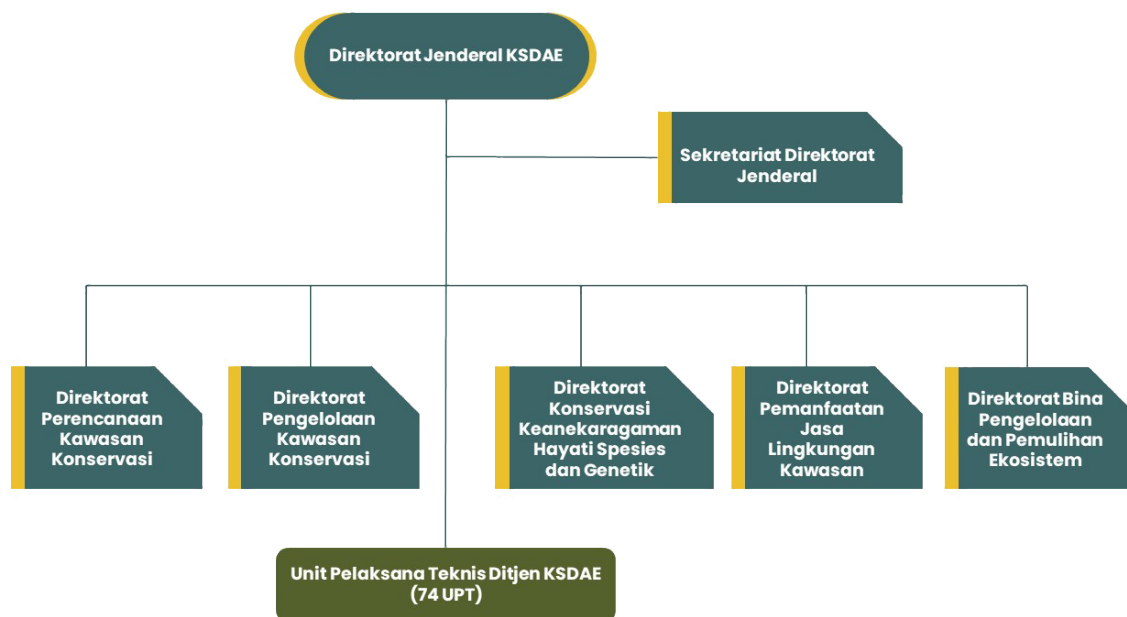
SK.998/MenLHK/Setjen/Pla.2/9/20
22 tanggal 13 September 2022
tentang Perubahan Fungsi Dalam
Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari

Cagar Alam Pualu Pombo Menjadi
Taman Wisata Alam Pualu Pombo
Seluas \pm 6,9 hektar di Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku.



Gambar 4. Taman Nasional Moyo Satonda
Sumber: Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

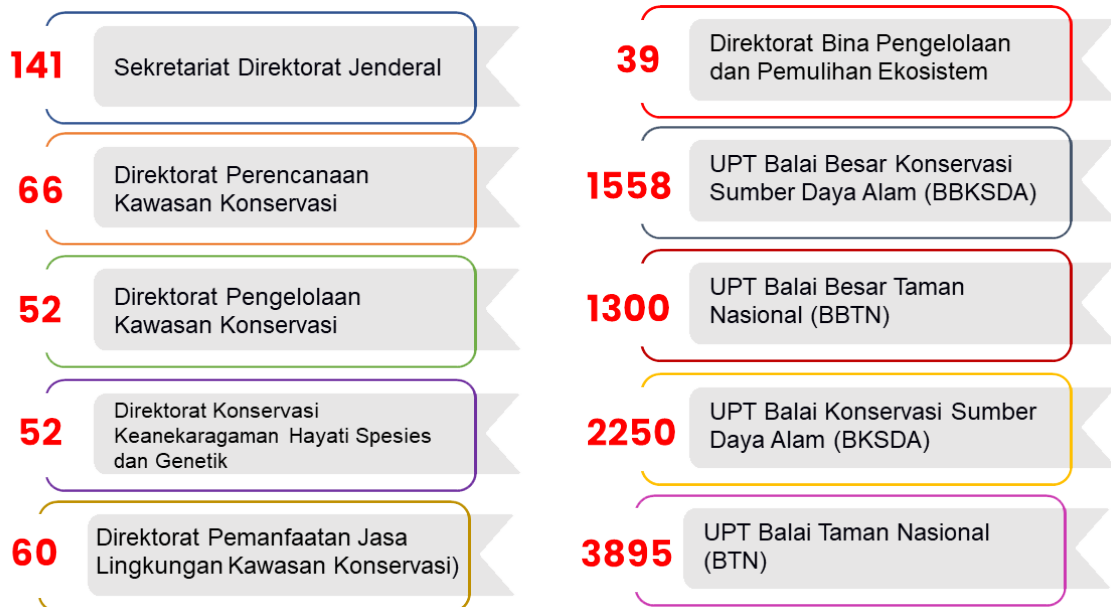
Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE memiliki 75 satuan kerja, yaitu 6 unit kerja pusat dan 74 UPT. Unit kerja pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 Direktorat, sedangkan UPT terdiri dari 16 Balai Besar (setingkat Eselon II) meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta 58 Balai (setingkat Eselon III) yang terdiri dari 18 UPT 40 UPT Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.



Gambar 5. Struktur Organisasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, personil Ditjen KSDAE berjumlah 9.413 orang pegawai. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 6.015 orang ASN dan 3.398 orang PPNPN yang tersebar di seluruh unit kerja pusat dan UPT. Terdapat penurunan jumlah pegawai ASN sebanyak 122 orang pada tahun 2022. Sebaliknya, jumlah pegawai PPNPN mengalami peningkatan sebanyak 73

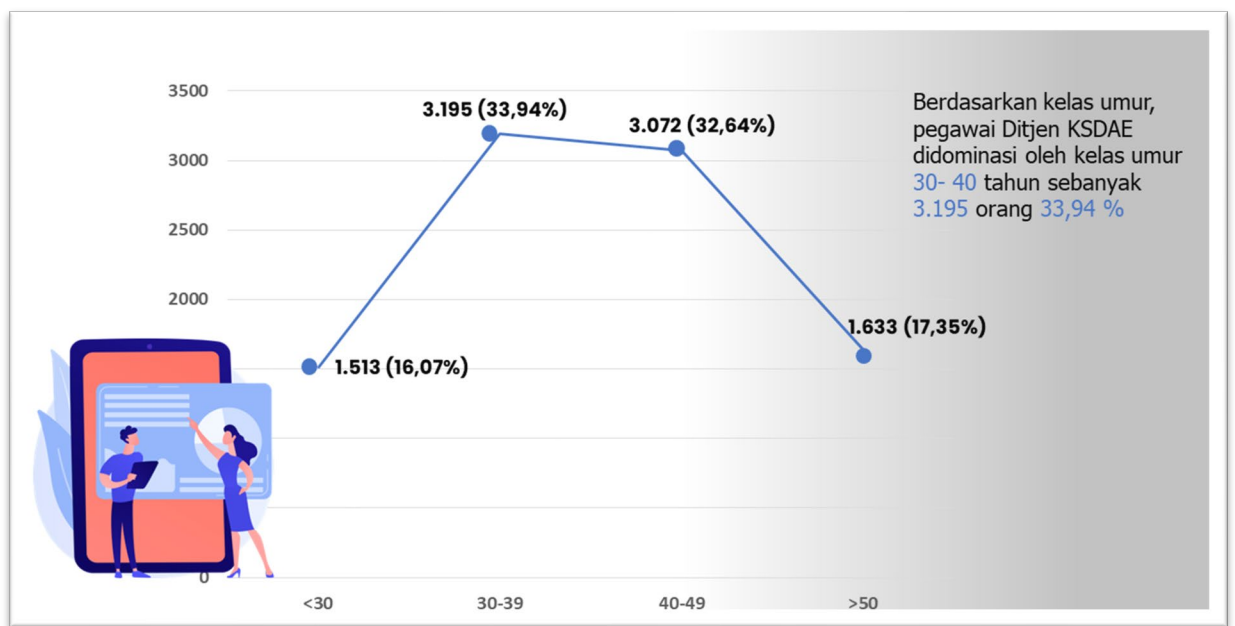
orang. Penurunan jumlah ASN terjadi karena jumlah rekrutmen tenaga CPNS tidak sebanyak jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas. Jumlah pegawai pada unit kerja pusat sebanyak 410 pegawai yang terdiri dari 309 orang ASN dan 309 orang PPNPN sedangkan pada UPT sebanyak 9.003 pegawai yang terdiri 5.706 orang ASN dan 3.297 orang PPNPN.



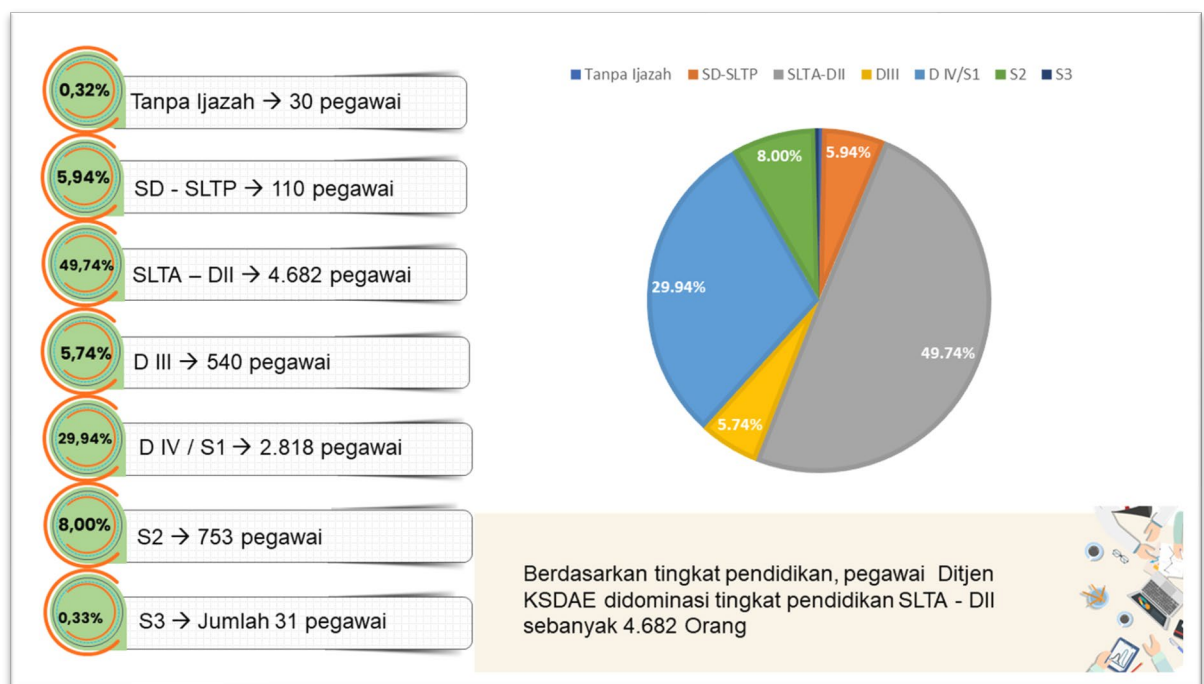
Gambar 6. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2022



Gambar 7. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 8. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Kelas Umur



Gambar 9. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat pegawai yang tidak mempunyai ijazah sehingga tidak diketahui pendidikan terakhirnya sejumlah 30 orang yang semuanya merupakan PPNPN di tingkat UPT.



View Gunung Palung dari Pulau Juante
Sumber: Endro Setiawan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, Visi Ditjen KSDAE adalah “Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Kesejahteraan Masyarakat” untuk mendukung “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Rumusan Misi Ditjen KSDAE yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Ditjen KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan

6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.
Sasaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tsl secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal

konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Tabel 1. TARGET KINERJA Ditjen KSDAE BERDASARKAN RENSTRA 2020-202

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	80 Poin
2	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	70.000.000 Hektar
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun Rupiah
4	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	1.100 Miliar Rupiah
5	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4.500 Desa
6	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	62,5 Poin
7	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Hektar



B. RENCANA KERJA DITJEN KSDAE TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 sebagai pengejawantahan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada periode tersebut. Sasaran Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 program dengan 7 sasaran program yang didukung dengan indikator kinerja program dengan target pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. TARGET KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA Ditjen KSDAE 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	78,5 Poin
2	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	13, 8 Juta Hektar
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	2,05 Triliun Rupiah
4	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	210 Miliar Rupiah
5	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	500 Desa
6	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	55 Poin
7	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10 Juta Hektar

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan adanya kebijakan Automatic Adjustment dalam rangka pencadangan untuk penanganan Covid 19, terdapat penyesuaian target kinerja Ditjen KSDAE yang dituangkan dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dan Menteri LHK.

Tabel 3. PERJANJIAN KINERJA (PK) Ditjen KSDAE TAHUN 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja awal	Target Kinerja Revisi
1	Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik di dalam dan di luar kawasan konservasi	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	11.494.300 Ha	10.410.368 Ha
2	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati spesies di luar kawasan konservasi	10.000.000 Ha	10.000.000 Ha
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	2,1 Triliun Rupiah	2,1 Triliun Rupiah
4	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	100 Milyar Rupiah	100 Milyar Rupiah
5	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	500 Desa	500 Desa
6	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	57,5 Poin	57,5 Poin
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	79 Poin	79 Poin

Keindahan *landscape* Resort Pemerihan, Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan
Sumber: Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Keberhasilan pencapaian sasaran program Ditjen KSDAE ditopang oleh 7 Indikator Kinerja Program, sehingga capaian kinerja pelaksanaan program diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja program. Pengukuran capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2022 dihitung berdasarkan capaian 7 indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2022 sebesar **106,23 %**. Keseluruhan capaian indikator kinerja program dimaksud melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE pada tahun 2022. Detail capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2022



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik di Dalam dan di Luar Kawasan Konservasi	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Hektar	10.410.368	12.203.261,61	117,22%
2	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	10,00	8,06	80,60%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2,10	1,74	83,00%
4	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	100	130,23	130,23%
5	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	500,00	612,00	122,40%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
6	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta hektar Kawasan Konservasi	Poin	57,50	63,24	109,98%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP pada Ditjen KSDAE	Poin	79,00	79,12	100,15%
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,23%

Rata-rata capaian kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Namun demikian terjadi penurunan capaian sebesar 17,83% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2021. Semua IKP pada tahun 2021 tercapai melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 2 IKP yang belum memenuhi target. kedua IKP tersebut yaitu IKP Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi dan IKP Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.

Penurunan persentase capaian IKP 2 disebabkan karena target tahun 2021

lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2022. Selain itu, adanya *Automatic Adjustment* pada tahun 2022 menyebabkan berkurangnya pagu anggaran untuk kegiatan inventarisasi dan verifikasi di UPT. Menurunnya realisasi IKP nilai ekspor pemanfaatan TSL Tahun 2022 disebabkan oleh permintaan pasar terhadap komoditi TSL berkurang karena imbas adanya pandemi Covid-19. Adanya penurunan nilai ekspor ini juga sebagai implikasi kebijakan pemindahan pengelolaan (*management authority*) oleh Pemerintah untuk jenis ikan bersirip yang sebelumnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Capaian kinerja tahun 2022 pada setiap IKP disajikan dalam uraian sebagai berikut:

1. IKP LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG TERVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



Gambar 10. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 2022



Gambar 11. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024

Salah satu strategi di dalam RPJMN 2020-2024 mengamanatkan KLHK untuk melaksanakan penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem pada 70 juta hektar kawasan hutan. Hal tersebut ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis KLHK periode 2020-2024 yang selanjutnya terejawantah sebagai IKP Ditjen KSDAE. Informasi tersebut diharapkan menjadi basis data dalam pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2022, target luasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 10.410.368 hektar. Target tahun 2022

mencakup luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas 4.482.148 hektar dan di luar kawasan konservasi seluas 5.928.220 hektar. Target tersebut berbeda dengan target tahunan dalam Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 revisi, karena target dalam dokumen PK disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi.

Pada tahun ini telah dilakukan verifikasi kawasan sebagai perlindungan hayati seluas 12.203.261,61 hektar, dengan capaian IKP tahun 2022 sebesar 117,22%. Berdasarkan luasan tersebut kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi

seluas 4.143.293,33 hektar, sisanya 8.059.968,28 hektar berada di luar kawasan konservasi. Kegiatan inventarisasi di dalam kawasan konservasi dilakukan pada 45 Unit TN seluas 2.908.862,33 hektar dan 24 UPT KSDA seluas 1.234.431 Hektar. Sedangkan inventarisasi di luar kawasan konservasi UPT KSDA yang melaksanakan sebanyak 19 UPT KSDA.

Dalam mencapai target IKP ini, Ditjen KSDAE melalui Direktorat KKHSG, Direktorat RKK dan Direktorat BPPE bersama-sama melakukan koordinasi, konsultasi, penyusunan NSPK, bimtek/supervisi/monev, analisis dan

verifikasi data laporan hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan UPT lingkup Ditjen KSDAE. Selain itu, dalam pencapaian IKP ini juga melibatkan para pihak terutama pakar, akademisi, pemerhati konservasi serta lembaga swadaya masyarakat mitra Ditjen KSDAE, sehingga hasilnya telah disepakati menjadi hasil kerja bersama, bukan hanya semata-mata hasil kerja KLHK atau Ditjen KSDAE. Dengan demikian harapannya hasil capaian IKP ini dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan suatu kebijakan bersama dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Tabel 5. Luas Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati 2020-2022

Tahun	Luasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi (Ha)		
	di dalam Kawasan Konservasi	di luar Kawasan konservasi (Ha)	Total (Ha)
2020	6.927.214,25	6.663.291,66	13.590.505,91
2021	1.723.896,39	8.932.059,60	10.655.955,99
2022	4.143.293,33	8.059.968,28	12.203.261,61
TOTAL	12.794.403,97	23.655.319,54	36.449.723,51

Sumber: Direktorat Perencanaan KK dan BPPE, 2023

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian inventarisasi dan verifikasi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati tahun 2022 mengalami peningkatan pada hasil inventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi. Kenaikan capaian luasan di dalam kawasan konservasi sebanyak 2,4 juta hektar atau 140,34% antara lain karena adanya komunikasi yang intensif dan peningkatan pendampingan teknis oleh tim teknis spasial pusat kepada UPT; adanya panduan inventarisasi dan verifikasi yang membantu penyelesaian data spasial di UPT sehingga proses analisis dan kompilasi di tingkat pusat semakin

terarah dan terintegrasi. Di sisi lain, capaian inventarisasi dan verifikasi di luar kawasan konservasi mengalami penurunan seluas 875.091,32 hektar atau 9,76% dibanding tahun sebelumnya karena kebijakan *Automatic Adjustment* pada tahun 2022. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya pagu anggaran untuk kegiatan inventarisasi dan verifikasi di tingkat tapak.

Luas hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati selama 3 tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 hasil inventarisasi dan verifikasi paling rendah apabila dibandingkan dengan hasil tahun 2020 dan 2023. Tahun 2020

merupakan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024, realisasi tinggi IKP ini karena adanya data keanekaragaman hayati tinggi berbasis pada sebaran TSL yang sumbernya dari UPT, mitra dan metadata seperti jurnal dan portal. Sebagian besar data berupa poligon sehingga cakupan capaian bisa tinggi, meskipun sebagian besar masih mengandalkan data sekunder. Tahun 2021, capaian mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Kondisi pandemi menyebabkan tidak seluruh rencana kegiatan inventarisasi di UPT dapat terlaksana.
- b. Belum adanya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terutama inventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan.
- c. Minimnya pendampingan karena kondisi global pandemi serta belum terstrukturanya langkah verifikasi dan validasi menyebabkan capaian menurun.
- d. Inventarisasi di dalam kawasan konservasi, capaian hanya berbasis data primer UPT tanpa menggunakan data sekunder dari mitra dan metadata lainnya karena sudah adanya anggaran inventarisasi dan verifikasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati tinggi terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Dalam mencapai target IKP, pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati

tinggi di UPT masih belum terstruktur.

- b. UPT belum seluruhnya melaporkan hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan.
- c. Alokasi anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang masih dinilai belum mencukupi dalam melaksanakan pengambilan data lapangan.
- d. Sejak awal periode renstra 2020 hingga triwulan kedua tahun 2022, UPT dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi belum memiliki panduan pelaksanaan.
- e. Data dan informasi hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi belum terintegrasi secara utuh dalam suatu sistem *database*.
- f. Adanya automatic adjustment pada anggaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- g. Masih terdapat gap kompetensi pada SDM pelaksana, baik untuk pengetahuan ekologi tumbuhan satwa liar maupun terkait analisis data spasial.

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Menyusun panduan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang menjadi

dasar dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi di UPT dan pusat.

- b. Pembangunan sistem pelaporan *digital e-reporting* yang terintegrasi dengan data spasial hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi.
- c. Kegiatan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang dilaporkan tidak hanya difokuskan pada hasil kegiatan yang berasal dari pengambilan data lapangan, namun juga mempertimbangkan data sekunder dengan tetap memperhatikan tingkat keterbaruan dan validitas data.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian target IKP inventarisasi dan verifikasi kawasan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati tinggi yaitu:

- a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak karena kegiatan inventarisasi ini memerlukan keterlibatan para pihak di tingkat tapak seperti

pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, maupun dunia usaha terutama

- b. Mengintensifkan koordinasi dan pendampingan ke UPT target dalam melaksanakan panduan untuk inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi
- c. Pendampingan ke UPT target untuk pengisian *e-reporting*
- d. Pemantauan *e-reporting* oleh tim Direktorat Teknis secara rutin dan berkala
- e. Pengembangan sistem aplikasi *e-reporting* untuk peningkatan kualitas dan efektifitas penggunaannya
- f. Peningkatan metode dan pengembangan verifikasi lapangan dengan metode terkini (termasuk penggunaan *drone*).
- g. Pelibatan stakeholder pada setiap tahapan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati sehingga akan membantu dan memudahkan proses pengumpulan data dan informasi di lapangan.

Simbiosis Mutualisme antara Kijang dan Burung
Sumber: Balai Taman Nasional Baluran



2. IKP LUAS KAWASAN YANG TERVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DI LUAR KAWASAN KONSERVASI



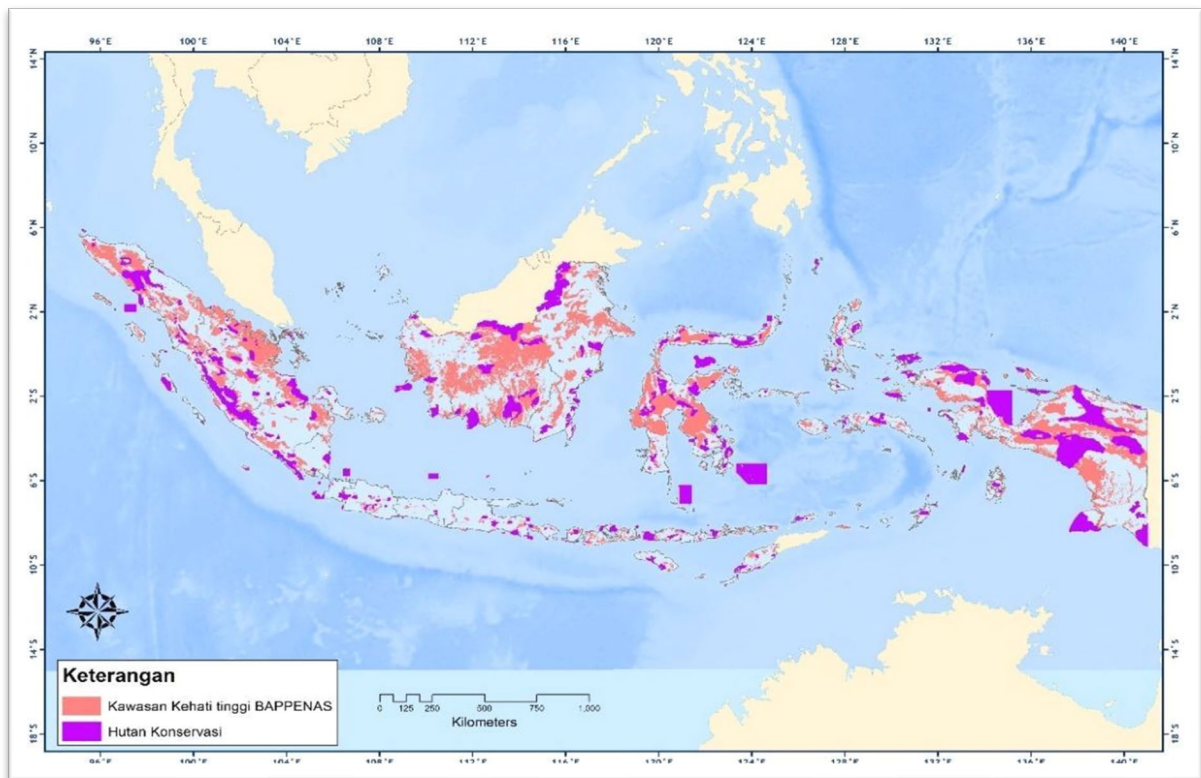
Gambar 12. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 2022



Gambar 13. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024

Pada tahun 2010 - 2011, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa organisasi non pemerintah melakukan kajian kesenjangan (*gap analysis*) keterwakilan ekologis kawasan konservasi di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, diperkirakan 80% keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, dan genetik) bernilai penting berada di luar kawasan konservasi, khususnya KSA, KPA dan TB. Di sisi lain, diduga terdapat sekitar 57 Juta hektar areal yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan

konservasi berupa kawasan hutan produksi (HP), hutan lindung (HL), dan Areal Penggunaan Lain (APL), dimana 43,2 juta hektar diantaranya ada di sebelah barat Garis Weber yang harus dipertahankan (RPJMN 2020-2024). Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan amanat Rencana Strategis KLHK dan Ditjen KSDAE 2020-2024, perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan penting bagi keanekaragaman hayati, khususnya pada areal di luar kawasan konservasi.



Gambar 14. Peta Indikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi

Sumber: Direktorat BPPE

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan penting bagi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi memiliki indikator kinerja berupa "luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi". Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi kehati di luar KSA, KPA dan TB yang terverifikasi; menunjukan area-area di luar KSA, KPA dan TB yang terindikasi memiliki kehati yang tinggi; dan memberikan arahan pengelolaan,

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, kepada para pengelola di tingkat tapak. Adapun output dari kegiatan ini adalah laporan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi yang disertai dengan peta masing-masing lokasi target yang telah diverifikasi. Pada peta lokasi target tersebut, disusun register kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Register ini memuat setiap area yang terverifikasi beserta keterangan detail kehati di dalamnya.

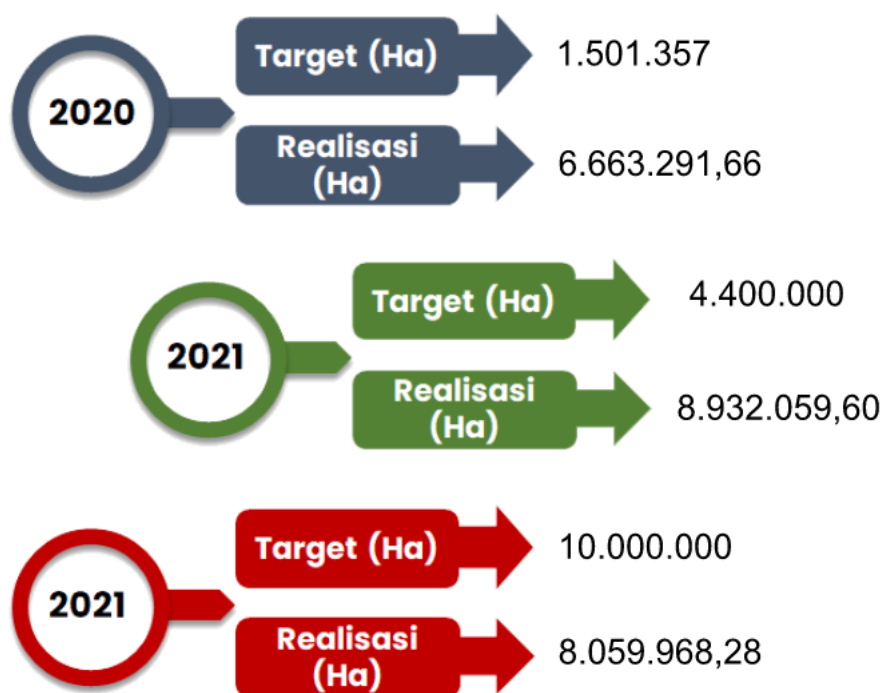


Gambar 15. Laporan dan Register Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ke 3 pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024. Tahun 2022 target IKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE adalah seluas 10 juta hektar. Sampai dengan 31 Desember 2022, telah terverifikasi 8.059.968,28 hektar areal di luar kawasan konservasi atau 80,60% dari target yang direncanakan. Hasil analisa menunjukan sekitar 3 juta hektar diantaranya terverifikasi ke dalam kategori keanekaragaman hayati tinggi. Realisasi kinerja tahun 2022 lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi tahun

2021. Hal ini disebabkan karena adanya *Automatic Adjustment* pada tahun 2022 sehingga menyebabkan berkurangnya pagu anggaran untuk kegiatan inventarisasi dan verifikasi di UPT.

Pada periode 2020-2022, secara kumulatif indikator kinerja ini telah terealisasi seluas 23.655.320 hektar atau 55,02 % dari target Renstra 2020-2024 seluas 43.000.000 hektar. Dari luas kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi di luar KK, sebanyak 56% atau 13,5 juta hektar merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi.



Gambar 16. Target dan Realisasi IKP Inventarisasi dan Verifikasi Kehati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi.

Sumber: Direktorat BPPE

Target luas areal yang diinventarisasi dan diverifikasi dalam PK tahun 2020 adalah 1.501.357 hektar dengan capaian seluas 6.663.292 hektar atau 443,82%. Tahun 2021, indikator kinerja luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi memiliki target dalam PK seluas 4.400.000 hektar dan terealisasi seluas 8.932.060 hektar atau 203,001%. Dilihat dari persentase capaian kinerja IKP ini, tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena target dalam PK tahun 2020 dan 2022 lebih kecil daripada target PK tahun 2022, meskipun secara luasan hasil inventarisasi dan verifikasi dibandingkan tahun 2020 lebih besar tahun 2022.

Berdasarkan analisis, beberapa hal diketahui menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pertama, target inventarisasi kehati tinggi di luar kawasan konservasi yang sangat luas namun tidak diimbangi dengan pendanaan yang mencukupi di tingkat tapak. Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2020-2022, rerata anggaran di tingkat tapak berkisar Rp. 488,29,- per hektar. Selanjutnya, adanya kebijakan nasional terkait pengurangan pagu anggaran inventarisasi dan verifikasi kehati atau *Automatic Adjustment*, hal ini cukup berperan pada rendahnya capaian kinerja. Selain itu, masih terdapat gap kompetensi pada SDM pelaksana, baik untuk pengetahuan ekologi tumbuhan satwa liar maupun terkait analisis data spasial. Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi dengan para pihak masih perlu ditingkatkan karena

kegiatan inventarisasi ini memerlukan keterlibatan para pihak di tingkat tapak seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, maupun dunia usaha.

Beberapa hal telah dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja IKP ini, di tingkat pusat, Ditjen KSDAE telah menerbitkan 3 petunjuk teknis yaitu:

- a. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 8/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);
- b. Pedoman Penentuan Areal Kajian, Penyiapan serta Teknik Analisis Data dan Informasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB; dan
- c. Prosedur Operasional Standar Registrasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB.

Selain penerbitan 3 petunjuk teknis diatas, Ditjen KSDAE tahun 2022 juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan verifikasi inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Pada kegiatan ini tim pelaksana, dalam hal ini Balai Besar/Balai KSDA diberikan pengetahuan untuk pelaksanaan kegiatan, diantaranya teknik analisis satwa liar tertentu serta analisis spasial. Pengetahuan teknis ini disampaikan oleh akademisi, dan praktisi konservasi

keanekaragaman hayati. Selain itu, dalam kegiatan bimbingan teknis para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan *best practice* pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya masing-masing

Di tingkat UPT, tantangan berupa kurangnya anggaran dan minimnya data dapat diatasi melalui pemanfaatan data sekunder sebagai data awal (*baseline*). Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai pihak, salah satunya dari repositori karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi/hasil penelitian) pada perpustakaan perguruan tinggi di lokasi terkait. Selain itu, UPT Ditjen KSDAE juga diharapkan dapat membangun relasi, komunikasi, pemahaman, antar aktor dan otoritas termasuk dalam hal berbagi data dan informasi serta membentuk forum diskusi. Pengalaman dan *best practice* pelaksanaan kegiatan di tingkat UPT Ditjen KSDAE diantaranya dari Balai KSDA Kalimantan Timur dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Kedua UPT Ditjen KSDAE menyampaikan pentingnya membangun relasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun dunia usaha. Hal ini penting untuk memberikan dan mendapatkan pemahaman yang sama tentang kegiatan inventarisasi kehati ini. Selain itu, pada setiap tahapan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati sebaiknya selalu melibatkan para pemangku kepentingan tersebut. Pelibatan ini akan membantu dan memudahkan proses pengumpulan data dan informasi di lapangan.



Gambar 17. Survey Kehati Tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (BBKSDA Sulawesi Selatan)



Gambar 18. Inventarisasi Kehati Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur (BBKSDA Jawa Timur)

Adanya kegiatan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi memberikan dampak sebagai berikut:

- a. Mulai terinisiasinya integrasi data dan informasi keanekaragaman hayati tinggi di luar KK baik

internal KSDAE, KLHK maupun para pihak (Pemda, NGO dan swasta);

- b. Tumbuhnya kesadaran bersama terutama para pihak (pemda dan swasta pemilik lahan) terhadap pelestarian kehati di luar KK.



Induk orangutan dan anaknya di Taman
Nasional Tanjung Puting
Sumber: Balai Taman Nasional Tanjung Puting

3. IKP JUMLAH NILAI EKSPOR PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DARI HASIL PENANGKARAN



Gambar 19. Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 2022



Gambar 20. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024

Capaian nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar dari hasil penangkaran tahun 2022 sebesar **Rp. 1.743.418.485.011** atau Rp. 1,7 Triliun atau sekitar 83% dari target yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar 2,1 T. Nilai ekspor TSL merupakan nilai seluruh spesimen TSL yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan luar negeri. Penghitungan nilai ekspor dilakukan dengan 3 metode sebagai berikut:

- Rekapitulasi nilai Data Perdagangan (Data Penyerahan) dan Data Transaksi Ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor

yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi *Free on Board* (FOB) dan atau *Cost and Freight* (CFR);

- Rekapitulasi nilai data perdagangan pada *Invoice* yang dilaporkan oleh perusahaan (eksportir);
- Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis spesimen dimaksud. Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk rekapitulasi dokumen PEB maupun rekapitulasi *invoice*.



Gambar 21. Nilai ekspor Pemanfaatan TSL Hasil Penangkaran Tahun 2022
Sumber: Direktorat KKHSG 2023

Berdasarkan jenis taksa, tumbuhan merupakan penghasil nilai ekspor terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar 64,05%. Di dalam taksa tumbuhan tersebut, terdapat 2 komoditi perdagangan yaitu sonokeling dan anggrek. Pada tahun 2016 sonokeling masuk dalam appendix CITES (*Appendix II*) menyebabkan ekspor sonokeling harus sesuai dengan ketentuan CITES. Regulasi nasional dalam pengaturan ekspor TSL harus melalui mekanisme perizinan, sehingga ekspor sonokeling menjadi penyumbang devisa pemanfaatan TSL. Nilai ekspor sonokeling mencapai Rp. 1.105.326.122.500,- atau 63,40% dibandingkan total nilai ekspor TSL hasil pemanfaatan tahun 2022. Tingginya harga spesimen sonokeling dan permintaan pasar berkorelasi positif terhadap tingginya nilai ekspor yang dihasilkan. Pada tahun 2022, sebanyak

44.213 m³ sonokeling yang telah diekspor. Pada faktanya, situasi di lapangan menunjukkan bahwa jenis sonokeling yang dibudidayakan hanya yang berasal dari Perum Perhutani, sedangkan spesies yang berasal dari kebun rakyat secara teknis tidak benar-benar dibudidayakan, namun merupakan hasil pemanenan dari tegakan yang telah ada sejak dahulu.

Kegiatan ekspor TSL dari hasil penangkaran tidak lepas dari adanya peran penangkar TSL dan eksportir TSL. Sampai dengan bulan Desember 2022, jumlah unit penangkar Indonesia tercatat sejumlah 1.348 unit yang terdiri atas unit penangkar perorangan maupun badan hukum/ badan usaha yang tersebar di wilayah kerja seluruh BBKSDA/ BKSDA. Tahun 2022, semua kegiatan perizinan berusaha peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar baik dalam negeri maupun luar negeri

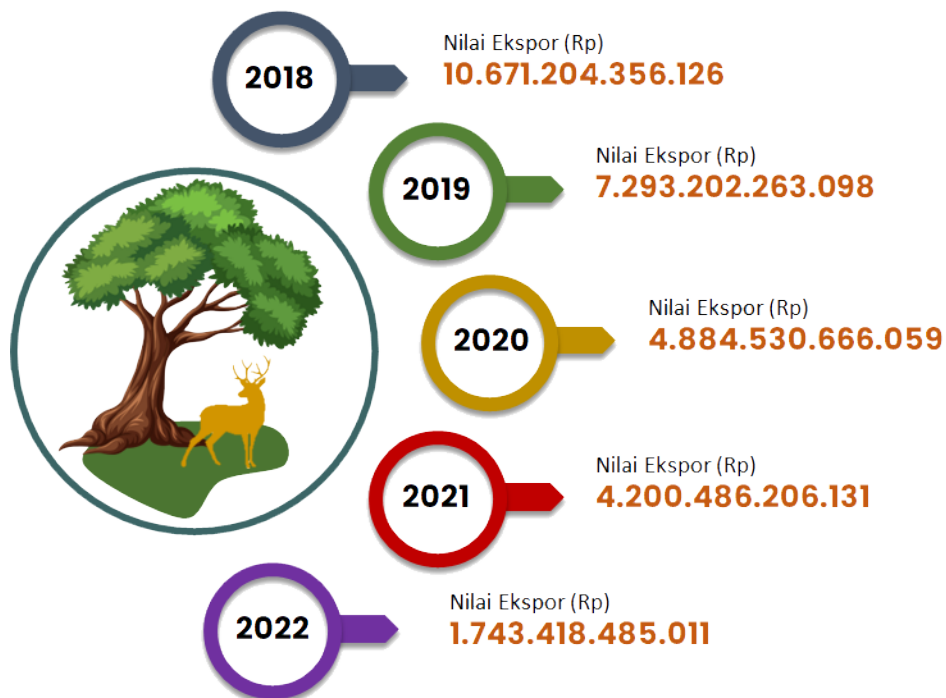
dilakukan melalui mekanisme *One Single Submission* (OSS). Sebanyak 214 Sertifikat standar telah diterbitkan yang terdiri dari 121 Sertifikat Standar (SS) untuk Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri dan 93 Sertifikat Standar (SS) untuk Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri.

Dibandingkan nilai ekspor hasil penangkaran tahun 2021, nilai ekspor tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan tersebut sebesar Rp.2.457.067.721.120,- atau 58,59% dibandingkan dengan perolehan nilai ekspor TSL hasil penangkaran tahun 2021 sebesar Rp. 4.200.486.206.131,-. Beberapa hal yang menyebabkan adanya penurunan nilai ekspor yaitu:

- a. Kondisi pasar internasional belum pulih seperti sebelum pandemi Covid 19, sehingga permintaan pasar terhadap komoditi TSL berkurang dibandingkan sebelum pandemi Covid 19 bahkan di beberapa negara tujuan ekspor masih menutup keran impor komoditi TSL;
- b. Adanya kebijakan pemindahan pengelolaan (*management authority*) oleh Pemerintah untuk jenis ikan bersirip yang sebelumnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diantaranya

ikan arwana, ikan sapu zebra, dan ikan hias hasil budidaya lainnya. Pemindahan kewenangan pengelolaan ikan bersirip dari KLHK ke KKP sesuai dengan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.2/3/2021 dan Nomor 02/MEN-KP/KB/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengaturan Koordinasi Otoritas Pengelolaan (*Management authority*) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna dan Flora (CITES)* Di Indonesia.

Capaian kinerja IKP ini selama tiga tahun masa periode Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 mengalami penurunan. Tahun 2022 merupakan nilai terendah apabila dibandingkan nilai ekspor selama 5 tahun terakhir. Namun demikian, berdasarkan target renstra tersebut, jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 10,5 Triliun. Target ini telah tercapai yaitu hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu sebesar 10,82 Triliun atau 103,04%. Data nilai ekspor hasil penangkaran selama 5 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:



Gambar 22. Nilai Ekspor TSL Pemanfaatan TSL Hasil Penangkaran 2018-2022
Sumber: Direktorat KKHS, 2023

Penurunan nilai ekspor TSL dari hasil penangkaran ini salah satunya disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda beberapa negara tujuan ekspor, sehingga permintaan TSL dari negara pengimpor relatif berkurang dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi Covid-19. Nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar dari hasil penangkaran tahun cenderung mengalami penurunan dalam kurun 3 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Selain itu, efek pandemi Covid-19 membuat beberapa negara tujuan ekspor mengalami ancaman resesi ekonomi, hal ini berdampak pada daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap TSL menjadi relatif berkurang.

Ditjen KSDAE telah menyusun beberapa langkah sebagai solusi untuk meningkatkan nilai ekspor di masa yang

akan datang terutama bagi penangkar dan pengedar TSL yang berperan dalam menghasilkan ekspor mengatasi kendala ini, antara lain:

- Memberikan kesempatan kepada para unit penangkar untuk mengajukan permohonan perolehan induk penangkaran atau penambahan induk penangkaran sebagai darah baru (*fresh blood*) yang berasal dari penangkaran lain, misalnya UPT KSDA baik dari penyerahan masyarakat, titipan, sitaan, rampasan, juga yang berasal dari alam, sehingga kualitas dan kuantitas anakan hasil penangkaran dapat meningkat;
- Mengajak masyarakat yang telah melakukan penangkaran TSL namun belum memiliki izin untuk berproses mengajukan izin penangkaran;

- c. Memberikan kesempatan bagi para penangkar untuk melakukan studi banding ke penangkar lain yang telah berhasil dan memberikan pelatihan penangkaran TSL dari para pakar;
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan penangkaran serta memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi lebih intensif sehingga masyarakat yg mengajukan izin penangkaran dapat berproses lebih lancar.

Nilai ekspor KLHK dari hasil hutan, TSL dan *Bioprospecting* tahun 2022 mencapai 14,32 Milyar USD atau sekitar 214,8 Triliun rupiah (1 USD = Rp.15.000,-). Ditjen KSDAE merupakan salah satu penyumbang realisasi nilai ekspor tersebut dari pemanfaatan TSL baik hasil penangkaran maupun penangkapan dari alam. Nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil alam dan penangkaran tahun 2022 mencapai Rp. 10.881,736.936.011, - atau menyumbang sebanyak 19,74% nilai ekspor KLHK tahun 2022.



Gambar 23. Komoditi sarang burung walet dari hasil budidaya rumahan.
Sumber: Direktorat KKHSG



Gambar 24. Gaharu jenis *Aquilaria filaria* dari hasil pengambilan alam.
Sumber: Direktorat KKHSG



Gambar 25. Spesimen sonokeling (*Dalbergia latifolia*).
Sumber: Direktorat KKHSG



Gambar 26. Salah satu hasil kerajinan tangan dari bahan baku sonokeling.
Sumber: Direktorat KKHS

Camping di Gunung Rinjani

Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani



4. IKP JUMLAH NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN TSL



Gambar 27. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 2022



Gambar 28. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Ditjen KSDAE merupakan salah satu lembaga pemerintah yang turut menyumbang PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya pada kawasan konservasi dapat dilakukan dengan harus memperhatikan kelestarian dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Besaran

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL diatur dalam regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri. Pemanfaatan TSL selain penyumbang nilai ekspor pemanfaatan TSL juga menyumbang PNBP Ditjen KSDAE.



Gambar 29. Geliat wisata alam di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Sumber: Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan diperoleh dari 7 jenis penerimaan yaitu Masuk Objek Wisata Alam (MOWA), Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), Pungutan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUSPWA), Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA), Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA), Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dan Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA). Sedangkan jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan TSL merupakan rekapitulasi PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan TSL dalam negeri, dengan detail komponen sebagai berikut:

a. Iuran perizinan pemanfaatan TSL

- b. Pungutan pengambilan/penangkapan TSL dari habitat alam
- c. Pungutan perdagangan spesimen TSL (alam dan penangkaran)
- d. Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS-LN)
- e. Denda administrasi pelanggaran peredaran TSL

Pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL tahun 2022 menghasilkan PNBP sebesar Rp. 130.229.127.19,- yang dihasilkan dari pemanfaatan jasa lingkungan sebesar Rp. 102.361.793,810,- yang diperoleh dari 7 jenis penerimaan, sedangkan pemanfaatan TSL sebesar Rp. 27.370.150.233,- yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri.

JAN	5,580
FEB	6,109
MAR	8,313
APR	7,392
MEI	12,260
JUNI	11,265
JULI	14,167
AUG	16,225
SEP	12,408
OKT	10,975
NOV	9,523
DES	16,008



Gambar 30. PNBPN Ditjen KSDAE Tahun 2022 Per Bulan (Miliar Rp)
Sumber: OMSPAN, 2023

Besaran PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan jenis penerimaan dijabarkan sebagai berikut: pungutan MOWA sebesar Rp.95.054.015.000,- (92,86%); PHUPSWA sebesar Rp. 129.029.898,- (0,13%); PHUPJWA sebesar Rp. 13.400.000,- (0,01%); PUPA sebesar Rp. 439.167.428,- (0,43%); PUPEA sebesar Rp. 242.381.484,- (0,24 %); IUPSWA sebesar Rp. 6.483.300.000,- (6,33%); dan IUPJWA sebesar Rp 500.000,- (0,0004%).

PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp. 57.967.010.312,- atau 130,57% apabila dibandingkan dengan PNBPN jasa lingkungan tahun 2021 sebesar Rp.44.394.783.498,-. Tahun 2022, PNBPN yang berasal dari MOWA merupakan penyumbang terbesar PNBPN

jasa lingkungan yang mencapai Rp. 95.054.015.000,-. Seiring penurunan kasus Covid-19 dan mulai dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, sehingga kegiatan wisata alam mulai menggeliat kembali. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun 2021. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek wisata alam tahun 2022 mencapai 5.277.072 orang yang terbagi dalam wisatawan domestik sebanyak 5.087.658 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 189.414 orang. Dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun 2021 sebanyak 2.942.670 orang, maka tahun 2022 kenaikan pengunjung mencapai 79,33% atau sebanyak 2.334.042 orang.

Tabel 6. Jumlah PNBP Jasa Lingkungan menurut Jenis Pungutan Tahun 2020-2022

No	Jenis PNBP	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pungutan masuk obyek wisata alam (MOWA)	45.639.124.250	34.219.489.000	95.054.015.000
2	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan saran wisata alam	662.537.097	132.731.145	129.029.898
3	Pungutan hasil usaha pemanfaatan jasa wisata alam	-	12.600.000	13.400.000
4	Pungutan usaha pemanfaatan air	187.291.066	419.563.353	439.167.428
5	Pungutan usaha pemanfaatan energi air	-	-	242.381.484
6	Iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam	7.319.500.000	9.607.400.000	6.483.300.000
7	Iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam	-	3.000.000	500.000
	Jumlah	53.808.452.413	44.394.783.498	102.361.793.810

Berbagai kegiatan atau usaha yang dilakukan Ditjen KSDAE dalam rangka meningkatkan PNBP jasa lingkungan terutama untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata baik langsung ataupun tidak

langsung, diantaranya yaitu pengadaan/ pembangunan sarana dan prasarana wisata alam; promosi wisata alam; mengikuti pameran baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten; serta pembuatan desain tapak.



Gambar 31. Pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Ciremai
Sumber: Direktorat PJLKK

Berbeda dengan PNPB pemanfaatan jasa yang mengalami kenaikan yang signifikan, PNPB pemanfaatan TSL mengalami penurunan sebesar 11,40% atau Rp.3.521.115.522,- apabila dibandingkan dengan PNPB tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar terhadap komoditi TSL berkurang, bahkan di beberapa negara tujuan ekspor masih menutupi keran impor komoditi TSL; pemindahan kewenangan pengelolaan ikan bersirip

dari KLHK ke KKP sesuai dengan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.2/3/2021 dan Nomor 02/MEN-KP/KB/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengaturan Koordinasi Otoritas Pengelolaan (*Management authority*) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna dan Flora (CITES)* Di Indonesia.

Tabel 7. PNPB Pemanfaatan TSL Berdasarkan Asal Penerimaan Tahun 2021-2022

No	Asal Penerimaan	2021	2022
		Jumlah PNPB (Rp)	Jumlah PNPB (Rp)
1	Pemanfaatan TSL Luar Negeri	21.761.249.424	15.946.502.541
2	Pemanfaatan TSL Dalam Negeri	9.130.016.349	11.423.507.692
	JUMLAH	30.891.265.773	27.370.010.233

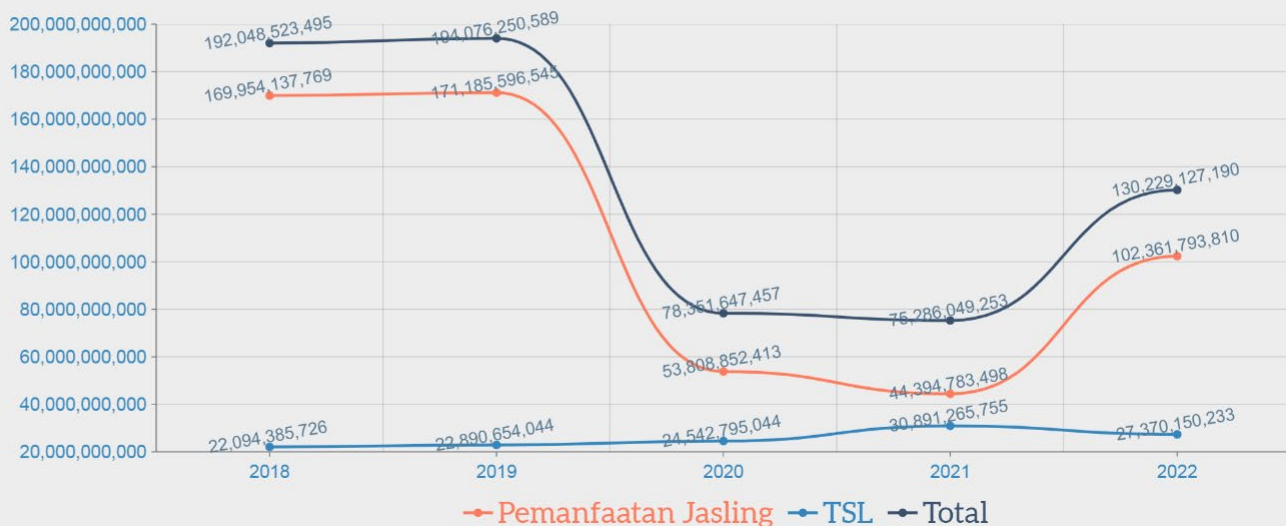
Sumber: Direktorat KKHSG, 2023

Pemanfaatan TSL disamping dapat menghasilkan PNPB, tetapi harus juga memperhatikan kelestariannya yaitu harus memperhatikan kelangsungan potensi dan daya dukung. Oleh karena itu dalam pemanfaatan TSL terutama dari alam, perlu dilakukan penetapan jumlah dan jenis TSL yang dapat diambil atau ditangkap dari alam. Tahun 2022, penetapan kuota

pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistem Nomor SK. 2/KSDAE/KKH/ KSA.2/1/2022 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun 2022.

NILAI PNBP JASA LINGKUNGAN DAN TSL

BERDASARKAN PENDAPATAN 2018-2022



Gambar 32. Nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berdasarkan jenis pendapatan 2018-2022

Sumber: Dit PJLKK dan Dit KKHSG, 2023

Capaian PNBP TSL selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 - 2022 cenderung bervariasi, dengan PNBP terbesar pada tahun 2021. Besarnya PNBP TSL pada tahun 2021 disebabkan oleh peningkatan jumlah pemegang perizinan usaha pemanfaatan TSL (pengedar dalam negeri, pengedar luar negeri, dan penangkaran), sehingga terdapat kenaikan signifikan pada akun 425255. Selain iuran izin pemanfaatan TSL, kenaikan PNBP juga berasal dari kenaikan jumlah pungutan usaha pemanfaatan TSL. Baik dari alam maupun penangkaran yang terdiri dari pungutan penangkaran yang terdiri dari pungutan penangkaran/ pengambilan spesimen TSL dari habitat alam,

pungutan perdagangan spesimen TSL (hasil penangkaran dan hasil alam ke luar negeri, pungutan spesimen untuk penelitian, pungutan blanko SATS-DN dan blanko SATS-LN).

PNBP Ditjen KSDAE tahun 2022 merupakan penyumbang PNBP Fungsional KLHK, meskipun nilainya masih kecil. Apabila dibandingkan dengan PNBP Fungsional KLHK tahun 2022 sebesar 6,38 Triliun, maka PNBP Ditjen KSDAE hanya menyumbang 2,04% dari PNBP KLHK. PNBP sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara.

Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan TWA
Telogo Warno, BKSDA Jawa Tengah
Sumber: Tri Winarni



5. IKP JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN AKSES PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF



Gambar 33. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 2022



Gambar 34. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024

Tahun 2022, Ditjen KSDAE memberikan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif kepada 612 desa. Jumlah ini dicapai melalui program kesepakatan konservasi antara

UPT lingkup Ditjen KSDAE dengan 541 desa sekitar kawasan konservasi desa serta pemberian akses pemanfaatan tradisional di kawasan konservasi pada 71 desa. Rincian capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian desa yang mendapatkan akses penngelolaan KK dan peningkatan usaha ekonomi produktif Tahun 2022

Kegiatan	Jumlah UPT	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kabupaten	Jumlah Provinsi
Kesepakatan konservasi	74	541	336	167	29
Pemberian akses pengelolaan kawasan	22	71	48	32	17

Sumber: Direktorat PKK, 2023

Pemberian akses pengelolaan kawasan dan peningkatan usaha ekonomi yang dilakukan Ditjen KSDAE tidak lain merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mendukung kelestarian kawasan. Upaya untuk mewujudkan pemberdayaan pada masyarakat sekitar kawasan konservasi berbagai kegiatan dilakukan oleh Ditjen KSDAE baik UPT maupun Pusat.

Kegiatan yang dilakukan oleh pusat antara lain: penyusunan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, apresiasi terhadap kepedulian masyarakat kepada kawasan konservasi, serta supervisi dan verifikasi kemitraan konservasi. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada UPT pada level tapak diantaranya adalah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, pendampingan kelompok, fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas, pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kawasan, pemberian bantuan untuk mengembangkan usaha ekonomi kelompok masyarakat.

Pada tahun 2022, tercatat anggaran sebesar Rp. 37.209.408.000,- yang digunakan pemberian bantuan kepada masyarakat melalui akun 526 di seluruh UPT Ditjen KSDAE. Anggaran tersebut, sampai dengan akhir desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 34.698.056.793,-. Besarnya alokasi anggaran pada program ini menunjukkan

implementasi nyata kepedulian dan dukungan kongkrit Ditjen terhadap masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi dilakukan tidak hanya pada desa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Lebih jauh, sasaran kegiatan ini juga diarahkan pada desa yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan konservasi namun masyarakatnya memiliki interaksi dengan kawasan tersebut. *Verifier* yang digunakan dalam pencapaian target tersebut kesepakatan konservasi antara UPT sebagai pengelola kawasan dengan pemerintah desa. Beberapa hal yang harus termuat dalam kesepakatan konservasi ini, yaitu:

- a. Pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan kawasan konservasi;
- b. Dukungan pemerintah desa dalam upaya pelestarian kawasan konservasi;
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi, utamanya dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif desa binaan.

Manfaat adanya kesepakatan konservasi yaitu :

- a. Membangun tanggung jawab moral para pihak dalam rangka mendorong kelestarian kawasan konservasi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya koordinasi yang baik antara pengelola kawasan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.
- b. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terkait konservasi alam.

- c. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh pengelola kawasan bersama mitra.

Sebanyak 541 kesepakatan konservasi telah ditandatangani oleh Kepala UPT dengan Kepala Desa sepanjang Tahun 2022. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebanyak 500 desa. Capaian tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan tahun 2021. Peningkatan ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, antara lain: koordinasi yang baik serta dukungan pemerintah daerah khususnya pada tingkat desa; lebih terbukanya skema pemberian akses bagi masyarakat oleh UPT; pendampingan dan komunikasi intensif antara UPT dengan masyarakat disekitar wilayah kelolanya; serta peran mitra UPT selaku pengelola kawasan (LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, swasta, dan proyek-proyek kerja sama).

Pada prosesnya, terdapat revisi dalam perhitungan capaian IKP khususnya program kesepakatan konservasi tahun 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2020: terdapat kelebihan capaian 6 desa yang terdiri dari: 4

kesepakatan konservasi yang tidak jadi ditandatangani oleh Kepala Desa pada Desa Asantola (binaan Balai KSDA Aceh), Desa Margomulyo, Desa Sebokor, dan Desa Sinar Baru (binaan Balai KSDA Sumatera Selatan). Hal ini karena belum adanya kesepahaman antara kedua belah pihak sehingga perlu intervensi komunikasi lebih lanjut; 1 kesepakatan konservasi dengan Desa Nenas (binaan BBKSDA NTT) dilaporkan baru dapat ditandatangani pada tahun 2021; 1 kesepakatan konservasi akibat kelebihan input data pada capaian kesepakatan konservasi BBKSDA Papua;

- b. Tahun 2021: terdapat satu kesepakatan konservasi yang berlebih karena kesepakatan konservasi pada Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung dilaporkan oleh 2 UPT yang berbeda yaitu BTN Way Kambas dan BKSDA Bengkulu, oleh karena itu capaian ini seharusnya dihitung satu kali.

Dengan adanya revisi tersebut, capaian IKP Jumlah desa yang mendapatkan akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan KK dan peningkatan usaha ekonomi produktif 2020-2022

Kegiatan	Jumlah Desa (semula)			Jumlah Desa (Revisi)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kesepakatan konservasi	521	468	541	515	469	541
Pemberian akses pengelolaan kawasan	67	130	71	67	130	71
Total	588	598	612	582	599	612

Sumber: Direktorat PKK, 2023

Capaian IKP ini, selain dari 541 desa yang telah menandatangani kesepakatan konservasi, disumbang juga dari pemberian akses pengelolaan kawasan melalui kemitraan konservasi pada 71 desa dengan luasan sebesar 70.750,36 hektar. Pemberian akses pengelolaan diukur dari ketercapaian kemitraan konservasi antara Kepala UPT dengan kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi pada zona atau blok tradisional.

Dari 71 Kemitraan konservasi Tahun 2022 dilaksanakan di 22 UPT Ditjen KSDAE. terdapat setidaknya 4 jenis akses pemanfaatan yang diberikan

kepada kelompok masyarakat, yaitu: pemungutan HHBK, budidaya tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan, dan perburuan tradisional. Secara kumulatif capaian kemitraan konservasi 2020-2022 mencapai 181.973,19 hektar. Pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan Konservasi melalui kemitraan konservasi yang dicapai sampai dengan tahun 2022 berada pada 234 desa, 135 kecamatan, 70 kabupaten, 26 provinsi, dan sekitar 51 Kawasan Konservasi pada 40 UPT dengan melibatkan 297 kelompok masyarakat dan 8.655 kepala keluarga.

Tabel 10. Kemitraan konservasi tahun 2022 berdasarkan jenis aksesnya

Jenis Akses	Jumlah UPT (UPT)	Jumlah Desa (Desa)	Jumlah Kecamatan (Kec)	Jumlah kabupaten (Kab)	Jumlah Provinsi (Prov)	Mitra (Kelompok)	Anggota (Orang)	Luas (Ha)
Budidaya Tradisional	3	3	3	3	3	3	64	93,64
HHBK	10	27	18	13	9	44	1.171	8.173,64
HHBK, Budidaya Tradisional	3	6	6	3	3	6	156	187,71
Perairan	10	35	21	15	7	41	819	62.295,37
Total	22	71	48	32	17	94	2.210	70.750,36

Sumber: Direktorat PKK, 2023

Tabel 11. Kemitraan konservasi tahun 2022 berdasarkan fungsi kawasan

Fungsi KK	Jumlah UPT (UPT)	Jumlah Desa (Desa)	Mitra (Kelompok)	Anggota (Orang)	Luas (Ha)
Tahura	1	3	17	506	658,84
TN	18	58	66	1509	32.555,30
TWA	3	8	9	156	36.036,22
TWAL	1	2	2	39	1.500,00
Total	22	71	94	2210	70.750,36

Sumber: Direktorat PKK, 2023

Berdasarkan data pelayanan terhadap permohonan persetujuan pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional di tahun 2022, tercatat terdapat 148 permohonan kerja sama di zona/blok tradisional, seluas 91.187,90 hektar. berdasarkan luasan ini, 77,6% atau seluas 70,750,36 hektar telah selesai hingga penandatanganan PKS. Sebagian lainnya dalam proses penandatanganan kesepakatan PKS seluas 700,90 hektar, open area tradisional seluas 1.333,88 hektar, tahap penelaahan seluas 18.297,01 hektar, serta tidak disetujui seluas 105,75 hektar.

Permohonan kerja sama yang tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal KSDAE adalah sebagaimana data di atas diusulkan oleh Yayasan Masyarakat Bahari Teluk Bone Lestari. Areal yang lokasinya berada di TWAL Kepulauan Padamarang, BKSDA Sulawesi Tenggara tersebut diusulkan melalui permohonan akses pemanfaatan ikan, lobster dan biota laut lainnya, serta budidaya lobster. Pertimbangan untuk menolak permohonan kerja sama tersebut dengan alasan bahwa mitra bukanlah merupakan kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi. pengusul merupakan yayasan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia berupa

penangkaran ikan dan koral, perdagangan besar hasil perikanan, serta aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya.

Keberhasilan pencapaian IKP Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tersedianya dukungan manajemen dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping di lapangan dalam bentuk dukungan anggaran, sarpras, pelatihan teknis untuk pendampingan dan pengakuan serta penghargaan terhadap kinerja pendamping.
- Perencanaan secara terintegrasi dengan kegiatan desa/mitra lainnya, untuk membantu pelaksanaan pendampingan dan implementasi kegiatan kelompok masyarakat di lapangan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian target IKP sesuai dengan Target pada Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024, yaitu:

- memberikan supervisi terkait rencana pemberdayaan masyarakat;
- melakukan sosialisasi, bimtek, supervisi, dan monitoring terhadap proses pengusulan

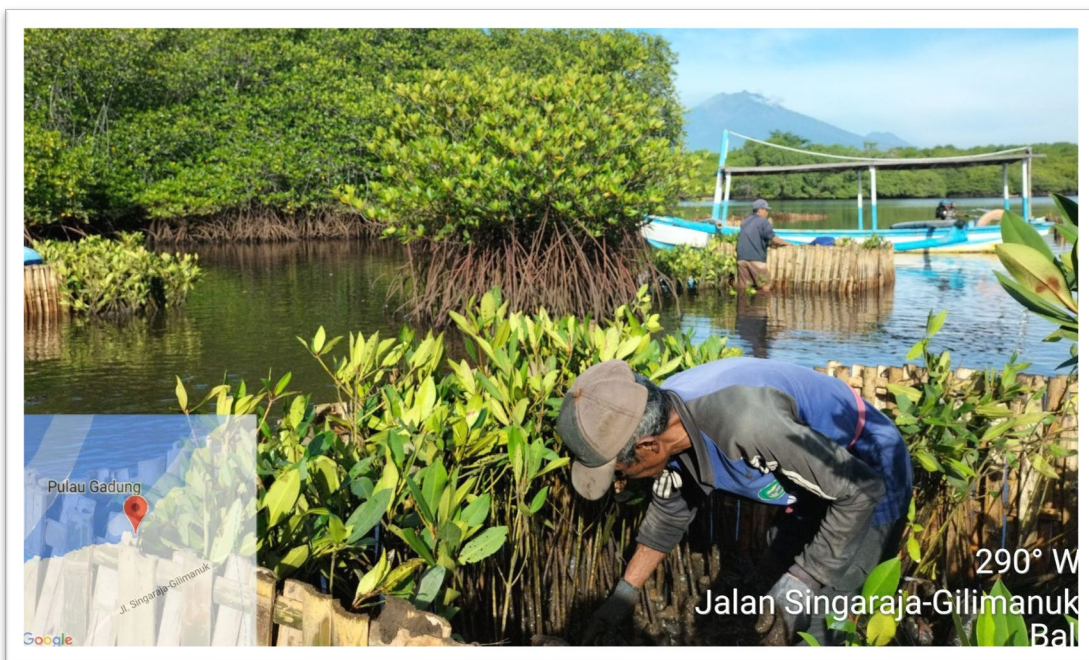
- kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional dan pendampingan desa binaan;
- c. melakukan tinjauan ulang PermenLHK Nomor P.43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Melakukan tinjauan ulang terhadap Rancangan PermenLHK tentang Kemitraan Konservasi (sebagai upaya penanganan keterlanjuran di dalam kawasan konservasi).
 - e. Menyusun arahan terhadap proses kerja sama pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional.
 - f. Pendampingan intensif oleh UPT terhadap target pemberdayaan masyarakat sekitar KK;
 - g. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar KK;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait;
 - i. Melakukan proses verifikasi lebih ketat dengan penekanan pada aspek kelestarian potensi kawasan, berupa tambahan informasi data potensi, tata cara pemanfaatan dan penetapan jumlah potensi kawasan yang boleh diambil, yang dituangkan dalam dokumen

RPP/RKT sebagai kelengkapan dokumen PKS.

- j. Melakukan koordinasi dengan direktorat teknis terkait, Ditjen lingkup KLHK, dan kementerian/lembaga lainnya.
- k. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring terhadap proses pengusulan kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional.

Kegiatan pemberian akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu terhadap kawasan konservasi dan masyarakat, secara rinci manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat terhadap kawasan konservasi bahwa kelompok masyarakat yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya perairan terlibat langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengawetan potensi keanekaragaman hayati serta melindungi ekosistem tempat mereka mencari penghidupan;
2. Manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat bahwa terdapat upaya peningkatan pendapatan anggota kelompok masyarakat melalui kegiatan pendampingan dan bantuan usaha ekonomi produktif.



Gambar 35. Penanaman mangrove oleh kelompok nelayan Karang Sewu di zona tradisional Teluk Gilimanuk.
Sumber: BTN Bali Barat



Gambar 36. Pembuatan emping melinjo oleh KTH Makmur Sejahtera menggunakan peralatan bantuan dari Balai KSDA Bengkulu.
Sumber: Amelia



Gambar 37. SPKP Wana Jaya Lestari Sarongan

SPKP Wana Jaya Lestari merupakan kelompok masyarakat binaan Balai TN Meru Betiri yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 2019 di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kelompok masyarakat ini berada pada wilayah penyangga Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Anggota kelompok ini didominasi oleh mantan pelaku *illegal logger* yang pada akhirnya proaktif melakukan upaya konservasi dan penyuluhan di sekitar Taman Nasional Meru Betiri.

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, SPKP Wana Jaya Lestari telah menjalankan berbagai kegiatan usaha seperti budidaya ayam buras, budidaya ikan air tawar (lele dan gurami), pembuatan kripik tempe dan lele skala rumahan, dan budidaya magot. Hal yang menjadi daya tarik dari usaha budidaya magot adalah konsep usaha dengan prinsip "Zero Waste". Kotoran ayam dan limbah pertanian dari usaha ayam buras dijadikan media pakan magot. Sisa pakan magot yang ada dijadikan kelompok sebagai pupuk pertanian. Sementara magotnya sendiri dijadikan sebagai pakan ayam dan lele. Hal ini membuat kelompok SPKP mampu menekan biaya produksi terutama dari pakan ayam dan lele. Di sisi lain, magot dapat dijual dengan nilai ekonomi tinggi, bahkan sisa pakan magot dalam bentuk pupuk juga bisa menghasilkan uang sebagai pendapatan tambahan kelompok.

Kegiatan usaha kelompok di atas tidak lepas dari pendampingan dan dukungan Balai TNMB dan Pemerintah Desa Sarongan. Selain dalam bentuk pendampingan rutin, SPKP Wana Jaya Lestari ini telah menerima bantuan sejumlah Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Pengembangan usaha kelompok ini memberikan efek yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya. Melalui budidaya ayam buras kelompok SPKP Wana Jaya Lestari mendapatkan penghasilan sejumlah Rp. 11.230.000 per tahun. Budidaya lele menghasilkan Rp. 36.000.000 per tahun. Usaha pengolahan kripik tempe/lele menghasilkan pendapatan Rp. 24.000.000 per tahun. Sedangkan Budidaya magot menghasilkan pendapatan terbesar yaitu Rp. 72.000.000 per tahun.

SPKP Wana Jaya Lestari melalui usaha-usaha yang dilakukannya selain mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi anggota kelompoknya juga memberikan dampak yang cukup baik untuk lingkungan sekitarnya dengan menggunakan usaha budidaya dengan prinsip zero waste. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendukung SPKP Wana Jaya Lestari memperoleh Pemenang I Apresiasi Desa Binaan Konservasi dalam Hari Konservasi Alam Nasional.



Kegiatan patroli pengamanan kawasan hutan
melintasi Dusun Alu, Taman Nasional Wasur

Sumber: Balai Taman Nasional Wasur

6. NILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PADA 27 JUTA HA KAWASAN KONSERVASI



Gambar 38. Capaian Kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja 2022



Gambar 39. Capaian Kinerja tahun 2020-2022 terhadap target Renstra 2020-2024

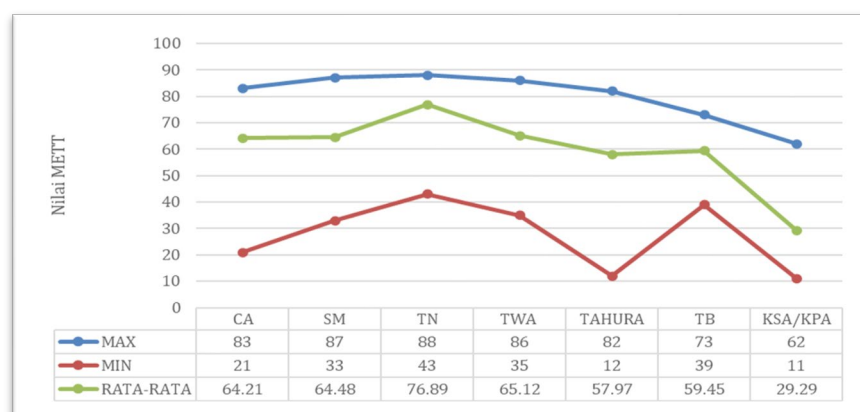
Pentingnya keberadaan kawasan konservasi sebagai benteng perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus mendukung kehidupan manusia, mendorong pemerintah untuk terus bertekad memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan kualitas tersebut perlu dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan metode yang tepat sehingga dapat diukur sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan.

Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, berarti telah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam kawasan sehingga sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan tersebut. Pada prosesnya, penilaian efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi dilakukan menggunakan metode dan perangkat yang sama, yaitu *Management Effectiveness Tracking Tool* (MEET). Penggunaan *tools* ini telah diatur melalui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 (revisi) pada tahun 2022, kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ditargetkan pada 277 unit kawasan konservasi atau separuh dari jumlah kawasan konservasi di Indonesia (yang digunakan sebagai baseline adalah 554 unit KK). Berdasarkan perkembangan saat ini, jumlah kawasan konservasi di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 568 unit. Meskipun terdapat perbedaan jumlah unit kawasan konservasi, akan tetapi target dalam IKP ini masih tetap sama yaitu sebesar 57,50 poin pada tahun 2022 sesuai dengan dokumen Renstra KLHK, Renstra Ditjen KSDAE, maupun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Hingga akhir tahun 2022 hasil verifikasi mencatat sebanyak 280 unit kawasan telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan. Jumlah ini berasal dari 76 UPT/UPTD, yang terdiri dari: 26 UPT TN, 26 UPT KSDA, dan 24 UPTD TAHURA. Angka ini lebih besar dibandingkan target awal sejumlah 277 unit kawasan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa unit pengelola kawasan yang melakukan penilaian di luar lokasi target. Dengan demikian terdapat pembaharuan data nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Sebagai Indikator Kinerja Program (IKP), efektivitas pengelolaan KK diukur dari hasil penilaian yang dihitung dari baseline seluruh kawasan konservasi (568 unit) sampai dengan tahun 2022. Sampai akhir tahun 2022, rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi mencapai 63,24 poin atau lebih besar 5,74 poin dibandingkan target yang ditetapkan dalam PK Ditjen KSDAE, yaitu 57,5 poin. oleh karenanya, capaian kinerja IKP pada Tahun 2022 mencapai 109.98%. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 40. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berfungsi kawasan
Sumber: Direktorat PKK, 2023

Berdasarkan fungsinya, Rerata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan status taman nasional memiliki nilai tertinggi, yaitu 76,89 poin. Hal ini dinilai cukup wajar, mengingat kawasan dengan fungsi taman nasional dikelola langsung oleh satu manajemen pengelolaan (UPT TN), sehingga seluruh dukungan manajemen yang dimiliki digunakan untuk mengelola satu kawasan tersebut. sebaliknya, nilai efektivitas terendah terdapat pada kawasan dengan fungsi KSA/KPA (29,29 poin). Secara umum hal

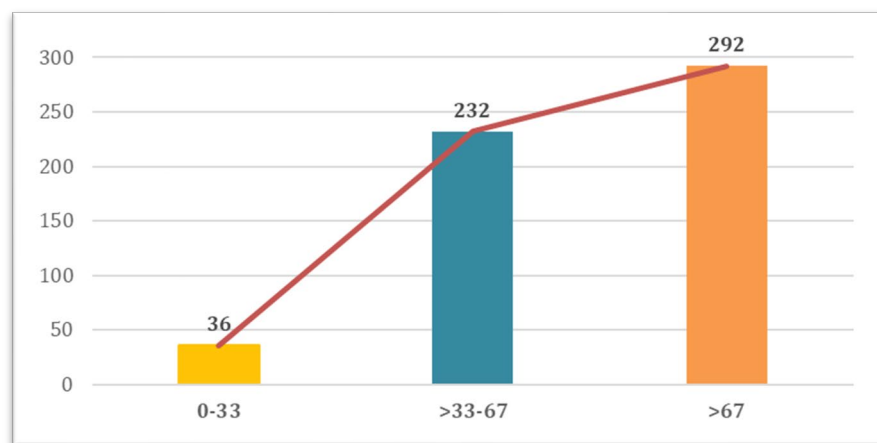
ini karena sebagian besar kawasan dengan kategori ini yang belum memiliki arahan fungsi yang jelas, sehingga pengelolaannya belum terfokus dan efektif sesuai dengan tujuannya.

Menurut tingkat efektivitasnya, hasil penilaian terakhir seluruh kawasan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori berdasarkan Leverington et al.(2010) dalam bukunya *Management Effectiveness Evaluation in Protected Area-a global study*, yaitu:

- < 33 poin : Pengelolaan kawasan tidak memadai (tidak efektif)
- 33 - 67 poin : Pengelolaan kawasan kurang memadai (kurang efektif)
- > 67 poin : Pengelolaan kawasan cukup baik (efektif)

Dari hasil pengelompokan tersebut, didapatkan hasil bahwa sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia berada pada posisi efektif

(292 unit KK) dan mayoritas kawasan tersebut arahan fungsinya sebagai taman nasional dan taman wisata alam.



Gambar 41. Grafik Hasil pengelompokan tingkat efektivitas pengelolaan KK hasil penilaian tahun 2022

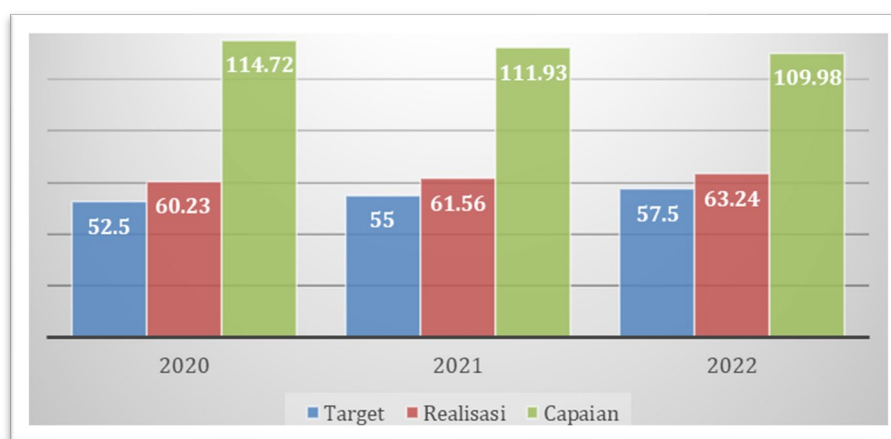
Sumber: Direktorat PKK, 2023

Sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2024, target capaian peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meningkat 2,5 poin

setiap tahun, Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, capaian rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan

konservasi pada 560 unit KK selalu meningkat dan melebihi target yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2020 dari target nilai efektivitas 52,2 poin tercapai 60,23 poin dengan capaian kinerja 114,72%, dan tahun 2021 target nilai

efektivitas 55 poin tercapai 61,56 poin (capaian kinerja 111,93%). Progres capaian kinerja IKP terkait nilai efektivitas pengelolaan KK tahun 2020-2022 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut.



Gambar 42. Grafik Capaian kinerja IKP terkait nilai efektivitas pengelolaan KK Tahun 2020-2022.
Sumber: Direktorat PKK, 2023

Tahun 2022, hanya 7 dari 560 unit kawasan yang tidak dapat dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Rincian ketujuh kawasan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12. Unit Kawasan Konservasi yang tidak dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya

NO	NAMA UPT	NAMA KAWASAN	KETERANGAN
1	BBKSDA Jawa Barat	CA Malabar	Kawasan tidak ada
2	BBKSDA NTT	KSA/KPA Sisimeni Sanam	SK Perubahan Fungsi sebagai Hutan Lindung masih dalam proses
3	BBKSDA Sulawesi Selatan	KSA/KPA Sopeng	Proses penetapan fungsi menjadi Tahura
		KSA/KPA Toraja Utara	
		KSA/KPA Calon Tahura Mesawa	
4	BBKSDA Papua Barat	KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuan Wowi	Proses EKF, status KHDTK (hutan Pendidikan)
		SM Waigeo	KK baru

Sumber: Direktorat PKK, 2023

Walaupun secara umum nilai efektivitas pengelolaan KK menunjukkan tren meningkat, namun terdapat beberapa kawasan yang mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya. Adanya penurunan nilai efektivitas pengelolaan

kawasan dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Tidak terlaksananya kegiatan pengelolaan kawasan yang direncanakan, baik karena anggaran pengelolaan yang berkurang akibat *Automatic*

Adjustment, jumlah dan kapasitas SDM di lapangan yang terbatas;

- b. Keterbatasan data dukung yang dapat disediakan pengelola pada saat melakukan penilaian sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan verifikasi penilaian serta faktor teknis/administrasi lainnya.

Langkah-langkah perbaikan atau upaya yang dilakukan Ditjen KSDAE agar target renstra Ditjen KSDAE dapat tercapai secara paripurna sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian IKP dan meningkatkan peran para pihak dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah diterbitkan SK Direktur Pengelolaan KK Nomor SK.11/PKK/PPKK/KSA.1/7/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Serta Penguatan Implementasi Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tugas Tim kerja ini adalah:

- 1) Melakukan pemantauan implementasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;

- 2) Memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses dan hasil penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;

- 3) Memberikan dukungan terhadap proses peningkatan kapasitas, verifikasi hasil penilaian dan penyusunan laporan;

- 4) Menyiapkan penguatan metode penilaian yang lebih efektif dan efisien.

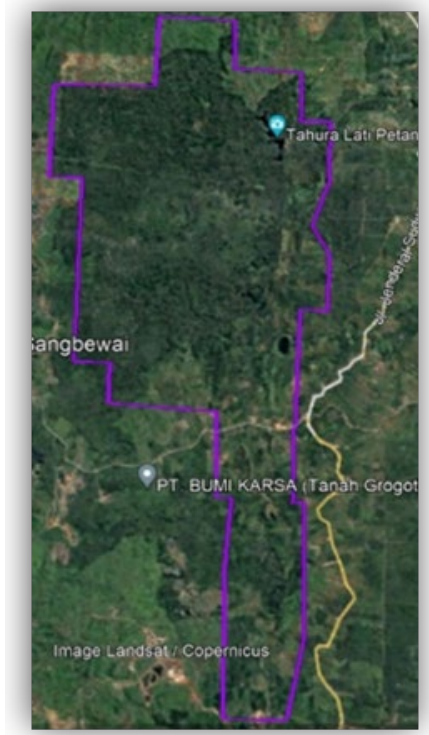
- b. Bimbingan teknis fasilitator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diikuti seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE dan perwakilan UPTD Tahura. Kegiatan ini merupakan bagian strategi mengisi kesenjangan jumlah fasilitator yang tersedia, dibanding dengan jumlah kawasan yang dinilai setiap tahunnya. Bimtek fasilitator dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan teknik fasilitasi dan pemahaman yang lebih baik terkait penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan metode METT serta merancang upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi;



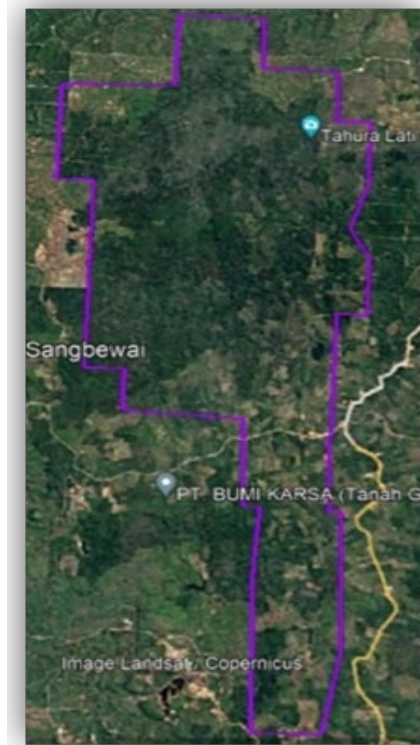
Gambar 43. Bimtek Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK Tahun 2022

- c. Menerbitkan SK Direktur Pengelolaan KK Nomor SK.15/PKK/PPKK/KSA.1/9/2022 tentang Penetapan Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, dalam SK tersebut, disampaikan tugas Fasilitator yaitu:
 - 1) Memandu persiapan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 2) Memandu proses pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3) Memandu pendokumentasian proses penilaian dan penyusunan laporan hasil efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
- d. Melakukan bimbingan teknis, koordinasi, supervisi dan verifikasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;
- f. Melakukan evaluasi kemajuan kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dan merangkum butir-butir pembelajaran (*best practices*) proses penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi yang diukur dengan menggunakan perangkat METT sampai dengan tahun 2021, termasuk *gap analysis* penilaian: alat ukur, indikator atau kriteria untuk meningkatkan kualitas penilaian;
- g. Pengenalan METT 4 sebagai alat penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

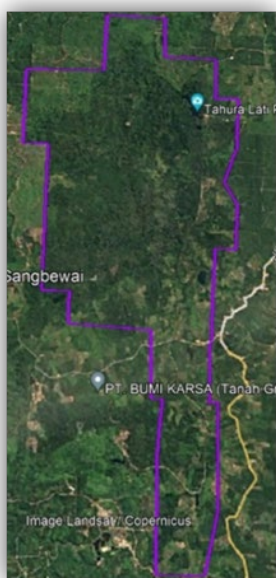
Tahun 2013
(Penunjukan Kawasan Tahura)



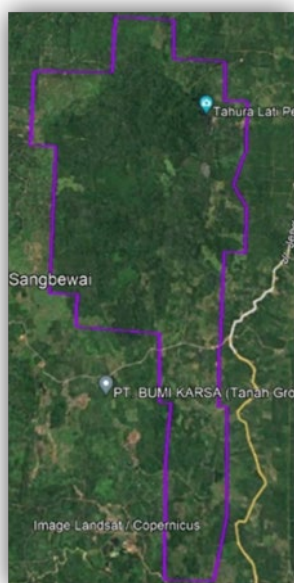
Tahun 2015
(Penetapan Kawasan Tahura)



Tahun 2017
(Penilaian METT 53%)



Tahun 2019
(Penilaian METT 70%)



Tahun 2022
(Penilaian METT 81%)



Gambar 44. Contoh Perubahan Tutupan Kawasan Hutan Tahura Lati Petangis Dikaitkan dengan Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK



Gambar 45. Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahura Lati Petangis Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun 2022



Gambar 46. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan TN Gunung Merbabu dengan pelibatan para pihak.
Sumber: BTN Gunung Merbabu.



Pantai Mondulambi Taman Nasional Manupeu Tanah
Daru dan Laiwangi Wanggameti

Sumber: Dwi Putro

7. NILAI SAKIP DITJEN KSDAE



Gambar 47. Capaian kinerja tahun 2022



Gambar 48. Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) dilaksanakan untuk memperoleh informasi implementasi AKIP, menilai akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi AKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Berdasarkan aturan evaluasi AKIP terbaru yang dilakukan penilaian terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi internal sedangkan tahun 2021 yang dinilai sejumlah 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi.

Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Ditjen KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja dengan mengambil sampel sebanyak 4 unit kerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan laporan hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal KLHK Nomor SP.86/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 Ditjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu 79,12 dengan nilai BB (sangat baik).

Dengan hasil nilai SAKIP sebesar 79,12 poin, maka capaian kinerja IKP ini sebesar 100,15% dari target nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 79 poin



Gambar 49. Hasil Penilaian 4 Komponen Akuntabilitas.
Sumber: Setditjen KSDAE, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan, beberapa kelemahan pada SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2022 yaitu:

- Target yang ditetapkan pada IKK 1, IKK 3, dan IKK 4 pada Direktorat PJLKK, memiliki nilai target yang sama mulai tahun 2020 - 2024 sehingga tidak bersifat *continuous improvement* dan tidak menantang;
- Laporan kinerja pada Direktorat PJLKK baru dipublikasikan tanggal 31 Maret 2022, sehingga diperlukan penetapan tata waktu terkait publikasi dokumen Perencanaan dan Pelaporan pada website Direktorat PJLKK: <https://jasling.menlhk.go.id;>
- Terdapat perbedaan nilai target kinerja tahun 2021 pada 4 IKP dari 7 IKP yang tercantum dalam PK dan pencapaian kinerja LKj dengan Renstra dan Renja (pada Ditjen KSDAE);

- Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Menindaklanjuti kelemahan tersebut diatas, rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal KLHK untuk tindak lanjut perbaikan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas metode *verified* untuk mengukur capaian IKK yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing IKK dan capaiannya;
- Menyusun SOP terkait tata waktu publikasi Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja melalui Website Direktorat PJLKK;
- Lebih cermat dalam menetapkan nilai target kinerja tahunan dalam Perjanjian Kinerja (PK) agar selaras dengan Renja dan Renstra Ditjen KSDAE;

4. Dalam pengukuran capaian kinerja agar dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ataupun dibuat oleh pihak lain.

Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2021, karena masih adanya kelemahan pada SAKIP Ditjen KSDAE sebagaimana telah disampaikan diatas. Terdapat beberapa perbedaan dalam evaluasi SAKIP tahun 2022 dan 2021, evaluasi AKIP tahun 2022 menggunakan dasar Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat 4 komponen akuntabilitas yang diukur yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sedangkan tahun 2021, evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen yang diukur dalam Evaluasi AKIP tahun 2021 terdiri atas 5 komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi. Tahun 2022, evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE selain dilakukan pada entitas unit kerja eselon 1 sebagai nilai instansi, juga dilakukan pada unit kerja eselon II yang menjadi sampel yaitu Direktorat Perencanaan KK, Direktorat Pengelolaan KK, Direktorat PJLKK sebagai unit utama, serta Setditjen KSDAE sebagai unit pendukung. Tahun 2021, penilaian SAKIP dilakukan pada entitas unit kerja eselon 1 dan seluruh unit kerja eselon II pusat. Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2021 dan 2021 dengan nilai SAKIP tahun 2021 dikonversi dalam 4 komponen tersaji sebagai berikut:
Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan 2021 perkomponen

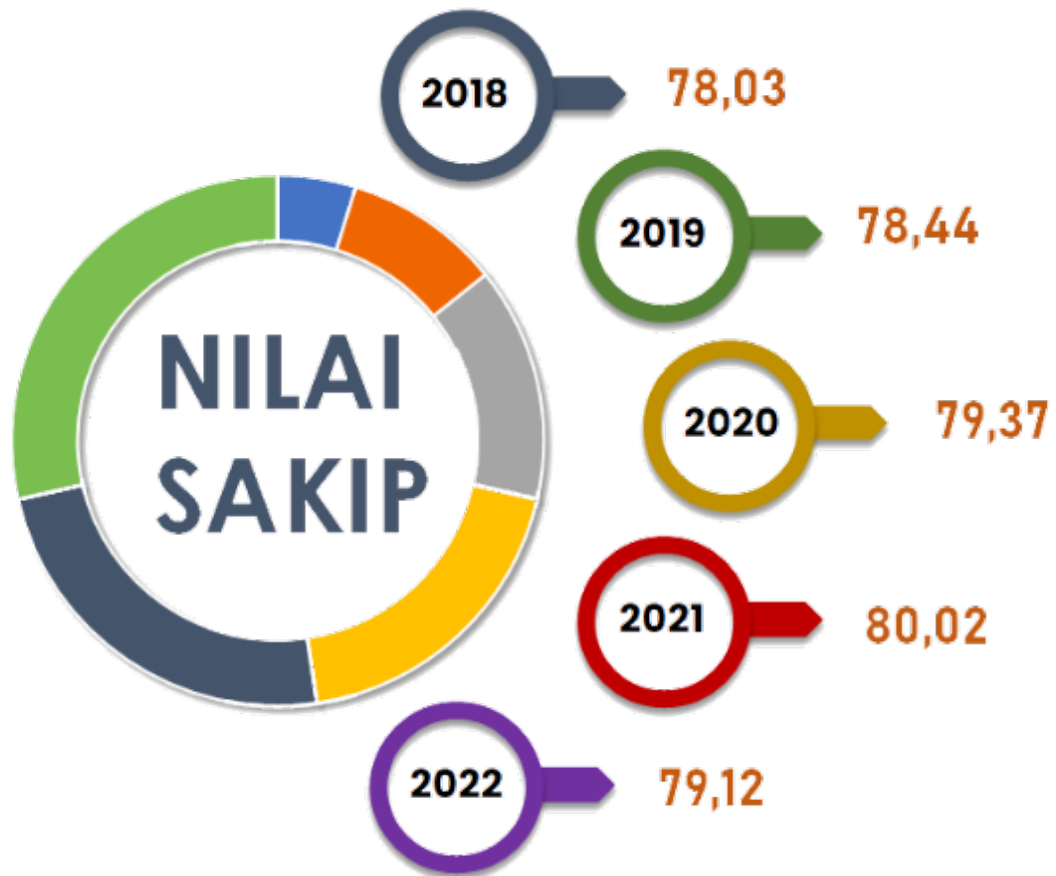
Tabel 13. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan 2021 perkomponen

No	Komponen	Bobot	Nilai AKIP	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,18	24,18
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,19	20,88
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,19	10,71
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,46	23,33
Nilai AKIP			80,02	79,12

Sumber: Setditjen KSDAE, 2023

Jika dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2021, nilai AKIP tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,9 poin dengan komponen yang mengalami penurunan yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, sedangkan 2 komponen lainnya mengalami kenaikan

nilainya. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan nilai paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Nilai SAKIP selama 5 tahun terakhir disajikan sebagai berikut



Gambar 50. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE selama 5 tahun terakhir
Sumber: Setditjen KSDAE, 2023



Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon

Sumber: David Herman Jaya

B. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Tahun 2022 Ditjen KSDAE mendukung 3 Prioritas Nasional yaitu (1) PN 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (2) PN 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan (3) PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022 sebagai berikut:

PN 1 → Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Anggaran:

Pagu : Rp. 255.383.436.000,-

Realisasi : Rp. 245.541.819.610,-
(96,15%)

Capaian Kinerja:

- Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan capaian 4.143.295 Hektar atau 82,48% dari target 5.023,188 hektar.
- Nilai kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi, dengan 20 layanan (100%).
- Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi capaian 1.706 orang.
- Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya capaian 531 unit KK dari target 277 unit KK.
- Fasilitasi usaha ekonomi produktif di Kawasan Konservasi, dengan capaian 1.663 desa dari target 500 desa.
- Akses Pemanfaatan kemitraan konservasi di Kawasan Konservasi dengan capaian 70.750,36 hektar dari target 90.000 hektar.
- Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani dengan capaian 283.964 hektar atau 63,65% dari target 446.090 hektar.
- Ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya, dengan capaian 12 rekomendasi kebijakan atau 109,09% dari target 11 rekomendasi kebijakan.
- Entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN dan Badan Usaha Swasta), dengan capaian 536 lembaga atau 108,72% dari target 493 lembaga.
- Entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam yang dikembangkan, dengan capaian 18 entitas atau 94,73% dari target 19 entitas.
- Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata (wisata alam,

SAVE, dan Bahari). dengan capaian 78 kelompok masyarakat dari target 25 kelompok masyarakat.

- Destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan, dengan capaian 15 unit atau 100%.
- Destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang dikembangkan, dengan capaian 7 unit atau 100% dari target 7 unit.
- Destinasi wisata alam bahari yang dikembangkan, dengan capaian 3 unit atau 100% dari target 3 unit.
- Pengembangan wisata alam di Kawasan Konservasi, dengan capaian 49 unit atau 100% dari target 49 unit.

PN 2 → Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan menjamin pemerataan

Anggaran:

Pagu : Rp 3.124.697.000

Realisasi : Rp 3.112.036.959 (99,59%)

Capaian Kinerja:

- Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 20.448,50 hektar
- Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem 762 hektar

PN 6 → Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Anggaran:

Pagu : Rp. 207.967.262.000,-

Realisasi : Rp. 202.339.499.847,-
(97,29%)

Capaian Kinerja:

- Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati 1 layanan atau 100% dari target 1 layanan.
- Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, dengan capaian 64.047,135 hektar atau 112,17% dari target 57.096 hektar.
- Kebijakan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi, dengan capaian 1 rekomendasi kebijakan atau 100% dari target 1 rekomendasi kebijakan.
- Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya
- Koridor satwa yang dikelola dalam mendukung Food Estate, dengan capaian 4 unit atau 133,33% dari target 3 unit.
- Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati, dengan capaian 13 rekomendasi kebijakan atau 100% dari target 13 rekomendasi kebijakan.
- Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang dikembangkan, dengan capaian 201 entitas atau 100,5% dari target 200 entitas
- Pusat konservasi yang dibangun 2 unit, dengan capaian 7 unit atau 66,67% dari target 3 unit.
- Kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL, dengan capaian 12.203.261,61 hektar dari target 11.494.300 hektar.

C. CAPAIAN KEGIATAN BERSUMBER DANA SBSN

SBSN merupakan salah satu sumber pendanaan dan menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mengembangkan pembangunan negara berbasis syariah. Pada awal tahun 2022, Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi anggaran bersumber dana SBSN sebesar Rp 209.034.683.000,- di 4 lokasi yaitu 1) BTN Ujung Kulon dengan pagu sebesar Rp 96.159.660.000,-, 2) BKSDA Maluku Rp 3.483.086.000,- merupakan proyek lanjutan/luncuran tahun 2021, 3) BBKSDA Riau dengan pagu sebesar Rp 62.391.937.000,-, dan BKSDA Yogyakarta dengan pagu sebesar Rp 47.000.000.000,-.

Akan tetapi proyek di BBKSDA Riau dan BKSDA Yogyakarta tidak dapat dilaksanakan karena kedua proyek tersebut tidak masuk dalam Daftar Proyek Prioritas (DPP) yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan anggaran pada kedua proyek tersebut diblokir. Selanjutnya pada bulan September, dilakukan pemotongan anggaran (*cut off*) pada kedua proyek tersebut dengan pagu total 2 proyek tersebut sebesar Rp 109.391.937.000,-.

Proyek SBSN pada Ditjen KSDAE tahun 2022 dilaksanakan hanya pada 2 lokasi yaitu di BTN Ujung Kulon dan BKSDA Maluku dengan total pagu anggaran sebesar Rp 99.642.746.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2022, anggaran telah terserap sebanyak Rp 99.476.468.726,- atau 99,83%.

Proyek SBSN di BTN Ujung Kulon adalah Pembangunan *Javan Rhino Study and Conservation Area* (JRSCA). Proyek ini merupakan proyek tahun jamak dengan periode tahun 2021-2022 (*Multi Years Contract/MYC*). Tujuan dari proyek

ini diantaranya untuk mewujudkan populasi badak jawa pada tingkat yang *viable*, menyiapkan individu yang akan ditranslokasi ke habitat kedua dan mewujudkan JRSCA sebagai pusat pendidikan dan penelitian di bidang bio-ekologi badak jawa. Beberapa konstruksi yang dibangun yaitu *paddock* penelitian, padang penggembalaan dan kandang pengendali ternak liar, kompleks stasiun lapangan/*field station*, *paddock* pengembangan, pagar batas, pos jaga, dan kantor pengelola.

Sedangkan proyek SBSN di BKSDA Maluku yaitu Pembangunan Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku, merupakan lanjutan/luncuran dari proyek tahun 2021. Tujuan dari pembangunan pusat konservasi ini adalah sebagai upaya pelestarian dan penyelamatan satwa jenis burung paruh bengkok dan membangun kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, khususnya terhadap jenis burung paruh bengkok yang khas dan endemik; selain itu juga diharapkan menjadi wadah pengumpulan pengetahuan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang burung paruh bengkok endemik serta menjadi cikal bakal pusat penelitian burung paruh bengkok di Indonesia. Pembangunan dilakukan di 9 lokasi yaitu: Kota Ambon (Pusat Transit dan Klinik Satwa), Tanjung Sial, Kabupaten Seram Bagian Barat (Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS), di Kantor SKW II Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Kantor SKW III Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kantor Resort Buru, Kabupaten Buru, Kantor Resort Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Kantor Resort Tobelo, Kab. Halmahera Utara,

Kantor Resort Sidangoli, Kabupaten
Halmahera Barat Kantor Resort Bacan,
Kabupaten Halmahera Selatan.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Proyek SBSN Tahun 2022

No	Satker	Pagu			Realisasi 2022	%
		Lanjutan/Luncuran 2021 ke 2022	Pagu TA 2022	Total		
1	BTN Ujung Kulon	3.483.086.000	0	3.483.086.000	3.483.086.000	100%
2	BKSDA Maluku	57.420.560.000	38.739.100.000	96.159.660.000	95.993.382.726	99,83%
Jumlah		60.903.646.000	38.739.100.000	99.642.746.000	99.476.468.726	99,83%



Gambar 51. Dokumentasi *Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA)* di TN Ujung Kulon
Sumber: Balai TN Ujung Kulon



Gambar 52. Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku
Sumber: BKSDA Maluku

D. KEGIATAN TEMATIK DITJEN KSDAE TAHUN 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga tahun 2022, karena itu berbagai bentuk intervensi dilakukan oleh pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif. Pada tahun 2022 pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Berbagai kebijakan juga ditetapkan guna memulihkan perekonomian nasional. Dukungan Ditjen KSDAE dalam rangka mendorong kebangkitan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dilakukan antara lain melalui program padat karya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, kebijakan kelautan

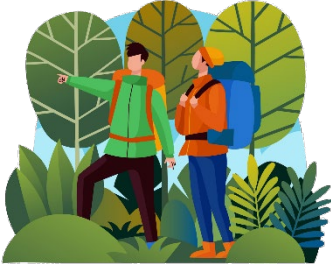
Indonesia dan kegiatan ketahanan pangan.

1. Kebijakan Kelautan Indonesia

Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Ditjen KSDAE mendukung kebijakan ini melalui 2 kegiatan yaitu 1) Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi dengan target 3 TN yaitu TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate); dan 2) Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dengan target 5 TN yaitu TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Kepulauan Togean, TN Karimunjawa, dan TN Wakatobi. Pemantauan kegiatan ini dilakukan setiap triwulan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) Kantor Staf Presiden (KSP).

Pada tahun 2022, kegiatan pada Ditjen KSDAE yang mendukung kebijakan ini telah dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Tabel 15. Kegiatan pada Ditjen KSDAE yang mendukung kebijakan pencapaian target Tahun 2022

Kegiatan	Capaian
Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi 	Telah dilaksanakan pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada 3 TN: 1. TN Wakatobi Telah terlaksananya penataan bangunan pelayanan pengunjung 2. TN Bunaken Telah tersedianya kapal (Pelang) pengawasan wisata 3. TN Takabonerate Telah terbangunnya Wisma Tinabo

Kegiatan	Capaian
<p>Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi</p> 	<p>Telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi pada 5 TN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TN Bunaken seluas 74.001 ha 2. TN Takabonerate seluas 530.765 ha 3. TN Kepulauan Togean seluas 363.392, ha 4. TN Karimunjawa seluas 111.622 ha 5. TN Wakatobi seluas 1.334.628 ha



Gambar 53. Gambar Kapal Pelang BTN Bunaken
 Sumber: BTN Bunaken

2. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dasar pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target lokasi pada program ini adalah pada 25 provinsi dan 509 Kabupaten. Berdasarkan target lokasi tersebut, UPT Ditjen KSDAE yang berpartisipasi dalam program ini sebanyak 42 UPT yang terdiri dari 18 UPT KSDA dan 24 UPT Taman Nasional.

Kegiatan yang dilakukan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi

berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberian bantuan kepada masyarakat telah dilakukan kepada 428 kelompok masyarakat dan melibatkan 9.188 orang anggota kelompok, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.001.341.733 atau 97,88% dari target anggaran Rp 16.347.838.000. Jenis pemberian bantuan antara lain berupa budidaya tanaman pertanian, peternakan, pengolahan makanan (kerupuk, kolang kaling, pengolahan pupuk), sarana kerajinan ukiran kayu, budidaya burung puyuh, budidaya lebah madu, perlengkapan wisata, dan peralatan pengolahan kopi.



Gambar 54. Gambar Pemberian bantuan peralatan produksi bubuk kopi kepada Kelompok Tani Giat Bersama di Desa Arang Sapat Kabupaten Seluma.
Sumber: BKSDA Bengkulu

3. Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dasar dari pelaksanaan program ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tujuan pokok diterbitkannya Inpres tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan

kesejahteraan di Tanah Papua, yang mencakup 7 (tujuh) bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Ditjen KSDAE yang mendukung program ini antara lain melalui kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, pembangunan sarpras pendukung wisata alam, dan pemulihan ekosistem.

Tabel 16. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan kegiatan pada Ditjen KSDAE
Mendukung Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan berkelanjutan, pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Wilayah Pulau Papua, baik Visi 2100 Papua dan Visi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi	Pelaksanaan melalui kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL di 5 UPT: <ol style="list-style-type: none"> 1. BBKSDA Papua seluas 22.438 hektar 2. BBKSDA Papua Barat seluas 199.893 hektar 3. BBTN Teluk Cenderawasih seluas 337 hektar 4. BTN Lorentz seluas 15.000 hektar 5. BTN Wasur seluas 86.282 hektar
Bersama-sama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan destinasi pariwisata (ekowisata) berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (<i>geopark</i>), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan;	Pelaksanaan kegiatan melalui pembangunan sarpras pendukung wisata alam di: <ol style="list-style-type: none"> 1. BBKSDA Papua Barat sebanyak 8 paket pekerjaan yang dilaksanakan di TWA Sorong 2. BBTN Teluk Cendrawasih sebanyak 3 paket pekerjaan yaitu di Pulau Rumberpon, BPTN Wilayah III Yembekiri, dan Aisandami
Bersama-sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan pelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove, padang lamun dan terumbu karang dan bersama dengan pemerintah daerah memastikan pelestarian rehabilitasi di luar kawasan hutan;	Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem pada BBTN Teluk Cenderawasih pada kawasan mangrove seluas 67,58 hektar dan terumbu karang seluas 0,004 hektar

4. Program Padat Karya

Program padat karya bertujuan membangkitkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui penciptaan pekerjaan yang mengutamakan pelibatan masyarakat. Kegiatan Ditjen KSDAE yang mendukung program padat karya ini adalah dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pemulihan ekosistem dengan keluaran upah kerja (HOK) bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, tercatat pagu anggaran kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pemulihan ekosistem sebesar Rp Rp.122.404.682.000 dengan realisasi Rp 116.255.472.542 (94,98%), dan di dalam kegiatan tersebut terdapat pagu aliran dana ke masyarakat sebesar Rp Rp.28.110.980.000, dengan realisasi Rp.25.877.298.398 (92,05%). Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 25.484 orang, dengan realisasi jumlah HOK sebanyak 197.107 HOK atau 92,65% dibandingkan target 212.748 HOK



Gambar 55. Penanaman pengkayaan jenis klimaks Kampili di Sampok Manis Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh, TN Bukit Baka Bukit Raya.

Sumber: BTN Bukit baka Bukit Raya

5. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Program PPDT)

Program ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Program ini dimaksudkan untuk mendorong upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah tertinggal entas, secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Wilayah yang menjadi target dalam strategi nasional tersebut yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera.

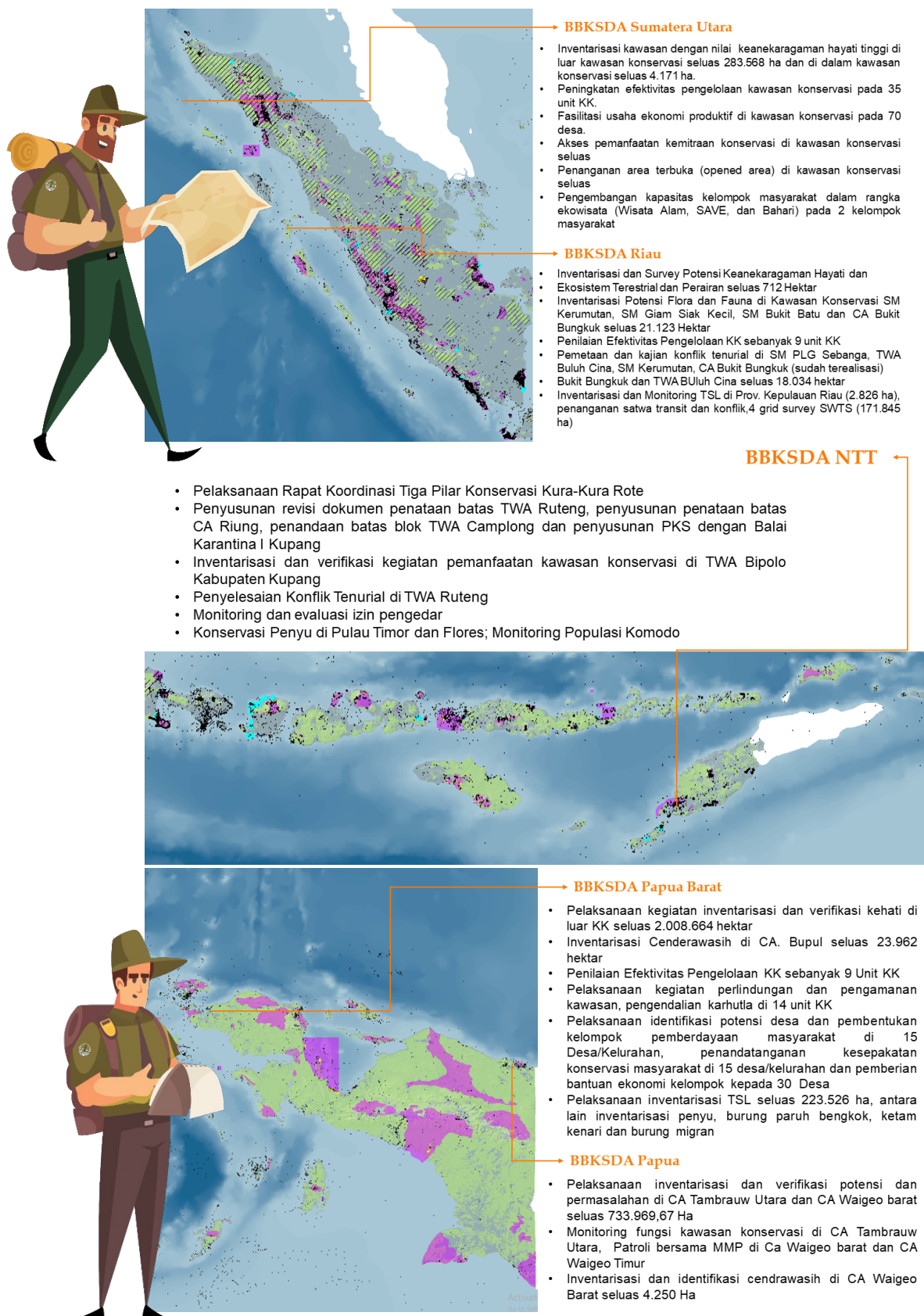
Kegiatan pada Ditjen KSDAE yang mendukung program ini yaitu kegiatan fasilitasi usaha ekonomi produktif di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di provinsi Papua, kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Nabire dan Supiori melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa binaan di Kampung Makimi, Kampung Nifasi, Kampung Air Mandidi, Kampung Wariyei, Kampung

Odori, dan Kampung Masram. Sedangkan di provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan pengembangan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat tepatnya desa Kangeli, desa Kawata Wundut, dan desa Rewarara.

6. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Program ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010, dan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Program ini bertujuan mendukung rencana pemerintah untuk mendukung kegiatan di perbatasan negara dan menjaga keamanan perbatasan dengan melakukan patroli patroli yang melibatkan masyarakat sekitar.

Lima UPT Ditjen KSDAE yang berpartisipasi dalam program ini yaitu UPT-UPT yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain yaitu BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Riau, BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat.



Gambar 56. Capaian kegiatan pada UPT Ditjen KSDAE Dalam Mendukung Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

7. Kegiatan Ketahanan Pangan (Food Estate)

Pada tahun 2022, tiga UPT Ditjen KSDAE turut mendukung program ketahanan pangan yaitu BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Kalimantan Tengah, dan BBKSDA Papua. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan koridor satwa dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar.

Tabel 17. Kegiatan Ketahanan Pangan di Tiga UPT Ditjen KSDAE

BKSDA Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana aksi dan sosialisasi Koridor Satwa di Koridor Dangku-Meranti • Penyusunan rencana aksi dan sosialisasi Koridor Jambul Nanti Patah • Sosialisasi Koridor Satwa Kepada Masyarakat di Koridor Sugihan Simpang Heran Pagu : Rp 761.610.000 Realisasi : Rp 750.175.316 (98,5%)
BKSDA Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Tanaman Pengkayaan di Koridor Satwa/ABKT (50 Ha) • Finalisasi Rencana Aksi Koridor/ABKT • Pemantauan Populasi Orangutan dan Bekantan di 3 Kabupaten (Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau) • Survey Analisa Potensi TSL Untuk Pengusulan Quota di Areal • Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Areal Eks PLG (Lokasi Koridor Satwa/ABKT) Pagu : Rp 825.670.000 Realisasi : Rp 730.940.000 (88,53%)
BBKSDA Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Forum Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi) • Deliniasi, Penyusunan Data dan Informasi, Penyusunan Rekomendasi Calon Koridor di Kabupaten Merauke • Pembentukan Forum Perlindungan Kehati di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi • Pengusulan/Penetapan Koridor (Lokasi dan Pengelola) Kabupaten Merauke Pagu : Rp 910.726.000 Realisasi : Rp 891.756.903 (97,92%)





Laut dan Cinta, Taman Nasional Taka
Bonerate

Sumber: Asri

E. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam menjalankan tugas di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem pada tahun 2022, Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 1.775.967.907.000,-. Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa perubahan pagu anggaran, antara lain yaitu:

- a. Pada awal tahun 2022, telah diterapkan kebijakan *Automatic Adjustment* tahap I pada seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE dengan total sebesar Rp 72.558.179.000,-.
- b. Pada bulan Juni, dilakukan revisi penambahan pencadangan anggaran *Automatic Adjustment* tahap II sebesar Rp 48.888.469.000,-.
- c. Pada bulan September, dilakukan revisi realokasi belanja pegawai antar Eselon I KLHK sebesar Rp 152.371.000,-, yaitu berupa pengurangan pagu belanja pegawai Ditjen KSDAE untuk diberikan pada Ditjen Penegakan Hukum LHK.
- d. Pada bulan Oktober, dilakukan *cut off* anggaran sumber dana SBSN pada BBKSDA Riau dan BKSDA Yogyakarta senilai total Rp 109.391.937.000,-.

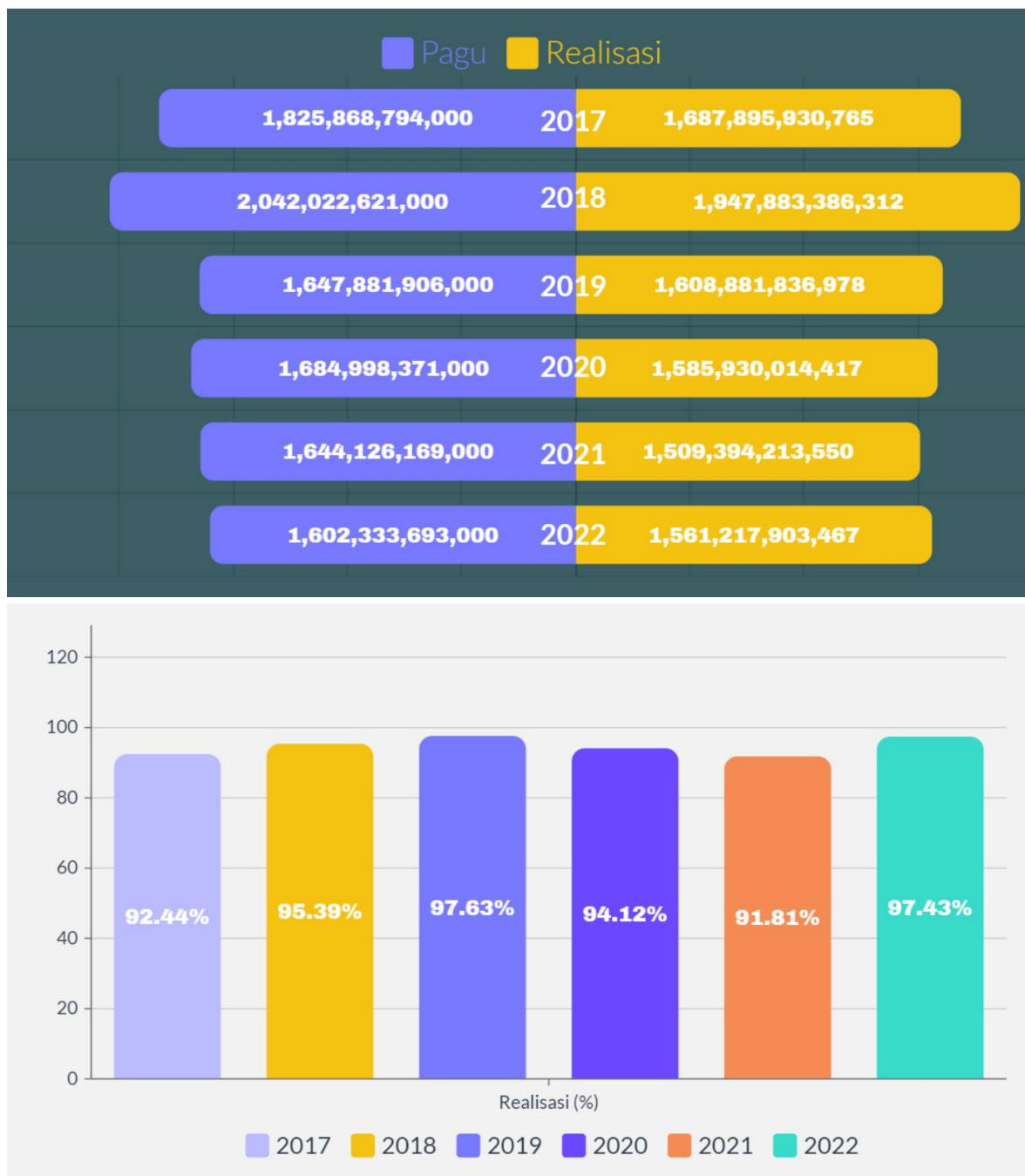
e. Pada bulan Oktober, dilakukan revisi *top up* HLN sebesar Rp 7.775.325.000,- dengan rincian proyek BCCPGLE sebesar Rp 5.300.000.000,-, proyek FIP-1 sebesar Rp 700.000.000,-, dan proyek FP III sebesar Rp 1.775.325.000,-.

f. Pada bulan November, dilakukan revisi realokasi anggaran yang terblokir ke BA-BUN (penghapusan blokir AA) dan pergeseran belanja pegawai (51) ke satker yang minus.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2022, pagu Ditjen KSDAE menjadi sebesar **Rp 1.602.333.693.000,-** atau menurun 9,78% dari pagu awal.

Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem OMSPAN, hingga akhir tahun 2022, Ditjen KSDAE merealisasikan anggaran sebesar **Rp 1.561.217.903.467,-** atau **97,43%** dari pagu Rp.1.602.333.693.000,-. Realisasi anggaran ini meningkat 5,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.509.394.213.550,- atau 91,81% dari pagu Rp 1.644.126.169.000,-.

Realisasi tersebut menempatkan Ditjen KSDAE pada peringkat 10 dari 13 Eselon I lingkup Kementerian LHK, dengan rata-rata realisasi anggaran seluruh Eselon I sebesar 98,04%.



Gambar 57. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE
Sumber: OMSPAN, 10 Januari 2023

Berdasarkan kegiatan, yang mendapatkan alokasi pagu anggaran terbesar adalah kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE sebesar 65,28%, alokasi ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, dukungan manajemen, serta layanan sarana prasarana internal pada 75 Satker

lingkup Ditjen KSDAE. Sedangkan alokasi anggaran terendah pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial sebesar 0,54%, anggaran ini dialokasikan pada 24 Satker lingkup Ditjen KSDAE yang terdiri dari Direktorat BPPE dan 23 UPT KSDA.

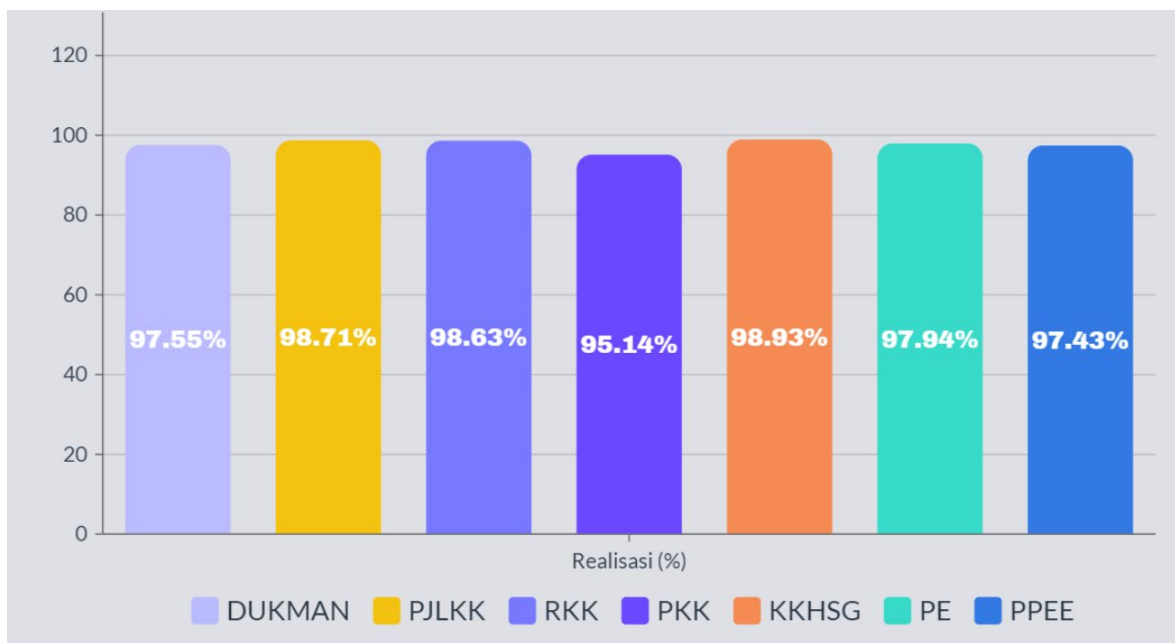
Penyerapan anggaran tertinggi pada kegiatan Konservasi

Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (98,93%), antara lain untuk membiayai kegiatan Pembangunan Pusat Penanganan Satwa Transit/Konflik di BTN Ujung Kulon dan BKSDA Maluku yang menggunakan skema sumber dana SBSN yang menyerap anggaran sebesar 57,9% pada kegiatan ini. Selain kegiatan

tersebut, alokasi anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan intervensi manajemen TSL di dalam maupun di luar kawasan konservasi dan penanganan satwa transit dan konflik.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE per Kegiatan

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1.046.002.323.000	1.020.421.596.607	97,55%
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	52.615.269.000	51.937.725.250	98,71%
Perencanaan Kawasan Konservasi	52.440.881.000	51.722.677.966	98,63%
Pengelolaan Kawasan Konservasi	230.543.617.000	219.330.930.759	95,14%
Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	173.640.392.000	171.782.414.700	98,93%
Pemulihan Ekosistem	38.391.505.000	37.601.296.248	97,94%
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	8.699.706.000	8.421.261.937	96,80%
Total	1.602.333.693.000	1.561.217.903.467	97,43%



Gambar 58. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Kegiatan

Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar 44,06%, belanja barang sebesar 45,93%, dan belanja modal sebesar 10,01%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran, yang tertinggi adalah pada belanja modal yaitu sebesar 98,62%, kemudian belanja barang terserap 97,34%, dan belanja pegawai dengan realisasi terendah sebesar 97,26%. Terdapat sisa anggaran pada belanja

pegawai sebesar Rp 18,63 M, nilai ini merupakan selisih dari cadangan alokasi anggaran kenaikan tunjangan kinerja 80% di 75 Satker, yang sampai dengan akhir tahun 2022 tidak dapat dibayarkan mengingat belum disetujuinya usulan kenaikan tunjangan kinerja Kementerian LHK. Selain itu, sisa anggaran belanja pegawai tersebut juga diakibatkan oleh beberapa orang pegawai yang pensiun pada tahun 2022 dan tidak dapat dibayarkan gaji dan tunjangannya.



Gambar 59. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja.
Sumber: OMSPAN, 10 Januari 2023

Berdasarkan jenis sumber dana, pada tahun 2022, Ditjen KSDAE mempunyai 5 jenis sumber dana, dengan alokasi terbesar pada sumber dana RM sebesar 78,01% dan yang terendah adalah RMP sebesar 0,42%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran

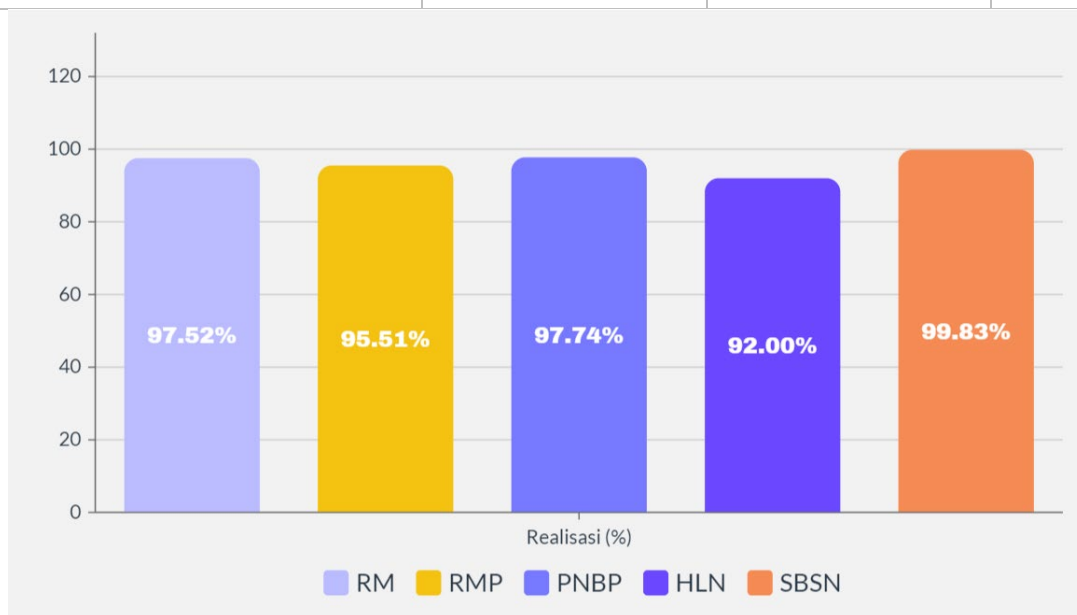
yang tertinggi adalah pada sumber dana SBSN sebesar 99,83%. Kegiatan bersumber dana SBSN pada tahun 2022 dilaksanakan pada 2 UPT yaitu pembangunan JRSCA di BTN Ujung Kulon dan pembangunan pusat konservasi satwa di BKSDA Maluku.

Pembangunan JRSCA di BTN Ujung Kulon telah dilaksanakan mulai tahun 2021 dan merupakan proyek tahun jamak, dengan realisasi anggaran total sebesar 99,83%. Sedangkan

pembangunan pusat konservasi satwa di BKSDA Maluku pada tahun 2022 merupakan lanjutan/luncuran dari tahun 2021, dengan total realisasi anggaran 100%.

Tabel 19. Realisasi Anggaran per Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	1.249.917.118.000	1.218.909.981.262	97,52%
Rupiah Murni Pendamping (RMP)	6.714.681.000	6.413.375.302	95,51%
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	175.000.000.000	171.041.585.956	97,74%
Hibah Luar Negeri (HLN)	71.059.148.000	65.376.492.221	92,00%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	99.642.746.000	99.476.468.726	99,83%
Total	1.602.333.693.000	1.561.217.903.467	97,43%



Gambar 60. Persentase Realisasi Anggaran per Sumber Dana

2. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran berdasarkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan perbendaharaannya. Perhitungan NKA ditentukan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%.

Nilai EKA diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai ini merupakan salah satu parameter untuk menilai kinerja anggaran. Dalam penilaiannya, nilai EKA menggunakan 6 komponen penilaian yaitu penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output program, efisiensi output program, capaian sasaran program, dan rata-rata satker. Sampai akhir tahun 2022, nilai EKA Ditjen KSDAE terpantau sebesar 88,54 yang termasuk dalam kategori Baik. Adapun nilai setiap komponen yaitu penyerapan anggaran dengan nilai 97,43, konsistensi dengan nilai 93,91, capaian output program dengan nilai 97,17, efisiensi output program dengan nilai 5,23, capaian sasaran program dengan nilai 94,94, dan rata-rata satker dengan nilai 84,84.

Nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi OMSPAN. Nilai ini mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu instansi. Dalam penilaiannya, nilai IKPA menggunakan 3 aspek, yang setiap aspeknya terdapat komponen penilaian lagi yaitu 1) kualitas perencanaan anggaran, dengan komponen 2 penilaian yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, 2) kualitas pelaksanaan anggaran, dengan 5 komponen penilaian yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan komponen penilaian adalah capaian output. Adapun nilai IKPA Ditjen KSDAE tahun 2022 sebesar 91,77, dengan nilai tiap aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran dengan nilai 82,79, kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai 95,01, kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan nilai 94,43.

Berdasarkan nilai NKA dan IKPA tersebut diatas, dapat diketahui NKA Ditjen KSDAE sebesar 89,83. Nilai NKA Ditjen KSDAE naik turun secara fluktuatif beberapa tahun ini. Data NKA Ditjen KSDAE tahun 2018-2022 sebagai berikut:

	2018	2019	2020	2021	2022
NKA	87,578	97,326	96,028	87,632	89,83
EKA	81,53	98,01	94,9	86,6	88,54
IKPA	96,65	96,30	97,72	89,18	91,77

Gambar 61. Nilai Kerja Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2018-2022

Kembang Rafflesia Yang Mekar di TNBBS

Sumber: Vivin Adi Anggoro



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen KSDAE 2022 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Pencapaian kinerja diukur melalui tujuh indikator kinerja program dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,23%.

Capaian setiap indikator kinerja program yaitu 1) luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati terealisasi seluas 12.203.261,61 hektar atau 117,22% dari target 10.410.368 hektar; 2) luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati spesies di luar kawasan konservasi seluas 8,06 juta hektar atau 80,6% dari target 10 juta hektar; 3) jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran sebesar 1,74 Triliun Rupiah atau 83% dari target 2,10 Triliun Rupiah; 4) jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 130,23 Miliar Rupiah 130,23% dari target 100 Miliar Rupiah; 5) jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 557 desa atau 111,40% dari target 500 desa; 6) indikator kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 63,07 poin atau 109,69% dari target 57,5 poin; dan 7) nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79,12 poin atau 100,15% dari target 79 poin.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, KSDAE mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp

1.602.333.693.000,- dengan realisasi Rp 1.561.217.903.467,- atau **97,43%**. Berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja, diperoleh nilai **0,92**, yang berarti dalam penggunaan anggarannya untuk pencapaian kinerja.

Kebijakan *Automatic Adjustment* yaitu pencadangan anggaran yang dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19, memberi dampak pada pelaksanaan kinerja dan anggaran. Pada tahun 2022, Ditjen KSDAE mencadangkan anggaran sebesar Rp 121.446.648.000,- yang terbagi dalam 2 tahap, tahap I sebesar Rp 72.558.179.000,- dan tahap II sebesar Rp 48.888.469.000,-.

Atas capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 serta tantangan dalam penanganan pasca Covid-19, Ditjen KSDAE akan terus meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kedepan, Ditjen KSDAE akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, dengan melakukan transformasi tata kelola kawasan konservasi berbasis lanskap, ekosistem dan masyarakat, sehingga didapatkan manfaat baik kelestarian alam maupun kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akhir dari laporan kinerja ini, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Ditjen KSDAE senantiasa terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk dapat bersama-sama membangun tapak kawasan hutan serta bekerja sama dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi, karena konservasi alam tidak mungkin dilakukan sendiri.

Pemberdayaan masyarakat di Papua

Sumber: BBKSDA Papua





LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Revisi Tahun 2022



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM

Jabatan : Pjt. DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua,



Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik di Dalam dan di Luar Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Konservasi yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	11.494.300 Hektar	10.410.368 Hektar
b.	Terseleenggaranya Inventarisasi dan Verifikasi Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati spesies di Luar Kawasan Konservasi	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar
c.	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran	2,1 Triliun Rupiah	2,1 Triliun Rupiah
d.	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Secara Lestari	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	100 Miliar Rupiah	100 Miliar Rupiah
e.	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang Mendapatkan Akses Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	500 Desa	500 Desa
f.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi	57,5 Poin	57,5 Poin
g.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Genetik dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	79 Poin	79 Poin



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	650.873.795.000	547.631.664.000
1.	Perencanaan Kawasan konservasi		
2.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik		
3.	Pengelolaan Kawasan Konservasi		
4.	Pemulihan Ekosistem		
5.	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi		
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	12.419.951.000	8.699.706.000
6.	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial		
	Program Dukungan Manajemen	1.112.674.161.000	1.046.002.323.000
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		

Jakarta, 15 Desember 2022

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Plt. DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Lampiran 2. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi Tahun 2022

No	UPT	Luas Hasil Inventarisasi dan Verifikasi di dalam KK (Ha)	Luas Hasil Inventarisasi dan Verifikasi di Luar KK (Ha)
1	BTN TAMBORA	72.412	0,00
2	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	2	0,00
3	BBKSDA JAWA BARAT	35.356	26.610,52
4	BKSDA JAWA TENGAH	20	78.365,05
5	BBKSDA JAWA TIMUR	1	2.852,66
6	BTN BALURAN	25.000	0,00
7	BKSDA NAD	31.262	292.031,98
8	BBKSDA SUMATERA UTARA	4.171	297.793,11
9	BKSDA SUMATERA BARAT	1.027	0,00
10	BBKSDA RIAU	10.900	682.968,01
11	BKSDA JAMBI	10.902	195.864,61
12	BKSDA SUMATERA SELATAN	302	341.674,46
13	BKSDA KALIMANTAN BARAT	91.775	281.299,27
14	BTN TANJUNG PUTING	2.200	0,00
15	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	25.000	107.629,51
16	BTN KUTAI	88.670	0
17	BKSDA SULAWESI UTARA	5.698	72.526,68
18	BKSDA SULAWESI TENGAH	3.000	0
19	BBKSDA SULAWESI SELATAN	84.909	607.583,89
20	BKSDA SULAWESI TENGGARA	41.000	254.181,16
21	BKSDA BALI	6.284	0
22	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	56.000	0
23	BKSDA BENGKULU	7.547	187.726,12
24	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	795	0
25	BBTN GUNUNG LEUSER	338.670	0
26	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	4.626	0
27	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	57.000	50.935,90
28	BTN KOMODO	7	0
29	BBKSDA PAPUA	23.962	2.008.186,98
30	BBKSDA PAPUA BARAT	733.970	559.152,00
31	BTN KAYAN MENTARANG	6.000	0
32	BTN UJUNG KULON	35000	0
33	BTN BOGANI NANI WARTABONE	24.483	0
34	BTN BALI BARAT	946	0
35	BTN SEBANGAU	100.000	0
36	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	3.744	1.664.269,20
37	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	0	348.317,16
38	BBTN KERINCI SEBLAT	44.757	0
39	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	5	0
40	BTN TESSO NILO	1	0
41	BTN BUKIT 12	8.000	0
42	BTN GUNUNG CEREMAI	2.700	0
43	BTN GUNUNG MERAPI	121	0
44	BTN GUNUNG MERBABU	2.410	0
45	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	43.488	0
46	BTN KEPULAUAN TOGEAN	15	0
47	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	43.750	0
48	BTN AKETAJAWE-LOLOBATA	42.000	0
49	BTN LORENTZ	150.000	0
50	BTN MERU BETIRI	90	0
51	BTN WAY KAMBAS	18	0
52	BBTN LORE LINDU	43.700	0
53	BTN ALAS PURWO	14.256	0
54	BTN BUNAKEN	917	0
55	BTN KEP. SERIBU	1	0
56	BBTN TELUK CENDERAWASIH	240.000	0
57	BTN GUNUNG HALIMUN	10.000	0
58	BTN KARIMUN JAWA	10.959	0

No	UPT	Luas Hasil Inventarisasi dan Verifikasi di dalam KK (Ha)	Luas Hasil Inventarisasi dan Verifikasi di Luar KK (Ha)
59	BTN SIBERUT	44.503	0
60	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	65.715	0
61	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	2.400	0
62	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	20.000	0
63	BTN KELIMUTU	5	0
64	BTN WAKATOBI	1.320.987	0
65	BTN GUNUNG PALUNG	36.628	0
66	BTN TAKA BONERATE	9.700	0
67	BTN MANUSELLA	35.000	0
68	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	12.927	0
69	BTN GUNUNG RINJANI	5.000	0
70	BKSDA D.I YOGYAKARTA	600	0
TOTAL		4.143.293,00	8.059.968,27

Lampiran 3. Hasil Verifikasi Luasan Indikatif Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB Tahun 2022

No	UPT Penanggung Jawab	Luas Target Inventarisasi dan verifikasi (Ha)	Luas Capaian Inventarisasi dan Verifikasi (Ha)
1	BKSDA NAD	393.933	292.031,98
2	BBKSDA Sumatera Utara	283.568	297.793,11
3	BKSDA Sumatera Barat	156.607	0
4	BBKSDA Riau	711.502	682.968,01
5	BKSDA Bengkulu	156.820	187.726,12
6	BKSDA Sumatera Selatan	351.922	341.674,46
7	BKSDA Jambi	145.482	195.864,61
8	BKSDA Kalimantan Selatan	61.656	107.629,51
9	BKSDA Kalimantan Tengah	1.271.937	1.664.269,20
10	BKSDA Kalimantan Timur	874.801	348.317,16
11	BKSDA Kalimantan Barat	1.871.326	281.299,27
12	BBKSDA Jawa Barat	169.800	26.610,52
13	BKSDA Jawa Tengah	159.100	78.365,05
14	BBKSDA Jawa Timur	0	2.852,66
15	BKSDA DIY	0	0
16	BKSDA Jakarta	0	0
17	BBKSDA Sulawesi Selatan	502.112	607.583,89
18	BKSDA Sulawesi Tengah	389.247	0
19	BKSDA Sulawesi Tenggara	225.725	254.181,16
20	BKSDA Sulawesi Utara	129.019	72.526,68
21	BKSDA Bali	0	0
22	BKSDA NTB	0	0
23	BBKSDA NTT	0	50.935,90
24	BKSDA Maluku	197.802	0
25	BBKSDA Papua	1.767.713	2.008.186,98
26	BBKSDA Papua Barat	508.828	559.152,00
Total		10.328.900,00	8.059.968,27

Lampiran 4. Rekapitulasi Devisa Pemanfaatan TSL Tahun 2022

NO.	JENIS KOMODITI	SATUAN	REALISASI KUOTA	DEVISA (Rp)	KETERANGAN
I	SATWA				
A	MAMALIA				
1	Mamalia	ekor	0	0	*1) Hasil Penangkar-
2	Mamalia *1)	ekor	281	140.500.000	an/Transplantasi
3	Primata*	ekor	1.240	43.400.000.000	*2) Ranching
4	Tanduk Rusa	kg	0		
B	REPTIL				
1	Reptil Hidup (Pet)	ekor	0	0	
2	Reptil Hidup (Konsumsi)	ekor	0	0	
3	Reptil Hidup *1)	ekor	31.367	4.705.050.000	
4	Kulit Reptil	lembar	0	0	
5	Kulit Buaya (ekspor + re-ekspor)	lembar	0	0	
6	Kulit Buaya porosus (re-ekspor)	lembar	2.378	14.684.150.000	
7	Kulit Buaya novaeguineae *2)	lembar	0	0	
8	Kulit Buaya novaeguineae	lembar	0	0	
9	Back Croc Bone	buah	0	0	
10	Daging Buaya	kg	6.000	930.000.000	
11	Daging Reptil	kg	0	0	
12	Reptil Kering (dried)	buah	0	0	
13	Empedu Ular	buah		0	
C	AMPHIBI				
1	Amphibi Hidup	ekor	0	0	
2	Amphibi Hidup *1)	ekor	0	0	
3	Kulit Amphibi	lembar	0	0	
4	Daging	ekor	0	0	
D	BURUNG				
1	Burung N-App	ekor	6.748	1.687.000.000	
2	Burung App *	ekor	3.259	65.180.000.000	
3	Sarang Burung Walet	kg	15.651	391.275.000.000	
E	ARTHROPODA				
1	Kupu-kupu *1)	ekor	20.074	1.734.588.513	
2	Kupu-kupu	ekor	0	0	
3	Lipan	ekor	0	0	
	Arachnida	Ekor	0		
4	Birgus latro	ekor	0	0	
F	AROWANA *1)	ekor	280	2.100.000.000	
G	AROWANA IRIAN *2)	ekor		0	
H	CORAL *1)	buah	574.601	100.555.175.000	
I	CORAL	buah/kg	0	0	
J	IKAN NAPOLEON	ekor	0	0	
K	IKAN NAPOLEON *2)	ekor	0	0	

NO.	JENIS KOMODITI	SATUAN	REALISASI KUOTA	DEVISA (Rp)	KETERANGAN
L	SIRIP IKAN HIU	kg	0	0	
M	Ikan Sapu Zebra*1)	ekor	0	0	
N	KUDA LAUT	ekor	0	0	
O	Ikan Clarion Angel	ekor	0	0	
P	Ikan Pari Air Tawar	ekor	0	0	
Q	KIMA *1)	ekor	8.130	406.500.000	
R	Fosil Kima	CBM	0	0	
S	LOLA MERAH	kg	0	0	
	JUMLAH I (SATWA)			626.797.963.513	
II	TUMBUHAN				
A	ANGGREK *1)	batang	19.200	5.511.808.998	
B	GAHARU				
1	Gyrinops verteegii/spp		0	0	
2	A. malacensis				
a	Kemedangan	kg	0	0	
b	Abuk	kg	0	0	
3	A. filaria				
a	Kemedangan	kg	0	0	
b	Abuk	kg	0	0	
c	Budidaya	kg	128.502	5.782.590.000	
d	Gaharu Buaya	kg	0	0	
C	PAKIS	kg	0	0	
D	PENGHAWAR JAMBI	kg	0	0	
E	LIMBAH ANGGREK	kg	0	0	
F	Sonokeling				
1	Dalbergia latifolia	M3	44.213	1.105.326.122.500	
G	Bubinga				
1	Bubinga demeusei	M3	0	0	
2	Bubinga tessmannii	M3	0	0	
H	Pasak Bumi	kg	0	0	
I	Akar Laka	M3	0	0	
	JUMLAH II (TUMBUHAN)			1.116.620.521.498	
III	Pungutan administrasi pemanfaatan TSL				
1	Blanko SAT-LN				
2	Izin Pengedar LN				
3	Izin Pengambilan Sampel				
4	Izin Penangkaran				
	Jumlah III				
	JUMLAH I + II			1.743.418.485.011	

Lampiran 5. Rekapitulasi Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan TSL Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Pendapatan Wisata Alam (425611)	Pendapatan Iuran di Bidang LHK (425612)	Pendapatan Perizinan di Bidang LHK (425255)	Jumlah (Rp)
1	BTN TAMBORA	154.830.000	100.000	0	154.930.000
2	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	955.075.500	28.365.000	58.050.000	1.041.490.500
3	BBKSDA JAWA BARAT	11.124.052.000	1.359.350.709	27.100.000	12.510.502.709
4	BKSDA JAWA TENGAH	5.462.841.000	268.131.080	52.100.000	5.783.072.080
5	BBKSDA JAWA TIMUR	2.654.192.500	1.306.673.879	191.045.000	4.151.911.379
6	BTN BALURAN	2.854.271.500	600.000	1.500.000	2.856.371.500
7	BKSDA NANGROE ACEH DARUSSALAM	23.377.500	76.315.500	10.000.000	109.693.000
8	BBKSDA SUMATERA UTARA	31.707.500	464.246.700	35.500.000	531.454.200
9	BKSDA SUMATERA BARAT	4.650.000	59.469.000	8.500.000	72.619.000
10	BBKSDA RIAU	10.449.500	187.633.000	2.550.000	200.632.500
11	BKSDA JAMBI	0	68.035.000	3.100.000	71.135.000
12	BKSDA SUMATERA SELATAN	267.921.500	1.024.230.690	150.000	1.292.302.190
13	BKSDA KALIMANTAN BARAT	30.850.000	355.760.650	22.500.000	409.110.650
14	BTN TANJUNG PUTING	4.949.389.500	0	0	4.949.389.500
15	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	354.467.500	114.475.000	0	468.942.500
16	BTN KUTAI	367.465.000	3.375.000	250.000	371.090.000
17	BKSDA SULAWESI UTARA	561.082.500	112.253.000	2.700.000	676.035.500
18	BKSDA SULAWESI TENGAH	23.150.000	107.554.770	5.000.000	135.704.770
19	BBKSDA SULAWESI SELATAN	842.545.500	489.332.704	22.850.000	1.354.728.204
20	BKSDA SULAWESI TENGGARA	31.945.000	91.963.000	13.500.000	137.408.000
21	BKSDA MALUKU	0	293.760.145	2.500.000	296.260.145
22	BKSDA BALI	724.122.000	72.407.457	48.800.000	845.329.457
23	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	310.755.000	39.143.890	23.050.000	372.948.890
24	BKSDA BENGKULU	122.947.500	98.899.744	12.500.000	234.347.244
25	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	4.681.980.500	16.270.000	8.450.000	4.706.700.500
26	BBTN GUNUNG LEUSER	1.137.810.000	325.508.450	250.000	1.463.568.450
27	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	48.758.500	2.750.000	0	51.508.500

No	Satuan Kerja	Pendapatan Wisata Alam (425611)	Pendapatan Iuran di Bidang LHK (425612)	Pendapatan Perizinan di Bidang LHK (425255)	Jumlah (Rp)
28	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	160.208.500	1.016.000	2.550.000	163.774.500
29	BTN KOMODO	20.049.647.500	0	11.100.000	20.060.747.500
30	BBKSDA PAPUA	150.000	3.512.338.275	5.000.000	3.517.488.275
31	BBKSDA PAPUA BARAT	5.017.500	267.327.010	12.850.000	285.194.510
32	BTN KAYAN MENTARANG	325.000	1.200.000	0	1.525.000
33	BTN UJUNG KULON	308.571.000	20.000.000	0	328.571.000
34	BTN BOGANI NANI WARTABONE	59.378.000	3.590.000	0	62.968.000
35	BTN BALI BARAT	2.978.226.000	4.650.000	0	2.982.876.000
36	BTN SEBANGAU	40.160.000	1.150.000	0	41.310.000
37	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	142.429.898	15.255.628.679	7.818.400.000	23.216.458.577
38	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	170.150.000	170.772.860	2.920.000	343.842.860
39	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	105.668.500	133.396.400	8.500.000	247.564.900
40	BBTN KERINCI SEBLAT	191.265.500	9.200.000	0	200.465.500
41	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	11.652.130.000	0	0	11.652.130.000
42	BTN BATANG GADIS	1.559.000	0	0	1.559.000
43	BTN TESSO NILO	2.869.500	1.250.000	50.000	4.169.500
44	BTN BUKIT 12	4.204.000	8.550.000	50.000	12.804.000
45	BTN GUNUNG CEREMAI	2.356.222.500	2.700.000	200.000	2.359.122.500
46	BTN GUNUNG MERAPI	1.023.302.500	450.000	0	1.023.752.500
47	BTN GUNUNG MERBABU	1.891.908.000	300.000	0	1.892.208.000
48	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	153.180.000	645.000	50.000	153.875.000
49	BTN KEPULAUAN TOGEAN	202.785.000	150.000	0	202.935.000
50	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	1.318.431.000	10.900.000	2.150.000	1.331.481.000
51	BTN AKETAJAWE-LOLOBATA	2.017.500	5.169.700	200.000	7.387.200
52	BTN LORENTZ	17.485.000	0	0	17.485.000
53	BTN MERU BETIRI	423.987.000	4.200.000	0	428.187.000
54	BTN WAY KAMBAS	0	0	4.000.000	4.000.000
55	BBTN LORE LINDU	360.099.500	250.000	250.000	360.599.500
56	BTN ALAS PURWO	3.971.870.500	3.450.000	1.100.000	3.976.420.500
57	BTN BUNAKEN	483.100.000	900.000	50.000	484.050.000

No	Satuan Kerja	Pendapatan Wisata Alam (425611)	Pendapatan Iuran di Bidang LHK (425612)	Pendapatan Perizinan di Bidang LHK (425255)	Jumlah (Rp)
58	BTN KEP. SERIBU	137.064.000	13.050.000	0	150.114.000
59	BBTN TELUK CENDERAWASIH	226.035.000	0	0	226.035.000
60	BTN GUNUNG HALIMUN	1.357.881.500	13.364.000	650.000	1.371.895.500
61	BTN KARIMUN JAWA	596.095.000	5.300.000	1.450.000	602.845.000
62	BTN WASUR	19.372.500	0	0	19.372.500
63	BTN SIBERUT	12.600.000	200.000	0	12.800.000
64	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	0	0	0	0
65	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	57.106.000	5.300.000	0	62.406.000
66	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	13.537.500	300.000	0	13.837.500
67	BTN KELIMUTU	1.452.756.000	0	2.400.000	1.455.156.000
68	BTN WAKATOB	320.107.500	1.455.000	300.000	321.862.500
69	BTN GUNUNG PALUNG	107.192.500	42.850.000	0	150.042.500
70	BTN TAKA BONERATE	99.980.000	0	0	99.980.000
71	BTN BUKIT TIGA PULUH	34.111.500	900.000	0	35.011.500
72	BTN MANUSELLA	32.940.000	750.000	0	33.690.000
73	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	21.302.500	0	0	21.302.500
74	BTN GUNUNG RINJANI	4.891.881.000	2.250.000	17.750.000	4.911.881.000
75	BKSDA D.I YOGYAKARTA	9.497.000	108.060.000	8.700.000	126.257.000
76	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0	0	500.000	500.000
	JUMLAH PNB	95.196.444.898	26.579.567.292	8.453.115.000	130.229.127.190

Lampiran 6. Rekapitulasi Desa yang melakukan Kesepakatan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat 2022

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	BKSDA Aceh	Gewat	Linge	Aceh Tengah	Aceh
2	BKSDA Aceh	Jamat	Linge	Aceh Tengah	Aceh
3	BKSDA Aceh	Reje Payung	Linge	Aceh Tengah	Aceh
4	BKSDA Aceh	Seuneubok Pusaka	Trumon Timur	Aceh Selatan	Aceh
5	BKSDA Aceh	Suka Jaya	Kuala Baru	Aceh Singkil	Aceh
6	BKSDA Aceh	Suka Makmur	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	Aceh
7	BBTN Gunung Leuser	Harapan Maju	Sei Lapan	Langkat	Sumatera Utara
8	BBTN Gunung Leuser	PIR ADB Besitang	Besitang	Langkat	Sumatera Utara
9	BBTN Gunung Leuser	Indra Damai	Kluet Selatan	Aceh Selatan	Aceh
10	BBTN Gunung Leuser	Pucuk Lembang	Kluet Timur	Aceh Selatan	Aceh
11	BBTN Gunung Leuser	Ujung Mangki	Bakongan	Aceh Selatan	Aceh
12	BBTN Gunung Leuser	Kuta Gajah	Bohorok	Langkat	Sumatera Utara
13	BBTN Gunung Leuser	Marpunge	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
14	BBTN Gunung Leuser	Ketambe	Ketambe	Aceh Tenggara	Aceh
15	BBTN Gunung Leuser	Bun Bun Indah	Leuser	Aceh Tenggara	Aceh
16	BBTN Gunung Leuser	Gumpang Lempuh	Putri Betung	Gayo Lues	Aceh
17	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Rau Utara	Nassau	Toba Samosir	Sumatera Utara
18	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Balik	Habinsaran	Toba Samosir	Sumatera Utara
19	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Lintong	Habinsaran	Toba Samosir	Sumatera Utara
20	BBKSDA Sumatera Utara	Selotong	Secanggang	Langkat	Sumatera Utara
21	BBKSDA Sumatera Utara	Secanggang	Secanggang	Langkat	Sumatera Utara
22	BBKSDA Sumatera Utara	Karya Maju	Tanjung Pura	Langkat	Sumatera Utara
23	BBKSDA Sumatera Utara	Paluh Kurau	Hamparan Perak	Deli Serdang	Sumatera Utara
24	BBKSDA Sumatera Utara	Parlombuan	Pangaribuan	Tapanuli Utara	Sumatera Utara
25	BBKSDA Sumatera Utara	Negeri Dolok	Dolok Panribuan	Simalungun	Sumatera Utara
26	BBKSDA Sumatera Utara	Marubun Lökkung	Dolok Silou	Simalungun	Sumatera Utara
27	BBKSDA Sumatera Utara	Batang Onang Baru	Batang Onang	Padang Lawas Utara	Sumatera Utara
28	BBKSDA Sumatera Utara	Bargot Topong	Padang Sidimpuan Batunadua	Kota Padang Sidimpuan	Sumatera Utara
29	BBKSDA Sumatera Utara	Aek Raso	Torgamba	Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara
30	BBKSDA Sumatera Utara	Hutabaru Siundol	Sosopan	Padang Lawas Utara	Sumatera Utara
31	BBKSDA Sumatera Utara	Sampean	Sipirok	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
32	BBKSDA Sumatera Utara	Bulu Mario	Sipirok	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
33	BBKSDA Sumatera Utara	Aek Sabaon	Marancar	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
34	BBKSDA Sumatera Utara	Bandar Baru	Siteu Tali Urang Jehe	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
35	BBKSDA Sumatera Utara	Kecupak II	Pergetteng-getteng Sengkut	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
36	BBKSDA Sumatera Utara	Lae Hole I	Parbuluan	Dairi	Sumatera Utara
37	BBKSDA Sumatera Utara	Lae Hole II	Tanjung Pura	Langkat	Sumatera Utara
38	BBKSDA Sumatera Utara	Rahutbosi	Pangaribuan	Tapanuli Utara	Sumatera Utara
39	BBKSDA Sumatera Utara	Nagori Dolok	Silou Kahean	Simalungun	Sumatera Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
40	BBKSDA Sumatera Utara	Simerpara	Pergetteng-getteng Sengkut	Pakpak Bharat	Sumatera Utara
41	BTN Batang Gadis	Habincaran	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	Sumatera Utara
42	BTN Batang Gadis	Hutapadang	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	Sumatera Utara
43	BTN Batang Gadis	Laru Bolak	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
44	BTN Batang Gadis	Pastap	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
45	BTN Batang Gadis	Muaramais	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
46	BTN Batang Gadis	Aek Ngali	Panyabungan Selatan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
47	BTN Batang Gadis	Simpang Duhu Dolok	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	Sumatera Utara
48	BTN Batang Gadis	Bangkelang	Batang Natal	Mandailing Natal	Sumatera Utara
49	BTN Batang Gadis	Huta Tinggi	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	Sumatera Utara
50	BTN Batang Gadis	Hutabaringin Julu	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	Sumatera Utara
51	BTN Batang Gadis	Soposorik	Kotanopan	Mandailing Natal	Sumatera Utara
52	BTN Batang Gadis	Huta Namale	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	Sumatera Utara
53	BBKSDA Riau	Tanjung Palas	Dumai Timur	Kota Dumai	Riau
54	BBKSDA Riau	Bukit Batrem	Dumai Timur	Kota Dumai	Riau
55	BBTN Kerinci Seblat	Pakan Rabaa Tengah	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	Sumatera Barat
56	BBTN Kerinci Seblat	Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	Sumatera Barat
57	BBTN Kerinci Seblat	Pakan Rabaa Utara Duo	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	Sumatera Barat
58	BBTN Kerinci Seblat	Kambang	Lengayang	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
59	BBTN Kerinci Seblat	Lakitan Tengah	Lengayang	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
60	BBTN Kerinci Seblat	Luak Kapau Alam Pauh Duo	Pauh Duo	Solok Selatan	Sumatera Barat
61	BBTN Kerinci Seblat	Lunang	Lunang	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
62	BBTN Kerinci Seblat	Napal Licin	Ulu Rawas	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
63	BBTN Kerinci Seblat	Pal VII	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	Bengkulu
64	BBTN Kerinci Seblat	Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
65	BBTN Kerinci Seblat	Persiapan Pakan Rabaa Utara Duo	KPGD	Solok Selatan	Sumatera Barat
66	BBTN Kerinci Seblat	Petanang Ulu	Lubuklinggau Utara I	Lubuklinggau	Sumatera Selatan
67	BBTN Kerinci Seblat	Sindang Lunang	Lunang	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
68	BBTN Kerinci Seblat	Sosokan	Ulu Rawas	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
69	BBTN Kerinci Seblat	Sumber Bening	Selupu Rejang	Rejang Lebong	Bengkulu
70	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Lalang	Lembah Masurai	Merangin	Jambi
71	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Telang	Bathin Ulu	Bungo	Jambi
72	BBTN Kerinci Seblat	Teratak Tempatih IV Koto Mudiek	Batang Kapas	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
73	BBTN Kerinci Seblat	Belui Tinggi	Depati Tujuh	Kerinci	Jambi
74	BBTN Kerinci Seblat	Betung Kuning	Sitinjau Laut	Kerinci	Jambi
75	BBTN Kerinci Seblat	Pangkalan Jambu	Pangkalan Jambu	Merangin	Jambi
76	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Betung Inderapura	Airpura	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
77	BBTN Kerinci Seblat	Pelangai Kaciak	Ranah Pesisir	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
78	BBTN Kerinci Seblat	Talang Balarik Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
79	BKSDA Sumatera Barat	Sikucur Utara	V Koto Kampung Dalam	Padang Pariaman	Sumatera Barat
80	BKSDA Sumatera Barat	Kubang Koto Barapak	Bayang	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
81	BKSDA Sumatera Barat	Andaleh Baruh Bukik	Sungayang	Tanah Datar	Sumatera Barat
82	BKSDA Sumatera Barat	Langki	Tanjung Gadang	Sijunjung	Sumatera Barat
83	BKSDA Sumatera Barat	Sungai Lansek	Kamang Baru	Sijunjung	Sumatera Barat
84	BKSDA Sumatera Barat	Sitanang	Ampek Nagari	Agam	Sumatera Barat
85	BKSDA Sumatera Barat	Lasi	Canduang	Agam	Sumatera Barat
86	BKSDA Sumatera Barat	Tanjung Sani		Agam	Sumatera Barat
87	BKSDA Sumatera Barat	Panti	Panti	Pasaman	Sumatera Barat
88	BKSDA Sumatera Barat	Panti Selatan	Panti	Pasaman	Sumatera Barat
89	BKSDA Sumatera Barat	Lubuk Karak	Sembilan Koto	Dharmasraya	Sumatera Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
90	BKSDA Sumatera Barat	Kasang	Batang Anai	Padang pariaman	Sumatera Barat
91	BKSDA Sumatera Barat	Limau Manis Selatan	Pauh	Padang	Sumatera Barat
92	BKSDA Sumatera Barat	Pariangan	Pariangan	Tanah Datar	Sumatera Barat
93	BKSDA Sumatera Barat	Lubuk Alung	Lubuk Alung	Padang pariaman	Sumatera Barat
94	BKSDA Sumatera Barat	Silago	Sembilan Koto	Dharmasraya	Sumatera Barat
95	BKSDA Sumatera Barat	Koto Gaek Guguk	Gunung Talang	Solok	Sumatera Barat
96	BKSDA Sumatera Barat	Sungai Batuang	Kamang Baru	Sijunjung	Sumatera Barat
97	BKSDA Jambi	Pintas Tuo	Muara Tabir	Tebo	Jambi
98	BTN Bukit Duabelas	Desa Baru	Air Hitam	Sarolangun	Jambi
99	BTN Bukit Duabelas	Jernih	Air Hitam	Sarolangun	Jambi
100	BKSDA Sumatera Selatan	Durian Dangkal	Mulak Sebingkai	Lahat	Sumatera Selatan
101	BKSDA Sumatera Selatan	Lubuk Nipis	Panang Enim	Muara Enim	Sumatera Selatan
102	BKSDA Sumatera Selatan	Keluang	Tungkal Ilir	Banyuasin	Sumatera Selatan
103	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Merindu	Merapi Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
104	BKSDA Sumatera Selatan	Talang Akar	Merapi Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
105	BKSDA Sumatera Selatan	Lubuk Pedaro	Merapi Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
106	BKSDA Sumatera Selatan	Pagar Dewa	Tanjung Agung	Muara Enim	Sumatera Selatan
107	BKSDA Sumatera Selatan	Muara Emil	Tanjung Agung	Muara Enim	Sumatera Selatan
108	BKSDA Sumatera Selatan	Embawang	Tanjung Agung	Muara Enim	Sumatera Selatan
109	BKSDA Sumatera Selatan	Lesung Batu	Pagar Gunung	Lahat	Sumatera Selatan
110	BKSDA Sumatera Selatan	Bandu Agung	Muara Payang	Lahat	Sumatera Selatan
111	BKSDA Sumatera Selatan	Pamah Salak	Jarai	Lahat	Sumatera Selatan
112	BKSDA Sumatera Selatan	Sadan	Jarai	Lahat	Sumatera Selatan
113	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Bumi	Pajar Bulan	Lahat	Sumatera Selatan
114	BKSDA Sumatera Selatan	Bantunan	Pajar Bulan	Lahat	Sumatera Selatan
115	BKSDA Sumatera Selatan	Sinjar Bulan	Gumay Ulu	Lahat	Sumatera Selatan
116	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Jadi	Pseksu	Lahat	Sumatera Selatan
117	BKSDA Sumatera Selatan	Batu Niding	Pseksu	Lahat	Sumatera Selatan
118	BKSDA Sumatera Selatan	Tanjung Raya	Pseksu	Lahat	Sumatera Selatan
119	BKSDA Sumatera Selatan	Beringin Janggut	Kikim Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
120	BKSDA Sumatera Selatan	Keban Agung	Kikim Selatan	Lahat	Sumatera Selatan
121	BKSDA Sumatera Selatan	Muara Cawang	Pseksu	Lahat	Sumatera Selatan
122	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Raja	Suka Merindu	Lahat	Sumatera Selatan
123	BKSDA Sumatera Selatan	Ulak Pandan	Merapi Barat	Lahat	Sumatera Selatan
124	BKSDA Sumatera Selatan	Pangkalniur	Riau Silip	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
125	BKSDA Sumatera Selatan	Riau	Riau Silip	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
126	BKSDA Sumatera Selatan	Berbura	Riau Silip	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
127	BKSDA Sumatera Selatan	Riding Panjang	Belinyu	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
128	BKSDA Sumatera Selatan	Tuik	Kelapa	Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung
129	BKSDA Sumatera Selatan	Tanjung Niur	Tempilang	Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung
130	BKSDA Sumatera Selatan	Air Menduyung	Simpang Teritip	Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung
131	BKSDA Sumatera Selatan	Permis	Simpang Rimba	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung
132	BKSDA Sumatera Selatan	Gudang	Simpang Rimba	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung
133	BKSDA Sumatera Selatan	Merindu	Pagar Gunung	Lahat	Sumatera Selatan
134	BTN Berbak dan Sembilang	Sungai Sayang	Sadu	Tanjung Jabung Timur	Jambi
135	BKSDA Bengkulu	Suka Negeri	Bangkunat	Pesisir Barat	Lampung
136	BKSDA Bengkulu	Bandung Jaya	Kaba Wetan	Kepahiang	Bengkulu
137	BKSDA Bengkulu	Suka Merindu	Marga Sakti Sebelat	Bengkulu Utara	Bengkulu
138	BKSDA Bengkulu	Air Dingin	Sindang Kelingi	Rejang Lebong	Bengkulu
139	BKSDA Bengkulu	Koto Jaya	Kota Mukomuko	Muko muko	Bengkulu
140	BKSDA Bengkulu	Kaana	Enggano	Bengkulu Utara	Bengkulu
141	BKSDA Bengkulu	Rawa Indah	Iilir Talo	Seluma	Bengkulu
142	BKSDA Bengkulu	Ketapang Baru	Semidang Alas Maras	Seluma	Bengkulu
143	BKSDA Bengkulu	Riak Siabun	Sukaraja	Seluma	Bengkulu
144	BKSDA Bengkulu	Pagar Gunung	Semidang Lagan	Bengkulu Tengah	Bengkulu
145	BKSDA Bengkulu	Surabaya	Muara Bangkahulu	Bengkulu	Bengkulu
146	BKSDA Bengkulu	Arang Sapat	Lubuk Sandi	Seluma	Bengkulu
147	BKSDA Bengkulu	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	Seluma	Bengkulu
148	BBTN Bukit Barisan Selatan	Karang Brak	Pematang Sawa	Tanggamus	Lampung
149	BBTN Bukit Barisan Selatan	Margomulyo	Semaka	Tanggamus	Lampung
150	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tulung Asahan	Semaka	Tanggamus	Lampung
151	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pesanguan	Way Nipah	Tanggamus	Lampung
152	BBTN Bukit Barisan Selatan	Siring Gading	Bangkunat	Pesisir Barat	Lampung
153	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sumur Jaya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	Lampung
154	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tanjung Setia	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	Lampung
155	BBTN Bukit Barisan Selatan	Gunung Kemala	Way Krui	Pesisir Barat	Lampung
156	BBTN Bukit Barisan Selatan	Gunung Kemala Timur	Way Krui	Pesisir Barat	Lampung
157	BBTN Bukit Barisan Selatan	Ulu Krui	Way Krui	Pesisir Barat	Lampung
158	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tembelang	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat	Lampung
159	BBTN Bukit Barisan Selatan	Bukit Makmur	Muara Sahung	Kaur	Lampung
160	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sukadamai	Air Hitan	Lampung Barat	Lampung
161	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sedampah Indah	Balik Bukit	Lampung Barat	Lampung
162	BBTN Bukit Barisan Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	Lampung

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
163	BBTN Bukit Barisan Selatan	Penengahan	Lemong	Pesisir Barat	Lampung
164	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pasar Jum'at	Nasal	Kaur	Bengkulu
165	BBTN Bukit Barisan Selatan	Cinta Makmur	Muara Sahung	Kaur	Bengkulu
166	BBTN Bukit Barisan Selatan	Serimenanti	Makakau Ilir	OKU Selatan	Sumatera Selatan
167	BTN Gunung Halimun Salak	Margalaksana	Cikakak	Sukabumi	Jawa Barat
168	BTN Gunung Halimun Salak	Wanajaya	Cisolok	Sukabumi	Jawa Barat
169	BTN Gunung Halimun Salak	Bantarkaret	Nanggung	Bogor	Jawa Barat
170	BTN Gunung Halimun Salak	Majasari	Sobang	Lebak	Banten
171	BTN Gunung Halimun Salak	Pasir Haur	Cipanas	Lebak	Banten
172	BTN Gunung Halimun Salak	Hegarmanah	Cibeber	Lebak	Banten
173	BTN Gunung Halimun Salak	Sukamulya	Cibeber	Lebak	Banten
174	BTN Gunung Halimun Salak	Cihambali	Cibeber	Lebak	Banten
175	BTN Gunung Halimun Salak	Sukamaju	Sobang	Lebak	Banten
176	BTN Gunung Halimun Salak	Cisarua	Sukajaya	Bogor	Jawa Barat
177	BTN Gunung Halimun Salak	Cipanas	Cipanas	Lebak	Banten
178	BTN Gunung Halimun Salak	Kujangsari	Cibeber	Lebak	Banten
179	BTN Gunung Halimun Salak	Kujangjaya	Cibeber	Lebak	Banten
180	BTN Gunung Halimun Salak	Sobang	Sobang	Lebak	Banten
181	BTN Gunung Halimun Salak	Gununggede	Panggarangan	Lebak	Banten
182	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cinagara	Caringin	Bogor	Jawa Barat
183	BBTN Gunung Gede Pangrango	Pancawati	Caringin	Bogor	Jawa Barat
184	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukaresmi	Megamendung	Bogor	Jawa Barat
185	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cibedug	Ciawi	Bogor	Jawa Barat
186	BBTN Gunung Gede Pangrango	Wangunjaya	Ciambar	Sukabumi	Jawa Barat
187	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ginjar	Ciambar	Sukabumi	Jawa Barat
188	BBTN Gunung Gede Pangrango	Babakan Panjang	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat
189	BBTN Gunung Gede Pangrango	Pawenang	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat
190	BBTN Gunung Gede Pangrango	Undrusbinangun	Kadudampit	Sukabumi	Jawa Barat
191	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukamulya	Cugenang	Cianjur	Jawa Barat
192	BBKSDA Jawa Barat	Sarimukti	Pasirwangi	Garut	Jawa Barat
193	BBKSDA Jawa Barat	Panjiwangi	Tarogong Kaler	Garut	Jawa Barat
194	BBKSDA Jawa Barat	Batukuwung	Padarincang	Serang	Banten
195	BBKSDA Jawa Barat	Bojong Koneng	Babakan Madang	Bogor	Jawa Barat
196	BBKSDA Jawa Barat	Campakawarna	Campakamulya	Cianjur	Jawa Barat
197	BBKSDA Jawa Barat	Cikawao	Pacet	Bandung	Jawa Barat
198	BBKSDA Jawa Barat	Cikupa	Lumbung	Ciamis	Jawa Barat
199	BBKSDA Jawa Barat	Cilangkap	Buahdua	Sumedang	Jawa Barat
200	BBKSDA Jawa Barat	Karang Tengah	Babakan Madang	Bogor	Jawa Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
201	BBKSDA Jawa Barat	Karyamekar	Pasirwangi	Garut	Jawa Barat
202	BBKSDA Jawa Barat	Laksana	Ibun	Bandung	Jawa Barat
203	BBKSDA Jawa Barat	Nagrog	Cicalengka	Bandung	Jawa Barat
204	BBKSDA Jawa Barat	Pamokolan	Cihaurbeuti	Ciamis	Jawa Barat
205	BBKSDA Jawa Barat	Rancasanggal	Cinangka	Serang	Banten
206	BBKSDA Jawa Barat	Sukahurip	Cihaurbeuti	Ciamis	Jawa Barat
207	BBKSDA Jawa Barat	Sukamenak	Wanaraja	Garut	Jawa Barat
208	BTN Gunung Ciremai	Sayana	Jalaksana	Kuningan	Jawa Barat
209	BTN Gunung Ciremai	Pasawahan	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
210	BTN Gunung Ciremai	Padaherang	Sindangwangi	Majalengka	Jawa Barat
211	BTN Gunung Ciremai	Gunungmanik	Talaga	Majalengka	Jawa Barat
212	BTN Gunung Ciremai	Bantaragung	Sindangwangi	Majalengka	Jawa Barat
213	BTN Gunung Ciremai	Argalingga	Argapura	Majalengka	Jawa Barat
214	BTN Gunung Ciremai	Indrakila	Sindang	Majalengka	Jawa Barat
215	BTN Gunung Ciremai	Puncak	Cigugur	Kuningan	Jawa Barat
216	BTN Gunung Ciremai	Setianegara	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
217	BTN Gunung Ciremai	Seda	Mandirancan	Kuningan	Jawa Barat
218	BTN Gunung Ciremai	Linggasana	Cilimus	Kuningan	Jawa Barat
219	BTN Gunung Ciremai	Padabeunghar	Pasawahan	Kuningan	Jawa Barat
220	BTN Gunung Ciremai	Cisantana	Cigugur	Kuningan	Jawa Barat
221	BKSDA Jawa Tengah	Banyumudal	Sawal	Moga	Jawa Tengah
222	BKSDA Jawa Tengah	Nglebak	Tawamangu	Karanganyar	Jawa Tengah
223	BKSDA Jawa Tengah	Sawal	Sale	Banjarnegara	Jawa Tengah
224	BKSDA Jawa Tengah	Jambeyan	Sambirejo	Sragen	Jawa Tengah
225	BKSDA Jawa Tengah	Banyumanis	Donorojo	Jepara	Jawa Tengah
226	BTN Gunung Merbabu	Tarubatang	Selo	Boyolali	Jawa Tengah
227	BTN Gunung Merbabu	Ngagrang	Gladagsari	Boyolali	Jawa Tengah
228	BTN Gunung Merbabu	Tajuk	Getasan	Semarang	Jawa Tengah
229	BTN Gunung Merbabu	Jogonayan	Ngablak	Magelang	Jawa Tengah
230	BTN Gunung Merbabu	Pogalan	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
231	BTN Gunung Merbabu	Bawang	Pakis	Magelang	Jawa Tengah
232	BKSDA Yogyakarta	Kepek	Saptosari	Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta
233	BTN Gunung Merapi	Purwobinangun	Pakem	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
234	BTN Gunung Merapi	Cluntang	Musuk	Boyolali	Jawa Tengah
235	BTN Gunung Merapi	Mriyan	Tamansari	Boyolali	Jawa Tengah
236	BTN Gunung Merapi	Girikerto	Turi	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
237	BTN Gunung Merapi	Wonokerto	Turi	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
238	BTN Gunung Merapi	Hargobinangun	Pakem	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
239	BTN Gunung Merapi	Sidorejo	Kemalang	Klaten	Jawa Tengah
240	BTN Gunung Merapi	Ngargosoko	Srumbung	Magelang	Jawa Tengah
241	BBKSDA Jawa Timur	Asmorobangun	Puncu	Kediri	Jawa Timur
242	BBKSDA Jawa Timur	Satak	Puncu	Kediri	Jawa Timur
243	BBTN Bromo Tengger Semeru	Senduro	Senduro	Lumajang	Jawa Timur
244	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ranupani	Senduro	Lumajang	Jawa Timur
245	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ngadisari	Sukopuro	Probolinggo	Jawa Timur
246	BTN Meru Betiri	Kebonrejo	Kalibaru	Banyuwangi	Jawa Timur
247	BTN Meru Betiri	Karangharjo	Glenmore	Banyuwangi	Jawa Timur
248	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Sangiang	Wera	Bima	Nusa Tenggara Barat
249	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Desaloka	Seteluk	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
250	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Seloto	Taliwang	Sumba Barat	Nusa Tenggara Barat

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
251	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Pelangan	Sekotong	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
252	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Labuhan Aji	Labuhan Badas	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
253	BTN Tambora	Boro	Sanggar	Bima	Nusa Tenggara Barat
254	BTN Tambora	Oi Katupa	Tambora	Bima	Nusa Tenggara Barat
255	BTN Tambora	Sori tatanga	Pekat	Dompu	Nusa Tenggara Barat
256	BTN Tambora	Calabai	Pekat	Dompu	Nusa Tenggara Barat
257	BTN Tambora	Doropeti	Pekat	Dompu	Nusa Tenggara Barat
258	BTN Tambora	Sorinomo	Pekat	Dompu	Nusa Tenggara Barat
259	BTN Tambora	Oi Saro	Sanggar	Bima	Nusa Tenggara Barat
260	BTN Tambora	Tolokalo	Kempo	Dompu	Nusa Tenggara Barat
261	BTN Tambora	Kawinda Nae	Tambora	Bima	Nusa Tenggara Barat
262	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Oesapa	Kelapa Lima	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
263	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Barada	Malaka Tengah	Malaka	Nusa Tenggara Timur
264	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kateri	Malaka Tengah	Malaka	Nusa Tenggara Timur
265	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kamanasa	Malaka Tengah	Malaka	Nusa Tenggara Timur
266	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Wehali	Malaka Tengah	Malaka	Nusa Tenggara Timur
267	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Enoraen	Amarasi Timur	Kupang	Nusa Tenggara Timur
268	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Camplong I	Fatuleu	Kupang	Nusa Tenggara Timur
269	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Camplong II	Fatuleu	Kupang	Nusa Tenggara Timur
270	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Sulamu	Sulamu	Kupang	Nusa Tenggara Timur
271	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Tanah Merah	Kupang Tengah	Kupang	Nusa Tenggara Timur
272	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Pantai Beringin	Sulamu	Kupang	Nusa Tenggara Timur
273	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Mata Air	Kupang Tengah	Kupang	Nusa Tenggara Timur
274	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Alor Besar	Alor Barat Laut	Alor	Nusa Tenggara Timur
275	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Darat Pantai	Talibura	Sikka	Nusa Tenggara Timur
276	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kamot	Alor Timur Laut	Alor	Nusa Tenggara Timur
277	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kloangpopot	Doreng	Sikka	Nusa Tenggara Timur
278	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Lainyanyar	Pinu Pahar	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
279	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Tandula Jangga	Karera	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
280	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Manurara	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
281	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Waimanu	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
282	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Kambatawundut	Lewa	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
283	BKSDA Kalimantan Barat	Bengkilu	Tujuh Belas	Bengkayang	Kalimantan Barat
284	BKSDA Kalimantan Barat	Keramat Jaya	Kendawangan	Ketapang	Kalimantan Barat
285	BKSDA Kalimantan Barat	Santaban	Sajingan Besar	Sambas	Kalimantan Barat
286	BKSDA Kalimantan Barat	Simpang Kasturi	Mandor	Landak	Kalimantan Barat
287	BKSDA Kalimantan Barat	Tapen	Suti Semarang	Bengkayang	Kalimantan Barat
288	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Nusa Poring	Menukung	Melawi	Kalimantan Tengah
289	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Belaban Ella	Menukung	Melawi	Kalimantan Tengah
290	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Nanga Jelundung	Serawai	Sintang	Kalimantan Tengah
291	BTN Gunung Palung	Sejahtera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
292	BTN Gunung Palung	Pangkalan Buton	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
293	BTN Gunung Palung	Sedahan Jaya	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat
294	BKSDA Kalimantan Tengah	Bukit Liti	Kahayan Tengah	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
295	BKSDA Kalimantan Tengah	Humbang Raya	Mantangai	Kapuas	Kalimantan Tengah
296	BKSDA Kalimantan Tengah	Lahei Mangkutup	Mantangai	Kapuas	Kalimantan Tengah
297	BKSDA Kalimantan Tengah	Garung	Jabiren Raya	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
298	BKSDA Kalimantan Tengah	Tuwung	Kahayan Tengah	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
299	BKSDA Kalimantan Tengah	Muara Ripung	Dusun Selatan	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
300	BKSDA Kalimantan Tengah	Danau Masura	Dusun Selatan	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
301	BKSDA Kalimantan Tengah	Madara	Dusun Selatan	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
302	BKSDA Kalimantan Tengah	Kalahien (Dusun Parigi)	Dusun Selatan	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
303	BKSDA Kalimantan Tengah	Baru (Dusun Bambaler)	Dusun Selatan	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
304	BTN Tanjung Puting	Banua Usang	Danau Sembuluh	Seruyan	Kalimantan Tengah
305	BTN Tanjung Puting	Kubu	Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
306	BTN Tanjung Puting	Muara Dua	Seruyan Hilir	Seruyan	Kalimantan Tengah
307	BTN Tanjung Puting	Paren	Danau Sembuluh	Seruyan	Kalimantan Tengah
308	BTN Tanjung Puting	Sekonyer	Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
309	BTN Tanjung Puting	Sungai Cabang	Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
310	BTN Tanjung Puting	Tanjung Hanau	Hanau	Seruyan	Kalimantan Tengah
311	BTN Sebangau	Karuing	Kamipang	Katingan	Kalimantan Tengah
312	BTN Sebangau	Sebangau Mulya	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
313	BTN Sebangau	Sebangau Jaya	Sebangau Jaya	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
314	BKSDA Kalimantan Timur	Bukit Jering	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
315	BKSDA Kalimantan Timur	Empakuq	Melak	Kutai Barat	Kalimantan Timur
316	BKSDA Kalimantan Timur	Liang Buaya	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
317	BKSDA Kalimantan Timur	Random	Tanjung Harapan	Paser	Kalimantan Timur
318	BKSDA Kalimantan Timur	Sedulang	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
319	BKSDA Kalimantan Timur	Segendang	Batu Engau	Paser	Kalimantan Timur
320	BKSDA Kalimantan Timur	Sumber Rejo	Sekolaq Darat	Kutai Barat	Kalimantan Timur
321	BKSDA Kalimantan Timur	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Berau	Kalimantan Timur
322	BTN Kayan Mentarang	Tau Lumbis	Lumbis Hulu	Nunukan	Kalimantan Utara
323	BTN Kayan Mentarang	Pa' Kidang	Krayan Barat	Nunukan	Kalimantan Utara
324	BTN Kayan Mentarang	Pa' Butal	Krayan Barat	Nunukan	Kalimantan Utara
325	BTN Kayan Mentarang	Wa' Yagung	Krayan Timur	Nunukan	Kalimantan Utara
326	BTN Kayan Mentarang	Pa' Betung	Krayan Timur	Nunukan	Kalimantan Utara
327	BTN Kayan Mentarang	Long Belaka Pitau	Pujungan	Malinau	Kalimantan Utara
328	BTN Kayan Mentarang	Long Ketaman	Pujungan	Malinau	Kalimantan Utara
329	BTN Bantimurung Bulusaraung	Sambueja	Simbang	Maros	Sulawesi Selatan
330	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kalabbirang	Bantimurung	Maros	Sulawesi Selatan
331	BTN Bantimurung Bulusaraung	Balleangin	Balocci	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
332	BTN Bantimurung Bulusaraung	Jenetaesa	Simbang	Maros	Sulawesi Selatan
333	BTN Bantimurung Bulusaraung	Leang-leang	Bantimurung	Maros	Sulawesi Selatan
334	BTN Bantimurung Bulusaraung	Mariopulana	Camba	Maros	Sulawesi Selatan
335	BTN Bantimurung Bulusaraung	Timpuseng	Camba	Maros	Sulawesi Selatan
336	BTN Bantimurung Bulusaraung	Baji Pamai	Cenrana	Maros	Sulawesi Selatan
337	BTN Bantimurung Bulusaraung	Pattiro Deceng	Camba	Maros	Sulawesi Selatan
338	BTN Bantimurung Bulusaraung	Limapoccoe	Cenrana	Maros	Sulawesi Selatan
339	BTN Bantimurung Bulusaraung	Cempaniga	Camba	Maros	Sulawesi Selatan
340	BTN Bantimurung Bulusaraung	Mattampa Pole	Mallawa	Maros	Sulawesi Selatan
341	BTN Bantimurung Bulusaraung	Sabila	Mallawa	Maros	Sulawesi Selatan
342	BTN Bantimurung Bulusaraung	Samaenre	Tellulimpoe	Bone	Sulawesi Selatan
343	BTN Bantimurung Bulusaraung	Polewali	Tellulimpoe	Bone	Sulawesi Selatan
344	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kassi	Balocci	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
345	BTN Bantimurung Bulusaraung	Balocci Baru	Balocci	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
346	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bontoa	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
347	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bontokio	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
348	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kalabirang	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
349	BTN Bantimurung Bulusaraung	Minasatene	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
350	BTN Bantimurung Bulusaraung	Pabundukang / Tonasa	Pangka Jene	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
351	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bontomasunggu	Tellu Limpoe	Bone	Sulawesi Selatan
352	BTN Bantimurung Bulusaraung	Lanne	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
353	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto Birao	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
354	BTN Bantimurung Bulusaraung	Malaka	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
355	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kalabirang (Camba)	Bantimurung	Maros	Sulawesi Selatan
356	BTN Bantimurung Bulusaraung	Toddolimae	Tompo Bulu	Maros	Sulawesi Selatan
357	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto manai	Tompo Bulu	Maros	Sulawesi Selatan
358	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto Somba	Tompo Bulu	Maros	Sulawesi Selatan
359	BTN Bantimurung Bulusaraung	Lebbotengngae	Cenrana	Maros	Sulawesi Selatan
360	BTN Bantimurung Bulusaraung	Laiya	Cenrana	Maros	Sulawesi Selatan
361	BTN Bantimurung Bulusaraung	Campaniga	Camba	Maros	Sulawesi Selatan
362	BKSDA Sulawesi Tengah	Balukang II	Sojol	Donggala	Sulawesi Tengah
363	BKSDA Sulawesi Tengah	Santigi	Ongka Malino	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
364	BKSDA Sulawesi Tengah	Labonu	Basidondo	Toli Toli	Sulawesi Tengah
365	BKSDA Sulawesi Tengah	Pandayora	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah
366	BKSDA Sulawesi Tengah	Karya Mandiri	Bolano Lambunu	Rarigi Moutong	Sulawesi Tengah
367	BKSDA Sulawesi Tengah	Matube	Bungku Utara	Morowali	Sulawesi Tengah
368	BKSDA Sulawesi Tengah	Tabarano	Mori Utara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
369	BKSDA Sulawesi Tengah	Tiwaa	Mori Utara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
370	BKSDA Sulawesi Tengah	Taronggo	Bungku Utara	Morowali	Sulawesi Tengah
371	BKSDA Sulawesi Tengah	Tirongan Atas	Bungku Utara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
372	BKSDA Sulawesi Tengah	Meko	Pamona Barat	Poso	Sulawesi Tengah
373	BKSDA Sulawesi Tengah	Taipa	Pamona Barat	Poso	Sulawesi Tengah
374	BKSDA Sulawesi Tengah	Mayasari	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah
375	BKSDA Sulawesi Tengah	Manimbaya	Balaesang Tanjung	Donggala	Sulawesi Tengah
376	BKSDA Sulawesi Tengah	Lakuan Buol	Lakea	Buol	Sulawesi Tengah
377	BKSDA Sulawesi Tengah	Ganda-Ganda	Petasia	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
378	BKSDA Sulawesi Tengah	Mayajaya	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah
379	BKSDA Sulawesi Tengah	Lembontonara	Mori Utara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
380	BKSDA Sulawesi Tengah	Tamainusi	Soyo Jaya	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
381	BKSDA Sulawesi Tengah	Buyumpondoli	Pamona Puselemba	Poso	Sulawesi Tengah
382	BBTN Lorelindu	Omu	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
383	BBTN Lorelindu	Pakuli	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
384	BBTN Lorelindu	Pakuli Utara	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
385	BBTN Lorelindu	Simoro	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
386	BBTN Lorelindu	Tuva	Gumbasa	Sigi	Sulawesi Tengah
387	BBTN Lorelindu	Wanga	Lore Peore	Poso	Sulawesi Tengah
388	BBTN Lorelindu	Siliwanga	Lore Peore	Poso	Sulawesi Tengah
389	BBTN Lorelindu	Watutau	Lore Peore	Poso	Sulawesi Tengah
390	BBTN Lorelindu	Bunga	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
391	BBTN Lorelindu	Kapirooe	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
392	BBTN Lorelindu	Sigimpu	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
393	BBTN Lorelindu	Baku-bakulu	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
394	BBTN Lorelindu	Bobo	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
395	BBTN Lorelindu	Bolapapu	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
396	BBTN Lorelindu	Salua	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
397	BBTN Lorelindu	Namo	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
398	BBTN Lorelindu	Mataue	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
399	BBTN Lorelindu	Sungku	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
400	BBTN Lorelindu	Marena	Kulawi	Sigi	Sulawesi Tengah
401	BBTN Lorelindu	O'o	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
402	BBTN Lorelindu	Watukilo	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
403	BBTN Lorelindu	Tompi Bugis	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
404	BBTN Lorelindu	Gimpu	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
405	BBTN Lorelindu	Pilimakujawa	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
406	BBTN Lorelindu	Moa	Kulawi Selatan	Sigi	Sulawesi Tengah
407	BTN Kep. Togean	Taningkola	Una una	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
408	BTN Kep. Togean	Tumbulawa	Batudaka	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
409	BTN Kep. Togean	Tanjung Pude	Una una	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
410	BTN Kep. Togean	Tanimpopo	Una una	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
411	BTN Kep. Togean	Siatu	Batudaka	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
412	BTN Kep. Togean	Salinggoha	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
413	BTN Kep. Togean	Dolong A	Walea Kepulauan	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
414	BTN Kep. Togean	Biga	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
415	BTN Kep. Togean	Urulepe	Togean	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
416	BTN Kep. Togean	Tobil	Togean	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
417	BTN Kep. Togean	Katupat	Togean	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
418	BTN Kep. Togean	Bangkagi	Togean	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
419	BTN Kep. Togean	Awo	Togean	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
420	BTN Kep. Togean	Kalia	Talatako	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
421	BTN Kep. Togean	Pautu	Talatako	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
422	BTN Kep. Togean	Kololio	Togean	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
423	BTN Kep. Togean	Dolong B	Walea Kepulauan	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
424	BTN Kep. Togean	Pasokan	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
425	BTN Kep. Togean	Kondongan	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah
426	BKSDA Sulawesi Utara	Maleo	Paguat	Pahuwato	Gorontalo
427	BTN Boganinani Wartabone	Ayong	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
428	BTN Boganinani Wartabone	Imandi	Dumoga Timur	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
429	BTN Boganinani Wartabone	Pusian Barat	Dumoga	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
430	BTN Boganinani Wartabone	Werdhi Agung Timur	Dumoga Tengah	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
431	BTN Boganinani Wartabone	Lolanan	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
432	BTN Boganinani Wartabone	Toraut	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
433	BTN Boganinani Wartabone	Konarom Utara	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
434	BTN Boganinani Wartabone	Pusian Selatan	Dumoga	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
435	BTN Boganinani Wartabone	Botuliodu	Tomini	Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
436	BTN Boganinani Wartabone	Maelang	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
437	BTN Boganinani Wartabone	Suka Makmur	Bulango Ulu	Bone Bolango	Gorontalo
438	BTN Boganinani Wartabone	Pilolaheya	Bulango Ulu	Bone Bolango	Gorontalo
439	BTN Boganinani Wartabone	Tinemba	Suwawa Timur	Bone Bolango	Gorontalo
440	BTN Boganinani Wartabone	Tulabolo Timur	Suwawa Timur	Bone Bolango	Gorontalo
441	BTN Boganinani Wartabone	Konarom Barat	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
442	BTN Boganinani Wartabone	Ikhwan	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
443	BTN Boganinani Wartabone	Permata	Bone	Bone Bolango	Gorontalo
444	BTN Boganinani Wartabone	Pinogu	Pinogu	Bone Bolango	Gorontalo
445	BTN Bunaken	Arakan	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
446	BTN Bunaken	Pungkol	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
447	BTN Bunaken	Popareng	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
448	BTN Bunaken	Poopoh	Tombariri	Minahasa	Sulawesi Utara
449	BTN Bunaken	Pinasungkulan	Tombariri	Minahasa	Sulawesi Utara
450	BTN Bunaken	Raprap	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
451	BTN Bunaken	Alung Banea	Bunaken Kepulauan	Kota Manado	Sulawesi Utara
452	BTN Bunaken	Wawontulap	Tatapaan	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
453	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lambang	Kolono Timur	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
454	BKSDA Sulawesi Tenggara	Langkoroni	Maligano	Muna	Sulawesi Tenggara
455	BKSDA Sulawesi Tenggara	Maligano	Maligano	Muna	Sulawesi Tenggara
456	BKSDA Sulawesi Tenggara	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara	Sulawesi Tenggara
457	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sarandua	Kolono Timur	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
458	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambeanga	Laonti	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
459	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambolosu	Laonti	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
460	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tapunopaka	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
461	BKSDA Sulawesi Tenggara	Waoleona	Lasalimu	Buton	Sulawesi Tenggara
462	BKSDA Sulawesi Tenggara	Konawehea	Samaturu	Kolaka	Sulawesi Tenggara
463	BTN Rawa Aopa Watumohai	Onemanu	Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
464	BTN Rawa Aopa Watumohai	Bou	Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
465	BTN Rawa Aopa Watumohai	Iwoikondo	Loea	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
466	BTN Rawa Aopa Watumohai	Wungguloko	Ladongi	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
467	BTN Rawa Aopa Watumohai	Mataiwoi	Onembute	Konawe	Sulawesi Tenggara
468	BTN Rawa Aopa Watumohai	Ahuawali	Puriala	Konawe	Sulawesi Tenggara
469	BTN Rawa Aopa Watumohai	Padaleu	Lalembu	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
470	BTN Rawa Aopa Watumohai	Tinabite	Lantari Jaya	Bombana	Sulawesi Tenggara
471	BTN Rawa Aopa Watumohai	Unggulino	Puriala	Konawe	Sulawesi Tenggara
472	BTN Rawa Aopa Watumohai	Puulipu	Angata	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
473	BTN Rawa Aopa Watumohai	Roraya	Tinanggea	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
474	BTN Wakatobi	Mandati III	Wangi-wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
475	BTN Wakatobi	Mandati I	Wangi-wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
476	BTN Wakatobi	Popalia	Togo Binongko	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
477	BTN Wakatobi	Sowa	Togo Binongko	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
478	BTN Wakatobi	Wali	Binongko	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
479	BKSDA Maluku	Adaut	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku
480	BKSDA Maluku	Kailolo	Pulau Haruku	Maluku Tengah	Maluku
481	BKSDA Maluku	Algadang	Aru Tengah	Kepulauan Aru	Maluku
482	BKSDA Maluku	Panamboang	Bacan Selatan	Halmahera Selatan	Maluku
483	BKSDA Maluku	Tabangame	Bacan Timur	Halmahera Selatan	Maluku
484	BKSDA Maluku	Warbal	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
485	BKSDA Maluku	Ur Pulau	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
486	BKSDA Maluku	Ohoisomlain	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
487	BKSDA Maluku	Ohoidertutu	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
488	BKSDA Maluku	Ohoiren	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
489	BKSDA Maluku	Ohoi Madwaer	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
490	BKSDA Maluku	Ohoidertom	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	Maluku
491	BTN Aketajawe Lolobata	Tabanalow	Wasile Selatan	Halmahera Timur	Maluku Utara

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
492	BTN Aketajawe Lolobata	Rioribati	Jailolo Selatan	Halmahera Barat	Maluku Utara
493	BTN Manusela	Air Besar	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
494	BTN Manusela	Elemata	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
495	BTN Manusela	Pasahari	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku
496	BTN Manusela	Saunulu	Tehoru	Maluku Tengah	Maluku
497	BTN Manusela	Yaputih	Tehoru	Maluku Tengah	Maluku
498	BTN Manusela	Hatumete	Tehoru	Maluku Tengah	Maluku
499	BBKSDA Papua Barat	Giwu	Klaurung	Kota Sorong	Papua Barat
500	BBKSDA Papua Barat	Srahwata	Klaurung	Kota Sorong	Papua Barat
501	BBKSDA Papua Barat	Lusiperi	Fak-fak	Fak fak	Papua Barat
502	BBKSDA Papua Barat	Gewerpe	Fak-fak	Fak fak	Papua Barat
503	BBKSDA Papua Barat	Mananmur	Kayauni	Fak fak	Papua Barat
504	BBKSDA Papua Barat	Kaironi	Sidey	Manokwari	Papua Barat
505	BBKSDA Papua Barat	Sidey	Sidey	Manokwari	Papua Barat
506	BBKSDA Papua Barat	Ibe	Fef	Tambrau	Papua Barat
507	BBKSDA Papua Barat	Ayapokiar	Miyah	Tambrau	Papua Barat
508	BBKSDA Papua Barat	Tabamsere	Miyah	Tambrau	Papua Barat
509	BBKSDA Papua Barat	Siakwa	Miyah	Tambrau	Papua Barat
510	BBKSDA Papua	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua
511	BBKSDA Papua	Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura	Papua
512	BBKSDA Papua	Nafri	Abepura	Kota Jayapura	Papua
513	BBKSDA Papua	Nifasi	Makimi	Nabire	Papua
514	BBKSDA Papua	Waibron	Sentani Barat	Jayapura	Papua
515	BBKSDA Papua	Waan	Muting	Merauke	Papua
516	BBKSDA Papua	Kolam	Muting	Merauke	Papua
517	BBKSDA Papua	Selil	Ulilin	Merauke	Papua
518	BBKSDA Papua	Boha	Muting	Merauke	Papua
519	BBKSDA Papua	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	Papua
520	BBKSDA Papua	Makimi	Makimi	Nabire	Papua
521	BBKSDA Papua	Sewenui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	Papua
522	BBKSDA Papua	Maribu	Sentani Barat	Jayapura	Papua
523	BBKSDA Papua	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua
524	BBKSDA Papua	Enggros	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua
525	BBKSDA Papua	Kaisa	Animha	Merauke	Papua
526	BBKSDA Papua	Pachas	Muting	Merauke	Papua
527	BBKSDA Papua	Kindiki	Ulilin	Merauke	Papua
528	BBKSDA Papua	Manwai Bob	Muting	Merauke	Papua
529	BBKSDA Papua	Wasani	Warsa	Biak Numfor	Papua
530	BBKSDA Papua	Marsram	Supiori Timur	Supiori	Papua
531	BBKSDA Papua	Hanyaan	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua
532	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Lisai	Pinang Belapis	Lebong	Bengkulu
533	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Pinang	Lubuk Pinang	Muko muko	Bengkulu
534	BBKSDA Riau	Batu Sanggan	Kampar Kiri Hulu	Kampar	Riau
535	BBKSDA Riau	Muaro Bio	Kampar Kiri Hulu	Kampar	Riau
536	BBKSDA Riau	Terusan	Kampar Kiri Hulu	Kampar	Riau
537	BBKSDA Riau	Sungai Guntung Tengah	Rengat	Indragiri Hulu	Riau
538	BBKSDA Riau	Pangkalan Indarung	Singingi	Kuantan Singingi	Riau
539	BBKSDA Riau	Pulaupadang	Singingi	Kuantan Singingi	Riau
540	BBKSDA Riau	Kampung Pulau	Rengat	Indragiri Hulu	Riau
541	BTN Komodo	Golo Mori	Komodo	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur

Lampiran 7. Rekapitulasi Luas pemberian akses kemitraan konservasi Tahun 2022

No	Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Nama Kelompok	Luas (Ha)
1	BTN Siberut	Simalegi	Siberut Barat	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	KTH Simalegi Tengah	200
2	BTN Siberut	Simatalu	Siberut Barat	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	KTH Manau Simalibbeg	200
3	BTN Siberut	Simalegi	Siberut Barat	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	KTH Betaet Simaeruk	300
4	BTN Siberut	Simatalu	Siberut Barat	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	KTH Ailiakenen	300
5	BTN Sebangau	Sebangau Jaya	Katingan Kuala	Katingan	Kalimantan Tengah	Kelompok Nelayan Kerja Bersama	1.157,89
6	BTN Sebangau	Paduran Sebangau	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Kelompok Nelayan Putra Muara Pangkoh Sebangau	232,48
7	BTN Sebangau	Kereng Bangkirai	Sabangau	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kelompok Nelayan Tangkap Tradisional Kereng Permai	690,79
8	BTN Sebangau	Kereng Bangkirai	Sabangau	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kelompok Nelayan Bakung Permai	1.567,02
9	BTN Sebangau	Paduran Sebangau	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Kelompok Nelayan Paduran Sebangau Makmur	408,86
10	BTN Sebangau	Sebangau Permai	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Kelompok Nelayan Perikanan Alam Paduran Permai	139,35
11	BTN Sebangau	Habaring Hurung	Bukit Batu	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Kelompok Habaring Hurung Lestari	42,88
12	BKSDA Maluku	Kawa	Seram Barat	Seram Barat	Maluku	Pokmas Nelayan Makmur	484,4
13	BKSDA Maluku	Piru	Seram Barat	Seram Bagian Barat	Maluku	Pokmas Mitra Tanela Sejahtera	50
14	BKSDA Maluku	Kawa	Seram Barat	Seram Barat	Maluku	Pokmas Nusa Patan	150
15	BTN Aketajawe Lolobata	Rioribati	Jailolo Selatan	Halmahera Barat	Maluku Utara	KTH Ake Kapita	67
16	BTN Aketajawe Lolobata	Tabanalow	Wasile Selatan	Halmahera Timur	Maluku Utara	KTH Makatanoan Mandiri	29
17	BTN Taka Bonerate	Tarupa	Taka Bonerate	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	Pokmas Nelayan Ngajagaan Garas Timbo	305
18	BTN Wakatobi	Sowa	Togo Binongko	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Kelompok Kemitraan Konservasi Barangko To Oha	1.340,00
19	BTN Wakatobi	Popalia	Togo Binongko	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Kelompok Kemitraan	1.454,00

No	Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Nama Kelompok	Luas (Ha)
						Konservasi Fungka Dalima	
20	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Kambata Wundut	Lewa	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	KTH Mamohung	7,59
21	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cibedug	Ciawi	Bogor	Jawa Barat	KTH Ciaul Maju Bersama	16,66
22	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cihanyawar	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat	KTH Kuta Lestari	41,81
23	BBTN Gunung Gede Pangrango	Tangkil	Caringin	Bogor	Jawa Barat	KTH Putra Batong Pangrango	19,19
24	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ginanjari	Ciambur	Sukabumi	Jawa Barat	KTH Harapan Maju	43,22
25	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cihanyawar	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat	KTH Tunas Harapan	12,15
26	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ambarjaya	Ciambur	Sukabumi	Jawa Barat	KTH Karya Tani	38,53
27	BBTN Gunung Gede Pangrango	Babakan Panjang	Nagrak	Sukabumi	Jawa Barat	KTH Mandiri Cikawung	11,81
28	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pekon Sumur Jaya	Pesisir Barat	Pesisir Barat	Lampung	KTH Kubu Gedung Jaya Lestari	46,3
29	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pekon Kubu Perahu	Balik Bukit	Lampung	Lampung	KTH Cinta Damai	82
30	BTN Kepulauan Seribu	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu Utara	Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Pokmas Smiling Coral Indonesia	10,03
31	BTN Batang Gadis	Longat	Penyabungan Barat	Mandailing Natal	Sumatera Utara	KTH Sipipisan Na Lampas	33,2
32	BTN Batang Gadis	Pagar Gunung	Kotanopan	Mandailing Natal	Sumatera Utara	KTH Aek Pagur	26,26
33	BTN Batang Gadis	Simpang Banyak Jae	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	Sumatera Utara	KTH Bersama Majuh	20,08
34	BTN Batang Gadis	Pastap Julu	Tambangan	Mandailing Natal	Sumatera Utara	KTH Aek Tombang	33,58
35	BBTN Kerinci Seblat	Pal VIII	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	Bengkulu	KT Karya Utama	63
36	BTN Wakatobi	Lewuto	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Lewuto	706,01
37	BTN Wakatobi	Tanomeha	Kaledupa	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Sikadangkaan Sama	951
38	BTN Rawa Aopa Watumohai	Unggulino	Puriala	Konawe	Sulawesi Tenggara	KN Hulo'a	100
39	BTN Rawa Aopa Watumohai	Roraya	Tinanggea	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	KN Tanjung Roraya	100

No	Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Nama Kelompok	Luas (Ha)
40	BTN Rawa Aopa Watumohai	Puulipu	Angata	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	KN Masagena	100
41	BBTN Kerinci Seblat	Sukau Datang	Pelabai	Lebong	Bengkulu	KT Mergo Belimau	26,74
42	BBTN Kerinci Seblat	Sebelat Ulu	Pinang Berlapis	Lebong	Bengkulu	KT Keliling Tebo	21,76
43	BTN Kepulauan Togean	Biga	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	KN Jaya Mandiri	2.881,80
44	BTN Kepulauan Togean	Kondongan	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	Kelompok Usaha Baru	2.136,11
45	BTN Kepulauan Togean	Salinggoha	Walea Besar	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	Kelompok Fajar Baru	2.356,84
46	BTN Manusela	Negeri Kaloa	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku	KT Getah Damar Tunupela	659,04
47	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sani-Sani	Samaturu	Kolaka	Sulawesi Tenggara	KN Pada Idi Pada Elo	500
48	BTN Kepulauan Togean	Tanjung Pude	Una Una	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	KN Malalubis	1.357,84
49	BTN Kepulauan Togean	Tanjung Pude	Una Una	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	KN Sunu	391,85
50	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cinagara	Caringin	Bogor	Jawa Barat	KTH Jagakarsa Gede Pangrango	33,61
51	BBTN Gunung Gede Pangrango	Watesjaya	Cigombong	Bogor	Jawa Barat	KTH Konservasi Lengkong	8,7
52	BBTN Gunung Gede Pangrango	Wangunjaya	Ciambur	Sukabumi	Jawa Barat	KTH Putra Gunung Gede Pangrango	41,28
53	BBTN Gunung Gede Pangrango	Basir Buncir	Caringin	Bogor	Jawa Barat	KTH Wangun Jaya	20,8
54	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukagalih	Megamendung	Bogor	Jawa Barat	KTH Lembah Jari	23,36
55	BTN Gunung Palung	Gunung Sembilan	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat	Kelompok Kemitraan Tiang Jorong	202,98
56	BTN Gunung Palung	Sejahtera	Sukadana	Kayong Utara	Kalimantan Barat	Kelompok Kemitraan Usaha Maju Bersama	175,93
57	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya E	33,3
58	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya F	21,05
59	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya G	10,82
60	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya K	14,88

No	Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Nama Kelompok	Luas (Ha)
61	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya L	21,49
62	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya N	43,4
63	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya O	53,66
64	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Bogorejo	Gedong Tataan	Pesawaran	Lampung	KTH Wana Karya Maju Jaya	34,32
65	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Padang Cermin	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Sinar Gunung Lestari I	39,05
66	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Padang Cermin	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Sinar Gunung Lestari II	50,57
67	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Padang Cermin	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Sinar Gunung Lestari III	42,41
68	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Dantar	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Sinar Harapan Lestari	47,86
69	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Dantar	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Marga Rindu Lestari	27,88
70	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Dantar	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Mekar Sari Lestari	65,07
71	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Dantar	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Sinar Baru Lestari	70,03
72	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Dantar	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Sri Menanti Lestari	30,46
73	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	Dantar	Padang Cermin	Pesawaran	Lampung	KTH Cikumbun Lestari	52,59
74	BTN Gunung Rinjani	Tetebatu	Sikur	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	Pokmas Tetebatu	160
75	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambea	Pomalaa	Kolaka	Sulawesi Tenggara	KN Sejahtera Bersama	1.000,00
76	BTN Kayan Mentarang	Long Ketaman	Pujungan	Malinau	Kalimantan Utara	Pokmas Femong Tavai	4.318,25
77	BTN Wakatobi	Liya Mawi	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Lakantara	17,33
78	BTN Wakatobi	Liya Mawi	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Lagundi	28,2
79	BTN Wakatobi	Liya One Melangka	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Satu Hati	18,15
80	BTN Wakatobi	Liya Togo	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Sumber Agar	5,11
81	BTN Wakatobi	Liya One Melangka	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Tunas Mekar	18,97
82	BTN Wakatobi	Liya Bahari Indah	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Mekar Jaya	6,19
83	BTN Wakatobi	Waitii Barat	Tomia	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Wa Parahuu	840,32
84	BTN Wakatobi	Waitii	Tomia	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Pokmas Mangro Jaya	65,52
85	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tapunopaka	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	KTH Padarua	500

No	Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Nama Kelompok	Luas (Ha)
86	BBKSDA Sulawesi Selatan	Timampu	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	KN Timampu Jaya	5.780,98
87	BBKSDA Sulawesi Selatan	Pekaloa	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	KN Matompa	10.243,20
88	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tokalimbo	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	KN Danau Lestari Towuti	6.827,62
89	BBKSDA Sulawesi Selatan	Loeha	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	KN Buttini Loeha	5.579,68
90	BBKSDA Sulawesi Selatan	Bantilang	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Kelompok Kemkon Bantilang Permai	6.420,34
91	BTN Manusela	Negeri Elemata	Seram Utara	Maluku Tengah	Maluku	KT Getah Damar Mata Kaki Hari Negeri Elemata	393,9
92	BTN Kepulauan Togeian	Pautu	Talatako	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	KN Simpati Laut	330,49
93	BTN Kepulauan Togeian	Tobil	Togeian	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	KT Sugar Super	75,54
94	BBTN Teluk Cenderawasih	Kampung Yaur	Distrik Yaur	Nabire	Papua	Kelompok Wisata Sinar Nuhraggi	5.042,00

Lampiran 8. Capaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
A	BALAI / BALAI BESAR TN				
1	BBTN Bukit Barisan Selatan	1	Bukit Barisan Selatan	TN	73
2	BTN Bukit Baka Bukit Raya	2	Bukit Baka Bukit Raya	TN	81
3	BTN Bukit Tiga Puluh	3	Bukit Tiga Puluh	TN	76
4	BTN Ujung Kulon	4	Ujung Kulon	TN	66
5	BTN Tambora	5	Tambora	TN	79
6	BTN Matalawa	6	Matalawa	TN	83
7	BTN Berbak Sembilang	7	Berbak Sembilang	TN	78
8	BTN Boganinani Wartabone	8	Boganinani Wartabone	TN	88
9	BTN Danau Sentarum	9	Danau Sentarum	TN	82
10	BTN Kepulauan Togean	10	Kepulauan Togean	TN	83
11	BTN Takabonerate	11	Takabonerate	TN	88
12	BTN Gunung Halimun Salak	12	Halimun Salak	TN	73
13	BTN Gunung Rinjani	13	Gunung Rinjani	TN	79
14	BTN Karimun Jawa	14	Karimun Jawa	TN	75
15	BTN Kayan Mentarang	15	Kayan Mentarang	TN	74
16	BTN Kepulauan Seribu	16	Kepulauan Seribu	TN	70
17	BBTN Kerinci Seblat	17	Kerinci Seblat	TN	74
18	BTN Manusela	18	Manusela	TN	84
19	BTN Teluk Cenderawasih	19	Teluk Cenderawasih	TN	80
20	BTN Tesso Nilo	20	Tesso Nilo	TN	77
21	BTN Wakatobi	21	Wakatobi	TN	91
22	BTN Sebangau	22	Sebangau	TN	78
23	BTN Lorentz	23	Lorentz	TN	69
24	BTN Merbabu	24	Merbabu	TN	83
25	BTN Bunaken	25	Bunaken	TN	78
26	BTN Alas Purwo	26	Alas Purwo	TN	80
B	BALAI / BALAI BESAR KSDA				
1	BBKSDA Riau				
		1	Buluh Cina	TWA	78
		2	Zamrud	TN	70
		3	Balai Raja	SM	54
		4	Muka Kuning	TWA	72
		5	Sungai Pulai	KSA/KPA	23
		6	Gunung Lengkuas	KSA/KPA	22
		7	Gunung Kijang	KSA/KPA	23
		8	PLG Sebangau	SM	52
		9	Pulau Rempang	TB	60
2	BBKSDA JAWA BARAT				
		1	Gunung Simpang	CA	64
		2	Tangkuban Perahu Palabuhan ratu	CA	48
		3	Bojong Larang	CA	65
		4	Cibanteng	CA	71
		5	Pulau Dua	CA	69
		6	Rawa Danau	CA	69
		7	Sukawayana	CA	70
		8	Tukung Gede	CA	72
		9	Cadas Malang	CA	73
		10	Gunung Pancar	TWA	72
		11	Tjigenteng Tjipanji	KSA/KPA	28
		12	Gunung Tampomas	TWA	45
		13	Junghun	CA	65
		14	Talaga Bodas	TWA	72,41
		15	Papandayan Darajat	TWA	62
		16	Kawah Kamojang	TWA	73
		17	Pananjung Pangandaran	CA	71
		18	Panjalu	CA	71
		19	Pananjung Pangandaran	TWA	74
		20	Linggarjati	TWA	71
		21	Tangkuban Parahu	TWA	76

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
		22	Gunung Tangkuban Parahu	CA	71
3	BKSDA NTB				
		1	Pulau Panjang	CA	56
		2	Danau Rawa Taliwang	TWA	67
		3	Semongkat	TWA	74
		4	Tanjung Tampa	TWA	47
		5	Pulau Moyo	TWA	50
		6	Pulau Satonda	TWA	67
		7	Bangko-Bangko	TWA	57
		8	Kerandangan	TWA	80
		9	Danuera	KSA/KPA	11
		10	Toffu Kota Lambu	CA	57
		11	Jereweh	KSA/KPA	31
		12	Moyo	TB	62
4	BKSDA SUMATERA BARAT				
		1	Panti	CA	67
		2	Batang Pangean I	CA	61
		3	Malampah Alahan panjang	SM	67
		4	Pulau Pagai Selatan	SM	45
		5	Barisan	SM	70
		6	Rimbo Panti	TWA	64
		7	Air Putih	TWA	57
		8	Singgalang Tandikat	TWA	70
		9	Mega Mendung	TWA	57
		10	Saibi Sarabua	TWA	49
5	BKSDA SULAWESI SELATAN				
		1	Faruhumpenai	CA	76
		2	Kaleena	CA	73
		3	Ponda-Ponda	CA	79
		4	Cani Sidendreng	TWA	62
		5	Danau Mahalona	TWA	61
		6	Danau Matano	TWA	67
		7	Danau Towuti	TWA	68
6	BKSDA PAPUA BARAT				
		1	Batanta Barat	CA	56
		2	Waigeo Barat	CA	74
		3	Waigeo Timur	CA	75
		4	Klamono	TWA	68
		5	Sorong	TWA	71
		6	Laut Kafiau	CA	27
		7	Pulau Kafiau	CA	23
		8	Pegunungan Wandiboy	CA	55
		9	Wagure Kote	CA	30
		10	Pegunungan Fak Fak	CA	69
		11	Arfak	CA	59
		12	Mumbarani Kaironi	SM	49
7	BKSDA SUMATERA SELATAN				
		1	Bentayan	SM	74
		2	Padang Sugihan	SM	71
		3	Maras	TN	51
		4	Gunung Permisan	TWA	62
		5	Hutan Suaka Alam Gumai Tb Tinggi	KSA/KPA	84
		6	Jering Menduyung	TWA	70
8	BKSDA JAWA TENGAH				
		1	Bekutuk	CA	80
		2	Gunung Celering	CA	81
		3	Keling I	CA	77
		4	Keling II -III	CA	78
		5	Grojogan Sewu	TWA	81
		6	Sumber Semen	TWA	75
		7	Telogo Warna Telogo Pengilon	TWA	80
		8	Telogo Sumurup	CA	78

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
		9	Telogo Dringo	CA	79
		10	Pringambo I	CA	70
		11	Pagerwurung Darupuno	CA	77
		12	Guci	TWA	88
		13	Moga	CA	84
		14	Wijayakusuma	CA	78
		15	Nusakambangan Timur	CA	77
		16	Karang Bolong	CA	78
		17	Curug Bengkawah	CA	78
9	BBKSDA NTT				
		1	Maubesi	CA	78
		2	Wae Wuul	CA	58
		3	Wolo Tadho	CA	59
		4	Ale Aisio	SM	67
		5	Egon Illimedo	SM	73
		6	Harlu	SM	76
		7	Bena	TB	48
		8	Pulau Ndana	TB	41
		9	Bipolo	TWA	57
		10	Menipo	TWA	77
		11	Pulau Lapang	TWA	40
		12	Pulau Rusa	TWA	39
		13	Ruteng	TWA	77
		14	Teluk Kupang	TWAL	60
10	BKSDA YOGYAKARTA				
		1	Batu Gamping	CA	79
		2	Batu Gamping	TWA	77
11	BKSDA KALIMANTAN SELATAN				
		1	Teluk Kelumpang, Selat laut	CA	70
		2	Asam-asam	KSA/KPA	38
		3	Kuala Lupak	SM	73
		4	Pulau Kaget	SM	73
		5	Pelaihari	SM	66
12	BKSDA KALIMANTAN TENGAH				
		1	Sungai Sebangau	KSA/KPA	28
		2	Tanjung Malatayur	KSA/KPA	20
		3	Bukit Tangkiling	TWA	68
		4	Pararawen	CA	69
		5	Sungai Barito	KSA/KPA	35
		6	Sungai Kapuas	KSA/KPA	35
13	BKSDA SULAWESI TENGAH				
		1	Pati-Pati	SM	74
		2	Pamona	CA	78
		3	Tinombala	CA	77
		4	Lombuyan	SM	83
		5	Tanjung Santioi	SM	74
		6	Landusa Tomata	TB	77
		7	Pulau Tokobae	TWA	78
		8	Wera	TWA	81
		9	Morowali	CA	85
14	BKSDA MALUKU				
		1	Pulau Gn Api Kisar	CA	21
		2	Lifamatola	CA	37
		3	Pulau Sehu	CA	40
		4	Taliabu	CA	36
		5	Bekauhuhun	SA	28
		6	Daab	SA	41
		7	Gunung Sahuwai	SA	71,76
		8	Sungai Nief	SA	61
		9	Tanjung Sial	SA	63

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
		10	Danau Tihu	SM	36
		11	Pulau Bava	SM	49
		12	Pulau Kasa	SM	82
		13	Pulau Kobroor	SM	52
		14	Pulau kaget	TWAL	54
		15	Pulau Marsegu	TWA	74
15	BBKSDA SUMATERA UTARA				
		1	Aek Liang Balik	CA	43
		2	Batu Gajah	CA	56
		3	Batu Ginurit	CA	43
		4	Dolok Saut	CA	63
		5	Sei Ledung	SA	39
		6	Dolok Lubuk Raya	SA	58
		7	Sijaba Hutaginjang	TWA	51
		8	Dolok Tinggi Raja	TWA	63
		9	Sibolangit	TWA	77
		10	Sicike Cike	TWA	71
		11	Holiday Resort	TWA	60
		12	Pulau Pini	TB	39
16	BBKSDA JAWA TIMUR				
		1	Goa Ngilirip	CA	74
		2	Pulau Noko	CA	66
		3	Pulau Nusa	CA	70
		4	Tretes	TWA	72
		5	Sempu	CA	81
		6	Sungai Kolbu	CA	83
		7	Curah Manis Sempolan I-VIII	CA	76
		8	Watangan Puger	CA	78
		9	Panjur Ijen I	CA	73
		10	Panjur Ijen II	CA	73
		11	Ceding	CA	78
		12	Janggangan Rogojampi I	CA	76
		13	Janggangan Rogojampi II	CA	78
17	BBKSDA PAPUA				
		1	Cycloop	CA	70
		2	Teluk Youtefa	TWA	61
		3	Biak Utara	CA	57
		4	Yapen Tengah	CA	55
		5	Enarotali	CA	44
		6	Pegunungan Jayawijaya	SM	33
		7	Pulau Dolok	SM	49
		8	Pulau Komolon	SM	48
		9	Pulau Savan	SM	48
18	BKSDA ACEH				
		1	Serbojadi	CA	73
		2	Kepulauan Banyak	TWA	79
		3	Kuta Malaka	TWA	53
		4	Jantho	CA	81
19	BKSDA JAMBI				
		1	Durian Luncuk I	CA	70
		2	Gua Ulu Tiangko	CA	43
		3	Hutan Bakau Pantai Timur	CA	71
		4	Buluh Hitam	KSA/KPA	40
		5	Durian Luncuk II	CA	70
		6	Sungai Bengkal	KSA/KPA	46
		7	Sungai Betara	CA	38
20	BKSDA JAKARTA				
		1	Pulau Rambut	SM	89
		2	Angke Kapuk	TWA	88
21	BKSDA BALI				
		1	Gunung Batur Bukit Payang	TWA	75
		2	Panelokan	TWA	66

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
		3	Sangeh	TWA	68
22	BKSDA SULAWESI UTARA				
		1	Panua	CA	67
		2	Tangale II	CA	61
		3	Karakeleng	SM	62
		4	Nantu	SM	70
		5	Tanjung Panjang	CA	52
		6	Gunung Ambang	TWA	63
23	BKSDA BENGKULU LAMPUNG				
		1	Seblat	TWA	91
		2	Way Hawang	TWA	60
		3	Pantai Panjang	TWA	81
		4	Lubuk Tapi Kayu Ajaran	TWA	59
		5	Air Alas	CA	72
		6	Kioyo I dan II	CA	78
		7	Air Rami II	CA	75
		8	Air Rami I	CA	71
		9	Muko-muko	CA	65
		10	Muko-muko II	CA	70
		11	Air Hitam	TWA	78
		12	Gunung Nano'a	TB	75
		13	Danau Tes	TWA	67
		14	Teluk Klowe	CA	83
		15	Tanjung Laksana	CA	82
		16	Sungai Bahewo	CA	83
		17	Air seblat	CA	70
		18	Danau Menghijau	CA	68
24	BKSDA KALIMANTAN BARAT				
		1	Sungai Liku	TWA	73
		2	Gunung Kelam	TWA	73
		3	Asunsuang	TWA	68
		4	Mandor	CA	62
		5	Lo Pat Fun Pi	CA	64
		6	Kepulauan Karimata	CAL	63
		7	Gunung Nyiut	CA	70
25	BKSDA KALIMANTAN TIMUR				
		1	Pulau Semama	SM	76
		2	Teluk Adang	CA	75
		3	Teluk Apar	CA	70
26	BKSDA SULAWESI TENGGERA				
		1	Tirta Rimba	TWA	76
		2	Teluk Lasolo	TWA	78,12
		3	Tanjung Peropa	SM	75
		4	Batikolo	SM	74
		5	Buton Utara	SM	73
		6	Napabalano	CA	73
C	UPTD TAHURA				
		1	Banten	THR	66
		2	Juanda	THR	74
		3	Pancoran Mas	THR	68
		4	Gunung Palasari Kunci	THR	65
		5	Abdul Latif	THR	74
		6	Geluguran	THR	48
		7	Sultan Adam	THR	80
		8	Lae Kombih	THR	45
		9	Sebatung	THR	35
		10	Yohannes	THR	37
		11	Wan abdul Rahman	THR	77
		12	Tuanku Sambusai	THR	24
		13	Sulawesi Tengah	THR	58

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	NILAI EFEKTIVITAS
		14	Soeryo	THR	81,52
		15	Pandan Puloh	THR	31
		16	Nuraksa	THR	71
		17	Gunung Manumbing	THR	65
		18	Mangkunegara	THR	71
		19	Malino	THR	40
		20	Lati Petangis	THR	81
		21	Lapak Jaru	THR	75
		22	Dr Muhammad Hatta	THR	45
		23	Bukit Sari	THR	67
		24	Mongkol	THR	69
		25	Bukit Barisan	THR	73

Lampiran 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Per-satker Tahun 2022 (Sumber:Omspan)

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	BTN TAMBORA	11.719.382.000	11.414.675.629	97,40%
2	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	15.860.053.000	15.575.339.198	98,20%
3	BBKSDA JAWA BARAT	37.363.860.000	36.065.659.439	96,53%
4	BKSDA JAWA TENGAH	20.195.285.000	19.870.511.397	98,39%
5	BBKSDA JAWA TIMUR	27.735.424.000	26.981.934.487	97,28%
6	BTN BALURAN	15.088.777.000	14.541.837.830	96,38%
7	BKSDA NANGROE ACEH DARUSSALAM	26.448.331.000	25.802.856.347	97,56%
8	BBKSDA SUMATERA UTARA	30.463.947.000	30.109.583.984	98,84%
9	BKSDA SUMATERA BARAT	19.389.947.000	18.879.824.288	97,37%
10	BBKSDA RIAU	27.907.611.000	27.813.630.637	99,66%
11	BKSDA JAMBI	22.120.495.000	21.296.679.285	96,28%
12	BKSDA SUMATERA SELATAN	31.044.776.000	30.206.266.537	97,30%
13	BKSDA KALIMANTAN BARAT	20.929.878.000	19.399.912.969	92,69%
14	BTN TANJUNG PUTING	13.523.518.000	13.130.667.858	97,10%
15	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	17.178.441.000	17.116.872.831	99,64%
16	BTN KUTAI	14.513.421.000	14.132.878.739	97,38%
17	BKSDA SULAWESI UTARA	11.781.522.000	11.564.438.913	98,16%
18	BKSDA SULAWESI TENGAH	16.086.679.000	15.910.871.664	98,91%
19	BBKSDA SULAWESI SELATAN	34.465.804.000	30.549.789.392	88,64%
20	BKSDA SULAWESI TENGGARA	16.065.931.000	16.031.882.027	99,79%
21	BKSDA MALUKU	20.313.396.000	20.127.787.587	99,09%
22	BKSDA BALI	15.714.682.000	15.517.805.920	98,75%
23	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	16.224.336.000	15.788.184.110	97,31%
24	BKSDA BENGKULU	24.868.796.000	24.446.024.895	98,30%
25	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	21.288.692.000	21.261.994.247	99,87%
26	BBTN GUNUNG LEUSER	26.866.638.000	25.537.988.462	95,05%
27	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	23.500.770.000	22.780.532.972	96,94%
28	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	29.183.541.000	28.911.156.342	99,07%
29	BTN KOMODO	15.503.917.000	15.216.947.199	98,15%
30	BBKSDA PAPUA	27.237.759.000	26.770.212.750	98,28%
31	BBKSDA PAPUA BARAT	23.781.992.000	23.577.969.468	99,14%
32	BTN KAYAN MENTARANG	11.690.667.000	11.605.008.457	99,27%
33	BTN UJUNG KULON	112.628.864.000	111.721.000.000	99,19%
34	BTN BOGANI NANI WARTABONE	16.297.540.000	15.879.276.619	97,43%
35	BTN BALI BARAT	20.976.843.000	20.277.726.663	96,67%
36	BTN SEBANGAU	14.279.044.000	14.120.968.817	98,89%
37	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	142.410.257.000	136.754.000.000	96,03%
38	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	17.500.813.000	16.403.569.139	93,73%
39	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	21.100.436.000	20.658.401.260	97,91%
40	BBTN KERINCI SEBLAT	37.284.978.000	36.618.082.384	98,21%
41	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	19.730.372.000	19.107.710.782	96,84%
42	BTN BATANG GADIS	10.113.328.000	10.106.948.048	99,94%
43	BTN TESSO NILO	12.234.873.000	12.069.080.943	98,64%
44	BTN BUKIT 12	12.977.344.000	12.757.821.963	98,31%
45	BTN GUNUNG CEREMAI	13.799.997.000	13.665.882.566	99,03%
46	BTN GUNUNG MERAPI	13.836.036.000	13.437.592.595	97,12%
47	BTN GUNUNG MERBABU	13.001.981.000	12.861.054.940	98,92%
48	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	14.269.824.000	14.101.726.017	98,82%
49	BTN KEPULAUAN TOGEAN	9.749.218.000	9.698.768.417	99,48%
50	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	15.161.133.000	15.132.827.337	99,81%
51	BTN AKETAJAWA-LOLOBATA	10.480.038.000	10.264.088.793	97,94%
52	BTN LORENTZ	14.731.060.000	14.045.260.424	95,34%
53	BTN MERU BETIRI	13.779.420.000	13.735.227.950	99,68%
54	BTN WAY KAMBAS	38.137.003.000	35.011.870.403	91,81%
55	BBTN LORE LINDU	26.594.974.000	25.685.360.016	96,58%
56	BTN ALAS PURWO	15.134.222.000	14.655.202.630	96,83%
57	BTN BUNAKEN	10.471.619.000	10.295.668.422	98,32%
58	BTN KEP. SERIBU	12.508.097.000	12.382.377.271	98,99%
59	BBTN TELUK CENDERAWASIH	22.110.495.000	22.073.657.298	99,83%
60	BTN GUNUNG HALIMUN	17.940.543.000	17.431.371.211	97,16%
61	BTN KARIMUN JAWA	15.076.801.000	14.882.115.312	98,71%
62	BTN WASUR	13.896.833.000	13.678.669.461	98,43%
63	BTN SIBERUT	13.552.151.000	13.263.130.525	97,87%

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
64	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	19.695.489.000	17.921.257.717	90,99%
65	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	24.822.956.000	24.149.171.921	97,29%
66	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	14.228.697.000	14.151.807.348	99,46%
67	BTN KELIMUTU	10.201.512.000	10.018.181.446	98,20%
68	BTN WAKATOBİ	16.024.406.000	16.023.872.909	100,00%
69	BTN GUNUNG PALUNG	11.692.239.000	11.598.594.143	99,20%
70	BTN TAKA BONERATE	12.927.735.000	12.856.880.703	99,45%
71	BTN BUKIT TIGA PULUH	13.816.672.000	13.356.490.322	96,67%
72	BTN MANUSELLA	11.493.419.000	11.310.501.976	98,41%
73	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	10.548.937.000	10.395.421.590	98,54%
74	BTN GUNUNG RINJANI	16.318.431.000	15.995.640.885	98,02%
75	BKSDA D.I YOGYAKARTA	12.738.795.000	12.726.092.101	99,90%
TOTAL		1.602.333.693.000	1.561.218.077.127	97,43%



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Jakarta, 10270
Telp. (021) 573-3437,